BADAN POM

Inspektorat Utama

Laporan Kinerja Interim



TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2025

SOLUSI

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga melayani bangsa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KATA PENGANTAR



Penyajian laporan kinerja interim Inspektorat Utama triwulan III tahun 2025 merupakan perwujudan akuntabilitas target kinerja dan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan mandat yang dipercayakan kepada Inspektorat Utama. Laporan kinerja interim Inspektorat Utama triwulan III tahun 2025 yang disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Utama kepada pimpinan Badan POM, masyarakat, dan para pemangku kepentingan. Laporan Kinerja menyajikan informasi keberhasilan pencapaian kinerja, upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan kinerja, serta evaluasi atas pencapaian tujuan dan sasaran program Inspektorat Utama pada triwulan III tahun 2025.

Kami menyadari bahwa keberhasilan yang telah dicapai pada triwulan ini tidak terlepas dari kerja keras seluruh tim, dukungan dari berbagai pihak, serta sinergi yang terus terjalin di antara seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban bagi Inspektorat Utama atas pelaksanaan kewenangan, penggunaan sumber daya pengawasan intern dan pencapaian target kinerja. Semoga sumbangsih pelaksanan pengawasan intern dan reposisi *trusted advisor* menuju *value driver* memiliki kontribusi pada peningkatan kinerja dan terciptanya *good governance* dan *clean government* di Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Jakarta, 15 Oktober 2025
Inspektur Utama BPOM,



Yan Setiadi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

INSPEKTORAT UTAMA
HIGHLIGHT KINERJA

BADAN POM BerAKHLAK #bangga melayani bangsa

TW III
TA 2025

CAPAIAN REALISASI ANGGARAN

Selama Triwulan III TA 2025, Inspektorat Utama memiliki pagu awal sebesar **Rp19.427.456.000**, Kemudian Inspektorat Utama melakukan revisi pemenuhan kebutuhan anggaran untuk PPNPN sebesar **Rp220.520.000** dan revisi pemenuhan kebutuhan belanja pegawai existing dan CASN TA 2025 sebesar **Rp1.411.020.000**, sehingga total pagu Inspektorat Utama tahun 2025 menjadi **Rp21.058.996.000.** Selanjutnya, terdapat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja maka **dilakukan efisiensi sebesar Rp9.929.508.** Sehingga **anggaran yang dapat digunakan** sebesar **Rp11.129.488.000**



B. PEGAWAI	B. BARANG	B. MODAL
72,33%	76,81%	97,98%
RP 5.107.763.189	RP 2.817.664.592	RP 389.997.005

CAPAIAN REALISASI KINERJA

105,27% NKO TW III **ISTIMEWA**

Persentase Rekomendasi Pengawasan *Assurance* yang ditindaklanjuti	103,76%
Persentase Layanan Jasa Konsultansi pada Mitra Kerja Inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	102,04%
Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	117,19%

KEGIATAN INSPEKTORAT UTAMA



Penerimaan Penghargaan atas Capaian NKA Tahun 2024 pada Monitoring dan Evaluasi Semester I 2025



Pencanangan Laboratorium Integritas & Akuntabilitas pada Balai POM di Bandung



Entry Meeting Pemeriksaan Kinerja atas Efektifitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pengan Olahan Tahun 2024 & 2025

Ringkasan Eksekutif

Inspektorat Utama telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025 terutama menyangkut kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program pada tahun 2025. Selain itu, Inspektorat Utama juga telah menetapkan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran. Untuk mendukung Sasaran Program tersebut, Inspektorat Utama Badan POM menetapkan 3 (tiga) Sasaran Program dengan 11 (sebelas) indikator kinerja, yang keseluruhannya merupakan indikator kinerja Sasaran Program (IKSP) yang telah diperjanjikan antara Inspektur Utama dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sasaran Program Inspektorat Utama adalah (1) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama; (2) Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan yang efektif dan efisien; (3) Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional.

Pada Triwulan III 2025, Inspektorat Utama memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar **105,27** dengan predikat **"Istimewa".** NKO ini diperoleh dari rata-rata capaian indikator kinerja yang memiliki target di triwulan III 2025. Indikator kinerja yang diukur pada triwulan III ini adalah "Persentase rekomendasi pengawasan *assurance* yang ditindaklanjuti", "Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu", dan "Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu". Sedangkan untuk 8 (delapan) IKSP lainnya baru dapat diukur pada akhir triwulan IV tahun 2025.

Penyerapan anggaran Inspektorat Utama sampai dengan triwulan III tahun 2025 untuk pelaksanaan program Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah sebesar **Rp 8.954.990.257 atau 42,52%** (Realisasi berdasarkan SPM yang telah diterbitkan dari aplikasi SAKTI) dan **Rp 8.315.424.796 atau 39,49%** (Realisasi berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan) dari jumlah keseluruhan pagu **21.058.996.000** dengan Blokir Anggaran sebesar **Rp9.929.508.000**. Sedangkan penyerapan anggaran Inspektorat Utama sampai dengan triwulan III tahun 2025 untuk pelaksanaan program Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan

Pengawas Obat dan Makanan jika dibandingkan dengan pagu non blokir adalah sebesar **Rp 8.954.990.257 atau 80,46%** (Realisasi berdasarkan SPM yang telah diterbitkan dari aplikasi SAKTI) dan **Rp 8.315.424.796 atau 74,71%** (Realisasi berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan) dari jumlah keseluruhan pagu non blokir **Rp 11.129.488.000.**

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja triwulan III tahun 2025, telah dirumuskan langkah-langkah yang perlu diambil dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan internal, antara lain yaitu:

1. Memaksimalkan dan meningkatkan pelaksanaan pengumpulan data kinerja, evaluasi internal dengan cara melaksanakan monitoring atas capaian kinerja secara berkala untuk dapat mengantisipasi kendala serta hambatan yang terjadi untuk dapat menentukan langkah-langkah perbaikan atas kendala serta hambatan atas pencapaian kinerja;
2. Mengoptimalkan peran Inspektorat Utama sebagai mitra strategis dan *trusted advisor* yang memberikan manfaat dan nilai tambah bagi Badan POM di bidang tata kelola pemerintahan, manajemen risiko dan pengendalian intern;
3. Mengembangkan digitalisasi pengawasan intern dan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer (TPBK) secara berkelanjutan;
4. Menjalin kerjasama Lintas sektor yang lebih erat antara Inspektorat Utama Badan POM dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Keuangan dan *stakeholder* terkait lainnya dalam berbagai aspek yang relevan untuk pembinaan dan peningkatan pelaksanaan pengawasan internal.

DAFTAR ISI

I	Pendahuluan	Latar Belakang	2
		Gambaran Umum Organisasi	3
		Struktur Organisasi	3
		Isu Strategis	16
II	Perencanaan & Perjanjian Kinerja	Rencana Strategis	23
		Rencana Kinerja Tahunan 2025	29
		Perjanjian Kinerja Tahun 2025	32
		Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2025	38
		Metode Pengukuran	39
III	Akuntabilitas Kinerja	Capaian Kinerja Organisasi	54
		Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya	110
		Realisasi Anggaran	157
IV	Branding Pengawasan	Inovasi Pengawasan (Aplikasi)	170
		Sharing Knowledge	172
		Penghargaan	177
		Lain-lain	181
V	Penutup	Kesimpulan	201
		Permasalahan	202
		Saran	202
		LAMPIRAN	204

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pemenuhan Kebutuhan JFA Di Inspektorat Utama 9
Tabel 2 Pemenuhan Kebutuhan Auditor 10
Tabel 3 Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Inspektorat Utama Per 30 September 2025 11
Tabel 4 Perkembangan Sarana Kerja Inspektorat Utama Tahun 2021 S.D. Triwulan III Tahun 2025 11
Tabel 5 Realisasi Anggaran Inspektorat Utama Triwulan III Tahun Anggaran 2025 (Per Kegiatan) 15
Tabel 6 Indikator Tujuan Inspektorat Utama 2025-2029 26
Tabel 7 Rencana Kinerja Inspektorat Utama 2025 30
Tabel 8 Sasaran Program, Indikator, Target Tahun 2025 32
Tabel 9 Matriks Semula Menjadi Revisi Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2025 34
Tabel 10 Revisi Sasaran Program, Indikatora, Target Tahun 2025 36
Tabel 11 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2025 37
Tabel 12 Kategori Pencapaian Indikator Kinerja dan Sasaran Program 40
Tabel 13 Contoh Perhitungan NKO Periodik 40
Tabel 14 Predikat Nilai Kinerja Organisasi 41
Tabel 15 Manual IKU Sasaran Program Inspektorat Utama Tahun 2025 41
Tabel 16 Capaian Kinerja Inspektorat Utama TW III Tahun 2025 54
Tabel 17 Capaian Sasaran Program 1 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal Dalam Koordinasi Inspektorat Utama 58
Tabel 18 Matriks Penyesuaian Target Indikator “Indeks Reformasi Birokrasi BPOM Di Lingkup Inspektorat Utama” 60
Tabel 19 Matriks Penyesuaian Target 2025 Indikator Di Tingkat Eselon II Inspektorat I/Inspektorat II 60
Tabel 20 Capaian Kinerja IKSP.1 Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama TW III 2025 61
Tabel 21 Efisiensi Capaian Kinerja IKSP.1 Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama TW III 2025 63
Tabel 22 Capaian Kinerja IKSP.2 Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama TW III 2025 67
Tabel 23 Efisiensi Capaian Kinerja IKSP.2 Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama TW III 2025 68
Tabel 24 Capaian Kinerja IKSP.3 Nilai Akip Inspektorat Utama TW III 2025 69
Tabel 25 Efisien Capaian Kinerja IKSP.3 Nilai Akip Inspektorat Utama TW III 2025 74
Tabel 26 Capaian Kinerja IKSP.4 Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama TW III 2025 77
Tabel 27 Efisiensi Capaian Kinerja IKSP.4 Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama TW III 2025 78
Tabel 28 Matriks Penyesuaian Target 2025 Indikator “Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama” 81

Tabel 29 Matriks Penyesuaian Target 2025 Indeks Manajemen Risiko Pada Tingkat Eselon II Lingkup Inspektorat Utama 82
Tabel 30 Capaian Kinerja IKSP.5 Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama TW III 2025 82
Tabel 31 Capaian Sasaran Program 2 Meningkatnya Kualitas Layanan Pengawasan Intern Yang Efektif Dan Efisien 85
Tabel 32 Capaian Kinerja IKSP.6 Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Inspektorat Utama TW III 2025 88
Tabel 33 Capaian Efisiensi IKSP.6 Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Inspektorat Utama TW III 2025 89
Tabel 34 Capaian Kinerja IKSP.7 Persentase Rekomendasi Pengawasan Assurance Yang Ditindaklanjuti TW III 2025 91
Tabel 35 Capaian Efisiensi IKSP.7 Persentase Rekomendasi Pengawasan Assurance Yang Ditindaklanjuti TW III 2025 93
Tabel 36 Capaian Kinerja IKSP.8 Persentase Layanan Jasa Konsultansi Pada Mitra Kerja Inspektorat Utama Yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu TW III 2025 95
Tabel 37 Capaian Efisiensi IKSP.8 Persentase Layanan Jasa Konsultansi Pada Mitra Kerja Inspektorat Utama Yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu TW III 2025 97
Tabel 38 Matriks Semula Menjadi Manual IKU IKSP.9 Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti sesuai Kriteria dan Tepat Waktu 98
Tabel 39 Perhitungan Ulang IKU Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti sesuai Kriteria dan Tepat Waktu 100
Tabel 40 Capaian Kinerja IKSP.9 Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Kriteria Dan Tepat Waktu TW III 2025 101
Tabel 41 Capaian Efisiensi IKSP.9 Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Kriteria Dan Tepat Waktu TW III 2025 102
Tabel 42 Capaian Kinerja Sasaran Program 3 Terwujudnya Inspektorat Utama Yang Profesional Triwulan II 2025 103
Tabel 43 Matriks Penyesuaian Target dan Nomenklatur Indikator Target Eselon II yang mendukung pada Indikator “Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP” 104
Tabel 44 Capaian Kinerja IKSP.10 Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP TW III 2025 105
Tabel 45 Capaian Efisiensi IKSP.10 Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP TW III 2025 106
Tabel 46 Capaian Kinerja IKSP.11 Nilai Telaah Sejawat Intern Inspektorat Utama TW III 2025 107
Tabel 47 Capaian Efisiensi IKSP.11 Nilai Telaah Sejawat Intern Inspektorat Utama TW III 2025 107
Tabel 48 Matriks Penyesuaian Indikator “Nilai Telaah Sejawat Intern Inspektorat Utama” 108
Tabel 49 Matriks Penyesuaian Indikator “Nilai Telaah Sejawat Intern Inspektorat I / Inspektorat II” 109
Tabel 50 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi TW III 2025 110
Tabel 51 Realisasi Anggaran Inspektorat Utama Triwulan III Tahun Anggaran 2025 159
Tabel 52 Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Per Indikator Inspektorat Utama Triwulan III 2025 160
Tabel 53 Capaian Realisasi Anggaran Per Sasaran Program Inspektorat Utama Triwulan III 2025 162
Tabel 54 Capaian Realisasi Anggaran Per Sasaran Kegiatan Inspektorat I Triwulan III 2025 163

Tabel 55 Capaian Realisasi Anggaran Per Sasaran Kegiatan Inspektorat II Triwulan III 2025 164
Tabel 56 Pengukuran Efisiensi Pencapaian Sasaran Program Inspektorat Utama Triwulan III Tahun 2025 166

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Badan Pengawas Obat Dan Makanan 4
Gambar 2 Struktur Organisasi Inspektorat Utama BPOM 5
Gambar 3 Sumber Daya Manusia Inspektorat Utama Per Triwulan III Tahun 20258
Gambar 4 Capaian Nilai Kinerja Organisasi Inspektorat Utama Triwulan III Tahun 2025 57
Gambar 5 Entry Meeting Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2024 dan 2025 64
Gambar 6 Pencanangan Laboratorium Integritas dan Akuntabilitas 64
Gambar 7 Digitalisasi Rekomendasi Pengawasan Assurance Yang Ditindaklanjuti Melalui Aplikasi SAPA APIP 92
Gambar 8 Sharing Session Laboratorium Forensik Digital 173
Gambar 9 Dokumentasi Kunjungan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI 174
Gambar 10 Inspektorat Utama BPOM Lakukan Audiensi dengan BPKP 176
Gambar 11 Komisi Nasional HAM 177
Gambar 12 Pegawai Teladan Inspektorat Utama Tahun 2024 178
Gambar 13 Pegawai Teladan Inspektorat Utama Triwulan I Tahun 2025 179
Gambar 14 Peringkat III Kategori Satuan Kerja Pusat atas Kinerja Anggaran Tahun Anggaran 2024 180
Gambar 15 Sosialisasi RB, ZI, WBK/WBBM, Pengawasan Intern, Evaluasi 2024, Perencanaan 2025, Dan ISO Di Lingkungan Inspektorat Utama 181
Gambar 16 Entry Meeting Evaluasi Atas Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 182
Gambar 17 Rapat Kerja Perencanaan Inspektorat Utama Tahun 2025 183
Gambar 18 Rapat Evaluasi Internal Triwulan I TA 2025 184
Gambar 19 Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 185
Gambar 20 Penyerahan Laporan Hasil Pengawasan Triwulan I 2025 Kepada Kepala BPOM 186
Gambar 21 Tahap Awal Rencana Pembangunan Laboratorium Integritas 187
Gambar 22 Evaluasi Kinerja dan Anggaran Inspektorat Utama Triwulan II 2025189
Gambar 23 Focus Group Discussion Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 191
Gambar 24 Cafe Integritas Seri 6 193
Gambar 25 Sosialisasi Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 194
Gambar 26 Penyerahan Laporan Hasil Pengawasan Triwulan II 2025 kepada Kepala BPOM 195
Gambar 27 Pencanangan Laboratorium Integritas dan Akuntabilitas pada Balai Besar POM di Bandung 196
Gambar 28 Entry Meeting Pemeriksaan Kinerja atas Efektifitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2024 & 2025 197
Gambar 29 Evaluasi Kinerja dan Anggaran Inspektorat Utama Triwulan III Tahun Anggaran 2025 199

PENDAHULUAN



1.1 LATAR BELAKANG
1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI
1.3 STRUKTUR ORGANISASI
1.4 ISU STRATEGIS

BAB - I

BAB I - PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, maka perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

SAKIP merupakan suatu tatanan, instrumen dan mekanisme pertanggungjawaban yang meliputi tahap penetapan perencanaan strategis, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan. Penerapan SAKIP diharapkan dapat mewujudkan Instansi Pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap tuntutan masyarakat dan stakeholder.

Inspektorat Utama BPOM sebagai salah satu bagian dari Instansi Pemerintah sesuai dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Inspektorat Utama BPOM memiliki kewajiban untuk menerapkan SAKIP dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan serta penggunaan anggaran, setiap tahunnya dituangkan dalam sebuah Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Interim Inspektorat Utama triwulan III tahun 2025 merujuk kepada rancangan rencana strategis Inspektorat Utama tahun 2025-2029 serta Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama tahun 2025.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM) ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab kepada Presiden berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2005 serta perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang kemudian diturunkan dalam Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan serta mengalami perubahan dengan struktur organisasi baru yang dituangkan dalam Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Inspektorat meningkat statusnya menjadi Eselon I dengan pembentukan Inspektorat Utama. Berdasarkan Perpres tersebut serta Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, tugas Inspektorat Utama adalah menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan BPOM. Sedangkan fungsi Inspektorat Utama adalah sebagai berikut:

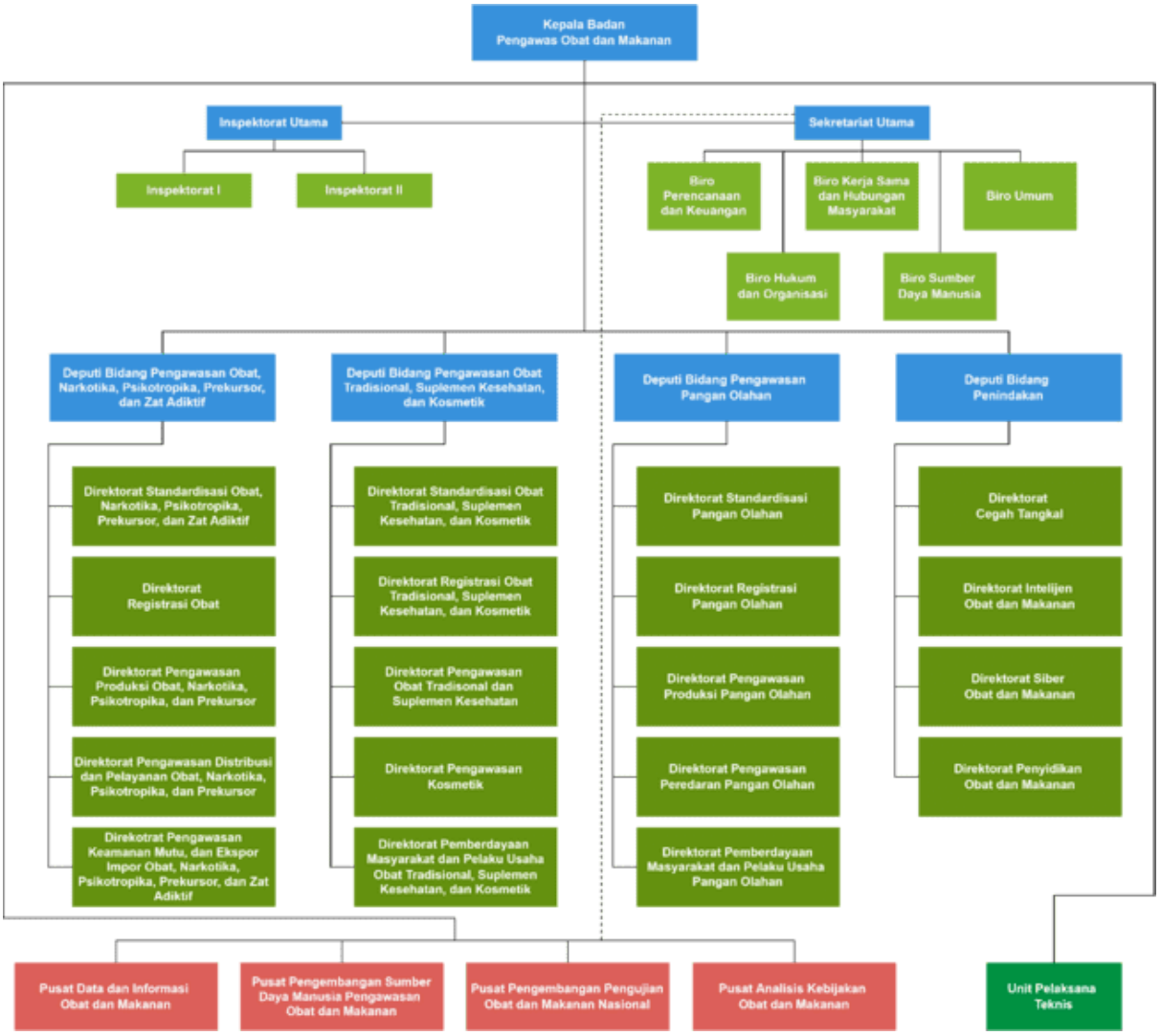
1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
2. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan kepala Badan;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama.

1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan,

INSPEKTORAT UTAMA

Inspektorat Utama secara struktural berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPOM, Inspektorat Utama dipimpin oleh Inspektur Utama. Struktur organisasi Inspektorat Utama terdiri dari Inspektorat I, Inspektorat II, Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun struktur kelembagaan organisasi Inspektorat Utama digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1 Struktur Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan

Struktur organisasi Inspektorat Utama BPOM sebagaimana bagan berikut:



Gambar 2 Struktur Organisasi Inspektorat Utama BPOM

1.4 Isu Strategis

1.4.1 Aspek Strategis Organisasi

Perkembangan pengawasan intern yang dikaitkan dengan peningkatan kompleksitas dan kerumitan operasi bisnis dan tata kelola serta semakin strategis dan kompleksnya tantangan yang dihadapi organisasi, maka fungsi pengawasan intern menjadi semakin penting dalam memberikan jasa *assurance* dan *consulting* kepada organisasi, dalam hal ini, BPOM.

Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) diharapkan menjalankan tugasnya secara profesional dan kompeten sebagai *Quality Assurance* (QA) dengan mengedepankan prinsip lebih dini, lebih tinggi, dan lebih peduli; serta menjalankan fungsi *trusted advisor*, sehingga mampu memberikan solusi dan nilai tambah dan saran strategis bagi BPOM dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja pengawasan obat dan makanan. Selain itu, Inspektorat Utama sebagai pengawas intern, berfungsi sebagai mata dan telinga dari pimpinan BPOM dan dituntut untuk memberikan *early warning* sebelum terjadi penyimpangan.

Sesuai dengan tuntutan yang ada pada saat ini, APIP diharapkan lebih berorientasi untuk memberikan masukan sebagai saran yang solutif kepada jajaran manajemen sebagai pelanggan (*customer satisfaction*). APIP tidak dapat lagi hanya berperan sebagai *watchdog*, namun harus dapat berperan sebagai mitra bagi manajemen. Mengingat pentingnya reposisi peran APIP sebagai QA dan *trusted advisor*, maka fokus pelaksanaan tugas APIP adalah pendampingan dalam seluruh fungsi manajemen organisasi, dimulai dari perumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai dengan monitoring dan evaluasi. Fungsi ini pada gilirannya akan menurunkan penyimpangan dan sekaligus meningkatkan akuntabilitas organisasi. Pola-pola pengawasan konvensional seperti audit operasional dan audit dengan tujuan tertentu tidak ditinggalkan, melainkan diperluas dengan kegiatan *assurance* seperti reviu, evaluasi, pemantauan serta kegiatan konsultasi.

1.4.2 Analisis Lingkungan Strategis

Inspektorat Utama dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan peran dan fungsinya, didukung dengan ketersediaan sumber daya, antara lain Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana, serta anggaran.

Internal

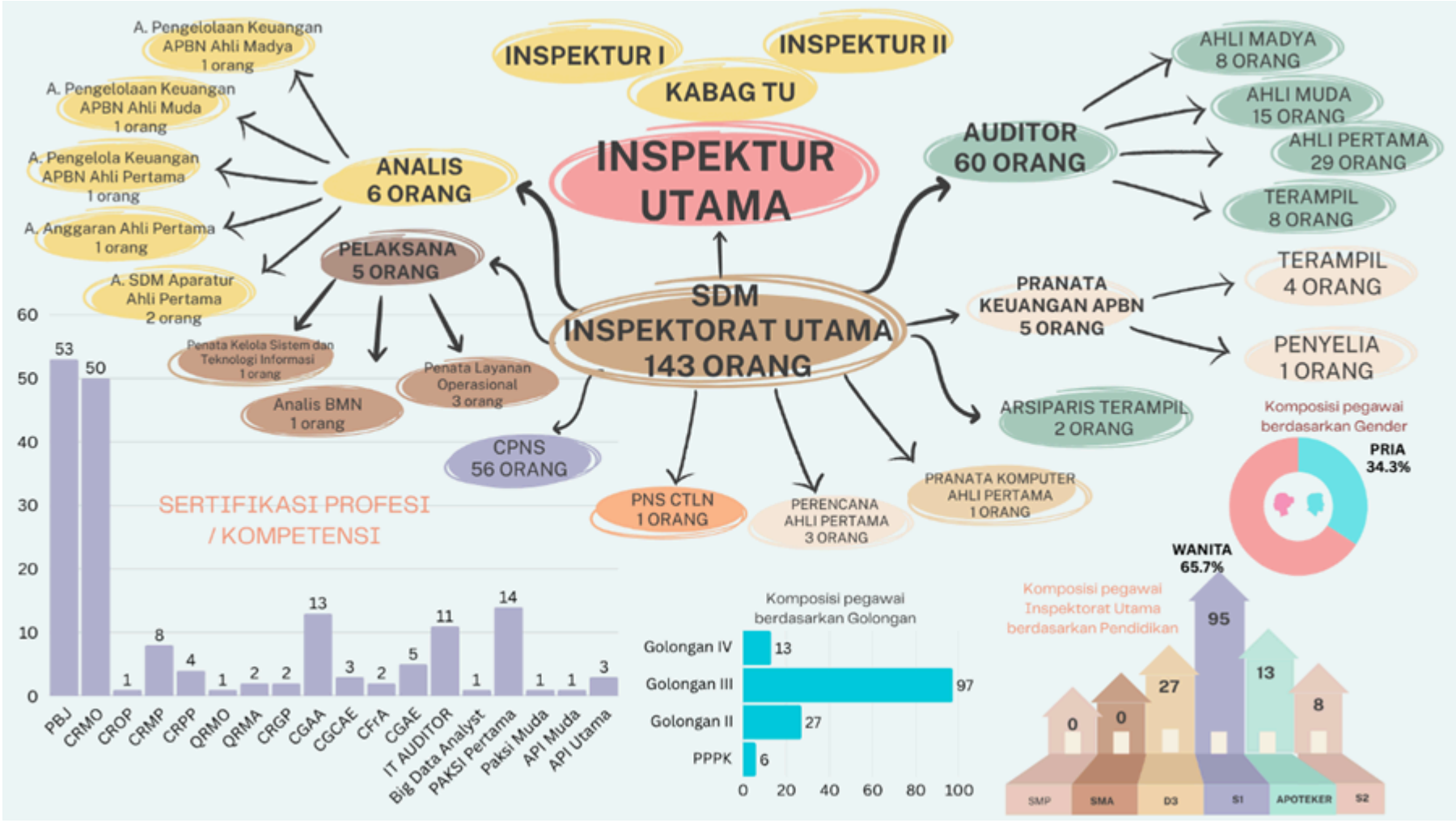
1) **Sumber Daya Manusia**

Untuk mendukung tugas-tugas Inspektorat Utama Badan POM sesuai dengan peran dan fungsinya, diperlukan SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. SDM Inspektorat Utama Badan POM per 30 September 2025 berjumlah 143 (Seratus Empat Puluh Tiga) pegawai dengan rincian, yaitu: 1 (satu) Inspektur Utama, 2 (dua) Inspektur, 1 (satu) Kepala Bagian Tata Usaha, 60 (enam puluh) Auditor, 4 (empat) Pranata Keuangan APBN Terampil, 1 (satu) Pranata Keuangan APBN Penyelia, 2 (dua) Arsiparis Terampil, 3 (tiga) Pranata Layanan Operasional, 1 (satu) Pranata Kelola Sistem dan Informasi, 3 (tiga) Perencana Ahli Pertama, 1 (satu) Pranata Komputer Ahli Pertama, 2 (dua) Analis SDM Aparatur Ahli Pertama, 1 (satu) Analis Anggaran Ahli Pertama, 1 (satu) Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Pertama, 1 (satu) Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda, 1 (satu) Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Madya, 1 (satu) Analis BMN, 56 (lima puluh enam) CPNS, dan 1 (satu) PNS CTLN.

Komposisi pegawai Inspektorat Utama berdasarkan jabatan, golongan, latar belakang pendidikan, jenis gender, maupun kelengkapan jenis sertifikasi

kompetensi SDM Inspektorat Utama baik yang mendapatkan sertifikasi profesi tingkat nasional maupun internasional khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan pengawasan internal, seperti CRMO, CRMP, CFrA, CSEP, CGAA, PBJ dan sertifikat lainnya, dapat dilihat sebagai berikut:

INSPEKTORAT UTAMA



Gambar 3 Sumber Daya Manusia Inspektorat Utama per Triwulan III tahun 2025

2) JUMLAH IDEAL PEGAWAI DIBANDINGKAN DENGAN BEBAN KERJA

Inspektorat Utama telah melakukan perhitungan ulang kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dengan mengacu pada Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-971/K/SU/2005 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

Perhitungan ulang kebutuhan JFA dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Analisis Beban Kerja (ABK) yang lama disusun pada tahun 2019 dan belum menghitung beban Loka POM sebagai mitra kerja pengawasan intern;
b. Adanya penambahan tugas yang bersifat mandatori dari stakeholder untuk mengawal dan menilai program pemerintah terkait tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern di lingkungan Badan POM, antara lain Reviu Penilaian Intern atas Pelaporan Keuangan, Pengawasan e-PNBP, Penilaian Maturitas SPIP, Penilaian Maturitas Manajemen Risiko, Penilaian Penerapan *Fraud Control Plan*, dan lain-lain.

BPKP telah melakukan verifikasi dan validasi atas usulan kebutuhan JFA pada Inspektorat Utama Badan POM dan memberikan rekomendasi jumlah auditor pada Inspektorat Utama Badan POM sebanyak 145 orang sebagaimana tertuang pada Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor S-1230/K/JF/2021 tanggal 15 Desember 2021 diperbarui pada Surat Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor HK.01.01/S-558/K/JF/2025 tanggal 23 Juli 2025 hal Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) pada Inspektorat Utama Badan POM, yang dirinci per jenjang jabatan sebagai berikut:

Tabel 1 Pemenuhan Kebutuhan JFA di Inspektorat Utama

No	Jenjang Jabatan/Peran	Formasi JFA	
		Semula	Menjadi
1	Auditor Ahli Utama/Pengendali Mutu	2	2
2	Auditor Ahli Madya/Pengendali Teknis	6	11
3	Auditor Ahli Muda/Ketua Tim	18	33
4	Anggota Tim		
	a. Auditor Ahli Pertama	54	70
	b. Auditor Penyelia	-	5

No	Jenjang Jabatan/Peran	Formasi JFA	
		Semula	Menjadi
	c. Auditor Pelaksana Lanjutan	-	8
	d. Auditor Pelaksana	-	16
JUMLAH		**80**	**145**

Dengan demikian kondisi pemenuhan JFA di Inspektorat Utama per 30 September 2025 adalah sebesar **41,37%** tanpa mempertimbangkan CPNS yang diproyeksikan menjadi auditor dan **75,86%** dengan mempertimbangkan CPNS yang diproyeksikan menjadi auditor, sebagaimana dapat dilihat rinciannya pada tabel berikut:

Tabel 2 Pemenuhan Kebutuhan Auditor

Jabatan	ABK (orang)	Existing (orang)	*Gap* (orang)	% pemenuhan Exis/abk*100
Auditor Ahli Utama	2	0	2	0
Auditor Ahli Madya	11	8	3	72,72
Auditor Ahli Muda	33	15	18	42,42
Auditor Ahli Pertama	70	29	41	41,42
Auditor Penyelia	5	0	11	0
Auditor Mahir	8	0	11	0
Auditor Terampil	16	8	8	50,00
CPNS yang diproyeksikan menjadi Auditor	-	50	-	-
Auditor yang diberhentikan karena tubel	-	-	-	-
Total	**145**	**110**	**85**	**75,86**

Adapun pemenuhan ABK Pegawai Inspektorat Utama untuk seluruh jabatan per 30 September 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Inspektorat Utama per 30 September 2025

Unit Kerja/Bagian	ABK (orang)	*Existing* Juni 2025 (orang)	*Gap* (orang)	Keterangan
Inspektorat I	74	60	14	• *Bezzeting* termasuk PNS dan CPNS calon pemangku Jabatan Fungsional (JF) • ABK dan Bezzeting pada Bagian TU termasuk Inspektur Utama
Inspektorat II	75	62	13	
Bagian Tata Usaha	34	21	13	
Jumlah	**183**	**143**	**40**	

Berdasarkan tabel di atas, *bezzeting* pegawai Inspektorat Utama sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) orang dari kebutuhan berdasarkan ABK sebanyak 183 (seratus delapan puluh tiga) orang, sehingga **persentase pemenuhan pegawai di Inspektorat Utama per 30 September 2025 adalah sebesar 78,14%**.

3) SARANA DAN PRASARANA

Per 30 September 2025 Inspektorat Utama masih menempati Gedung Garuda Lantai 1 untuk ruang kerja Inspektur Utama, Ruang Rapat Inspektur Utama dan Tata Usaha. Sementara Ruang Kerja Inspektur I, Inspektur II dan Auditor, menempati Gedung Mozaik lantai 2.

Tabel 4 Perkembangan Sarana Kerja Inspektorat Utama Tahun 2021 s.d.Triwulan III tahun 2025

NO	NAMA BARANG	2021	2022	2023	2024	2025
Aset Tetap						
1.	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
2.	Sepeda Motor	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit
3.	Lemari Penyimpan	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	--
4.	Mesin Penghitung Uang	1 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
5.	Lemari Besi/Metal	27 unit	27 unit	19 unit	24 unit	24 unit

NO	NAMA BARANG	2021	2022	2023	2024	2025
			Aset Tetap			
6.	Lemari Kayu	44 unit	44 unit	44 unit	62 unit	20 unit
7.	Brankas	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
8.	Buffet	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
9.	Laci Box	--	--	--	--	41 unit
10.	White Board	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	--
11.	Alat Penghancur Kertas	7 unit	8 unit	9 unit	9 unit	8 unit
12.	Laser Pointer	--	--	1 unit	1 unit	1 unit
13.	LCD Projector/Infocus	11 unit	11 unit	11 unit	11 unit	11 unit
14.	Meja kerja Besi/Metal	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
15.	Meja Kerja Kayu	30 unit	67 unit	63 unit	68 unit	70 unit
16.	Kursi Besi/Metal	84 unit	84 unit	84 unit	133 unit	141 unit
17.	Sice	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit
18.	Meja Rapat	2 unit	3 unit	1 unit	1 unit	1 unit
19.	Tempat Tidur Kayu	--	--	--	--	1 unit
20.	Kasur/ Spring Bed	--	--	--	1 unit	1 unit
21.	Meja Makan Kayu	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
22.	Partisi	--	--	--	--	19 unit
23.	Workstation	6 unit	5 unit	5 unit	10 unit	10 unit
24.	Air Cleaner	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
25.	Lemari Es	3 unit	3 unit	3 unit	2 unit	2 unit
26.	Kompor Listrik	--	--	1 unit	1 unit	1 unit
27.	Rice Cooker (Alat Dapur)	--	--	--	1 unit	1 unit
28.	Oven Listrik	2 unit	2 unit	3 unit	3 unit	3 unit
29.	Blender	--	--	1 unit	1 unit	1 unit
30.	Televisi	3 unit	3 unit	3 unit	4 unit	4 unit

NO	NAMA BARANG	2021	2022	2023	2024	2025
	Aset Tetap					
31.	Dispenser	8 unit	8 unit	16 unit	17 unit	16 unit
32.	Coffee Maker	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
33.	Karpet	--	--	--	3 unit	3 unit
34.	Lampu Belajar	--	--	--	1 unit	1 unit
35.	Audio Mixing Console	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
36.	Microphone/ Wireless MIC	--	--	2 unit	2 unit	2 unit
37.	Voice Recorder	3 unit	3 unit	10 unit	10 unit	10 unit
38.	Video Mixer	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
39.	Tripod Camera	--	--	--	1 unit	1 unit
40.	Camera Digital	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
41.	Camera Conference	1 unit	3 unit	5 unit	5 unit	5 unit
42.	Telephone (PABX)	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
43.	Facsimile	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	--
44.	Lightweight Concrete Test Hammer	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
45.	Screen Pembatas	--	--	19 unit	19 unit	--
46.	P.C Unit	38 unit	45 unit	42 unit	35 unit	35 unit
47.	Notebook	94 unit	105 unit	109 unit	101 unit	121 unit
48.	Tablet PC	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
49.	Speaker Komputer	--	--	1 unit	1 unit	1 unit
50.	Monitor	--	--	1 unit	1 unit	1 unit
51.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	44 unit	48 unit	48 unit	37 unit	35 unit
52.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1 unit	2 unit	2 unit	1 unit	1 unit
53.	Server	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	--

4) ANGGARAN

Inspektorat Utama pada triwulan III tahun 2025 memiliki pagu awal sebesar **Rp19.427.456.000**,Kemudian Inspektorat Utama melakukan revisi pemenuhan kebutuhan anggaran untuk PPNPN sebesar **Rp220.520.000** dan revisi pemenuhan kebutuhan belanja pegawai existing dan CASN TA 2025 sebesar **Rp1.411.020.000**, sehingga total pagu Inspektorat Utama tahun 2025 menjadi **Rp21.058.996.000.** Selanjutnya, terdapat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dilakukan efisiensi sebesar **Rp9.929.508.000**. Sehingga total pagu Inspektorat Utama tahun 2025 yang dapat digunakan adalah sebesar **Rp11.129.488.000**.

Penyerapan anggaran Inspektorat Utama sampai dengan triwulan III tahun 2025 untuk pelaksanaan program Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah sebesar **Rp 8.954.990.257 atau 42,52%** (Realisasi berdasarkan SPM yang telah diterbitkan dari aplikasi SAKTI) dan **Rp 8.315.424.796 atau 39,49%** (Realisasi berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan) dari jumlah keseluruhan pagu **21.058.996.000** dengan Blokir Anggaran sebesar **Rp9.929.508.000**. Sedangkan penyerapan anggaran Inspektorat Utama sampai dengan triwulan III tahun 2025 untuk pelaksanaan program Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan jika dibandingkan dengan pagu non blokir adalah sebesar **Rp 8.954.990.257 atau 80,46%** (Realisasi berdasarkan SPM yang telah diterbitkan dari aplikasi SAKTI) dan **Rp 8.315.424.796 atau 74,71%** (Realisasi berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan) dari jumlah keseluruhan pagu non blokir Rp **11.129.488.000.** secara lebih detail dilakukan Analisis Akuntabilitas Penggunaan Anggaran bagian Realisasi Anggaran pada Bab 3.

Tabel 5 Realisasi Anggaran Inspektorat Utama Triwulan III Tahun Anggaran 2025 (per Kegiatan)

No.	Program/Kegiatan/Output	Anggaran tanpa Blokir			Anggaran dengan Blokir		
		Pagu	Realisasi OMSPAN	Capaian	Pagu	Realisasi OMSPAN	Capaian
4115	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	Rp10,068,265,000	Rp7,450,745,949	74.00%	Rp 15,605,847,000	Rp 7,450,745,949	47.74%
4116	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	Rp1,061,223,000	Rp864,678,837	81.48%	Rp 5,453,149,000	Rp 864,678,837	15.86%
TOTAL		**Rp 11,129,488,000**	**Rp 8,315,424,786**	**74.72%**	**Rp 21,058,996,000**	**Rp 8,315,424,786**	**39.49%**

*Berdasarkan data OMSPAN per 30 September 2025

No.	Program/Kegiatan/Output	Anggaran tanpa Blokir			Anggaran dengan Blokir		
		Pagu	Realisasi SAKTI	Capaian	Pagu	Realisasi SAKTI	Capaian
4115	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	Rp10,068,265,000	Rp8,084,786,752	80.30%	Rp15,605,847,000	Rp8,084,786,752	51.81%
4116	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	Rp1,061,223,000	Rp870,203,505	82.00%	Rp5,453,149,000	Rp870,203,505	15.96%
TOTAL		**Rp 11,129,488,000**	**Rp 8,954,990,257**	**80.46%**	**Rp21,058,996,000**	**Rp8,954,990,257**	**42.52%**

*Berdasarkan data SAKTI per 30 September 2025

Eksternal

Lingkup sektor pengawasan Inspektorat Utama meliputi seluruh aktivitas *assurance* dan *consulting* di lingkungan BPOM yang meliputi, Satuan Kerja:

1) Sekretariat Utama;
2) Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekusor, dan Zat Adiktif;
3) Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik;
4) Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan;
5) Deputi Bidang Penindakan;
6) Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan;
7) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan;
8) Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan; dan
9) 53 Balai Besar/Balai POM dan 23 Loka POM di seluruh Indonesia.

1.4.3 Isu Strategis Inspektorat Utama

Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) harus memiliki pemahaman yang memadai atas proses bisnis organisasi sehingga dapat memetakan risiko dengan tepat dan memahami implikasi hukum atas kebijakan publik yang dihasilkan oleh BPOM. APIP dapat memberikan masukan kepada pembuat kebijakan mengenai upaya preventif yang perlu dipertimbangkan agar pembuat kebijakan tidak terkait dalam kasus pelanggaran hukum.

Inspektorat Utama sebagai APIP juga memiliki peran dalam mengawal terlaksananya kebijakan pemerintah di lingkungan BPOM yang bersifat strategis, antara lain:

1.4.3.1 Pengawalan terhadap program prioritas Badan BPOM

Dalam rangka mencapai tujuan dan visi organisasi yang telah ditetapkan, pengelolaan program-program prioritas memerlukan perhatian dan pengawasan yang cermat untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan rencana, efisien, dan bebas dari penyimpangan. Oleh karena itu, Inspektorat memiliki peran yang sangat penting dalam mengawal pelaksanaan program-program prioritas organisasi.

Inspektorat bertugas untuk memastikan bahwa semua program yang telah diprioritaskan oleh organisasi dijalankan dengan tepat, sesuai dengan kebijakan

dan prosedur yang telah ditetapkan. Tugas ini tidak hanya terbatas pada pengawasan terhadap penggunaan anggaran, tetapi juga mencakup pemantauan terhadap kualitas pelaksanaan dan pencapaian hasil yang diinginkan. Pada tahun 2025, Inspektorat Utama melakukan pengawalan terhadap program strategis sediaan farmasi Tuberculosis (TBC) dan Makanan Bergizi Gratis (MBG).

1.4.3.2 Penguatan Budaya Integritas Organisasi

Integritas merupakan nilai dasar yang penting untuk dibudidayakan oleh BPOM dan seluruh pegawainya. Pentingnya penguatan budaya integritas adalah untuk membangun kepercayaan publik, meningkatkan kinerja, mengurangi risiko, meningkatkan inovasi dan menciptakan reputasi organisasi yang baik. BPOM terus berkomitmen untuk melestarikan budaya integritas di lingkungan organisasi dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih serta dapat memberikan pelayanan yang optimal. BPOM di tahun 2024 memperoleh indeks integritas sebesar 83,98 dan berada di atas rata-rata indeks nasional sebesar 71,53 yang dinilai oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). pembangunan budaya integritas di BPOM adalah melalui:

- Pelaporan LHKPN/LHKASN tepat waktu
- Pembangunan zona integritas di lingkup BPOM
- *Anti Corruption Massive Campaign*
- Pembentukan kader anti korupsi seperti Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) dan Ahli Pembangun Integritas (API)
- Pelaporan pengaduan masyarakat/*whistleblowing system* yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat
- penguatan kebijakan anti korupsi di BPOM
- Penguatan Fungsi Satuan Pengawas Intern (SPI) pada UPT

1.4.3.3 Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dimulai dengan pencanangan pembangunan zona integritas melalui penandatanganan pakta integritas. Inspektorat Utama sebagai Unit Penggerak Integritas (UPI) bertugas untuk memberikan dorongan dan dukungan administratif dan teknis kepada unit kerja dalam melaksanakan kegiatan pencegahan korupsi.

Untuk memenuhi semua tantangan dan peran tersebut atas, Inspektorat Utama sebagai APIP BPOM dituntut untuk selalu siap mengantisipasi segala perubahan

dan perkembangan yang akan dihadapi. Oleh karena itu, Inspektorat Utama harus secara berkesinambungan meningkatkan profesionalisme sebagai organisasi pembelajar agar menjadi APIP yang akuntabel yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, bersih dari segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan dapat mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan atas pencapaian visi misi yang telah ditetapkan oleh organisasi secara transparan.

Selain berperan sebagai Tim Penilai Internal (TPI) dalam proses penilaian pembangunan ZI seluruh Unit Kerja, Inspektorat Utama juga melakukan pendampingan dan intervensi terhadap Unit Kerja yang belum mendapatkan predikat WBK/WBBM, meningkatkan sinergitas dan perkuatan implementasi RB dan pembangunan ZI di lingkungan BPOM, dan memperkuat koordinasi dan proaktif melakukan konsultasi kepada Tim Kementerian PANRB.

1.4.3.4 Pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Audit Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-Government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi,

dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

SPBE memegang peranan penting dalam transformasi Reformasi Birokrasi era baru atau yang lebih dikenal dengan RB Tematik. Digitalisasi pemerintahan menjadi elemen untuk mewujudkan birokrasi yang berdampak. Selain itu, SPBE juga menjadi penekanan dalam upaya pencegahan korupsi. Inspektorat Utama memiliki peran untuk melakukan Audit SPBE sebagai pemenuhan parameter 29, 30, dan 31. Akan tetapi pada ruang lingkup yang lebih luas, Inspektorat Utama memegang peranan dalam pengendalian intern utamanya yang mendukung peningkatan implementasi SPBE di tingkat instansi.

1.4.3.5 Pelaksanaan Audit Kinerja Program Pengawasan Obat dan Keuangan

Dalam rangka meningkatkan kiprah BPOM dalam berkontribusi mewujudkan tujuan nasional, perlu dilakukan pembenahan terutama dalam hal perbaikan kinerja. Audit kinerja merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kinerja BPOM terutama dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik yang menjadi tuntutan masyarakat. Audit Kinerja adalah audit atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas audit aspek ekonomi dan efisiensi serta audit aspek efektivitas. Audit kinerja ini akan dilaksanakan secara menyeluruh, mulai dari penetapan kebijakan di pusat, implementasi di UPT, sampai dengan monitoring dan evaluasi serta tindakan perbaikannya. Secara umum, tahapan audit mencakup audit pendahuluan, audit rinci, dan pelaporan.

1.4.3.6 Penguatan pengelolaan keuangan BPOM

Salah satu wujud pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang akuntabel adalah melalui pelaksanaan akuntansi pemerintahan yang baik dengan profil berupa seperangkat laporan keuangan yang menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik ekonomi, sosial, maupun politik. Penyajian Laporan Keuangan entitas pemerintah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pengguna laporan keuangan entitas pemerintah adalah masyarakat, termasuk legislatif, BPK selaku pemeriksa, lembaga pengawas, maupun pemerintah pusat.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dituntut untuk melakukan pengawalan penyusunan Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) melalui kegiatan reviu. Reviu ditujukan untuk memberikan

keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi serta kesesuaian pengukuran, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Ruang lingkup reviu adalah penelaahan atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) serta proses pelaporan keuangan. Kewajiban Reviu dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Kegiatan reviu dilakukan dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI atas BPOM bahwa APIP harus memperkuat peran memberikan layanan secara efektif, dalam wujud memberikan:

- Keyakinan memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi (*assurance activities*).
- Peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi (*anti corruption activities*).

Masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi (*consulting activities*).

1.4.3.7 Penguatan Manajemen Risiko dan Kapabilitas APIP

Tuntutan untuk mewujudkan *good governance* pada lingkungan birokrasi semakin memperkuat urgensi penerapan manajemen risiko pada instansi pemerintah. Menurut *United National Development Planning* (UNDP), *good governance* merupakan praktik penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan penyelenggaraan negara secara politik, ekonomi dan administratif di semua tingkatan. Manajemen Risiko dan *good governance* memiliki kaitan yang kuat, bahwa Manajemen Risiko mengidentifikasi dan mengelola risiko-risiko yang akan mempengaruhi pencapaian nilai yang diinginkan oleh organisasi.

BPOM konsisten memiliki komitmen untuk mencapai salah satu tujuan dari penerapan manajemen risiko yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dengan mengoptimalkan Konsep *Three Lines Model* dalam proses manajemen risiko serta belajar terus-menerus untuk peningkatan efektivitas Manajemen Risiko. Dalam proses penerapan manajemen risiko, seluruh satuan kerja dan unit kerja di BPOM melakukan identifikasi risiko, analisis risiko,

evaluasi risiko, penanganan risiko, serta pemantauan dan reviu risiko minimal setiap semester. Selanjutnya dokumen manajemen risiko yang telah disusun oleh unit kerja akan direviu oleh Auditor Internal Sistem Manajemen Terintegrasi selaku lini kedua pada saat pelaksanaan audit internal Sistem Manajemen Terintegrasi.

Selanjutnya, kapabilitas dan efektivitas merupakan dua indikator penting untuk melihat sejauh mana APIP sebagai institusi telah mampu mendefinisikan peran pengawasan intern dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Peran utama sebagai mitra strategis organisasi dan hasil pengawasan yang telah kami lakukan (GRCC – *Governance, Risk, Control, and Compliance*) secara berkelanjutan mendukung tercapainya sasaran prioritas nasional dan tujuan organisasi melalui *early warning system* secara akuntabel, efektif, efisien, dan *reliable*. Oleh karena itu, orkestrasi yang seirama sejak mulai perencanaan program, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasannya harus terkelola dengan sangat baik dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Fungsi yang semula *quality assurance*, secara bertahap, konsisten, dan berkesinambungan, bergeser dan mewujud menjadi *trusted advisor* (bekerja dengan *data analytics*) dan *value driver* (bekerja dengan *data modelling*) yang bukan hanya sekedar *protecting value*, tetapi juga *enhancing value*. APIP BPOM juga terus mengasah kemampuan *insight, hindsight* dan juga *foresight*, namun tetap memegang teguh prinsip obyektif dan independen.

1.4.3.8 Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

Kementerian Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Peratutan ini menyatakan bahwa PIPK wajib diterapkan oleh setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan penyusun Laporan Keuangan. Penerapan PIPK merupakan pengendalian yang secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan yang andal dan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Dalam rangka memberikan keyakinan terbatas kepada pimpinan Kementerian Negara/Lembaga mengenai efektivitas penerapan PIPK secara memadai, dilakukan Reviu penerapan PIPK oleh APIP. Reviu dilaksanakan terhadap penerapan PIPK yang berasal dari laporan hasil Penilaian PIPK yang disampaikan oleh Tim Penilai.

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA



2.1 RENCANA STRATEGIS
2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN 2025
2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2025
2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) TAHUN 2025
2.5 METODE PENGUKURAN

BAB 02

2.1 Rencana Strategis

2.1.1 Visi

Inspektorat Utama Badan POM sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit/satuan kerja sebagai mitra kerja yang bersifat konsultatif (*consulting*) dan sebagai *quality assurance.* Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat Utama mempunyai komitmen bersama mulai dari unsur pimpinan sampai unsur pelaksana untuk mendukung terwujudnya visi Badan POM yaitu " ***Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045".*** Dukungan tersebut diimplementasikan melalui pelaksanaan pengawasan fungsional yang mampu mendorong peningkatan kinerja Badan POM yang transparan dan akuntabel, sehingga ditetapkanlah visi Inspektorat Utama sebagai berikut:

"Inspektorat Utama yang profesional dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja BPOM guna mendukung terwujudnya sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045"

Dengan telah ditetapkannya visi tersebut, Inspektorat Utama Badan POM mempunyai kewajiban untuk selalu melakukan perbaikan secara berkesinambungan dalam rangka menunjang visi dan misi Badan POM, serta berusaha mengimplementasikannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga menjadi suatu institusi yang profesional dengan integritas tinggi. Sehubungan dengan upaya pencapaian visi tersebut, Inspektorat Utama Badan POM senantiasa berusaha menanamkan paradigma baru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Inspektorat Utama Badan POM selaku yang diawasinya, kemudian bersama-sama mencari solusi atas permasalahan, keluhan dan hambatan yang terjadi dalam pencapaian kinerja. Selain itu, Inspektorat Utama Badan POM juga berusaha menjadi *agent of change* dan *value driver* dalam organisasi Badan POM, menjembatani setiap perubahan dalam organisasi dalam rangka menciptakan instansi yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik.

2.1.2 Misi

Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, maka ditetapkanlah misi Inspektorat Utama yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih terlihat abstrak pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut. Misi Inspektorat Utama Badan POM adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi Badan POM.
Misi Inspektorat Utama Badan POM, yaitu:

MISI 1:

”Meningkatkan kapabilitas dan integritas Inspektorat Utama yang berkelanjutan.”

Misi ini merupakan pernyataan sikap Inspektorat Utama untuk menjadikan organisasi ini sebagai organisasi yang menjunjung tinggi budaya kerja yang "Kompeten". Kapabilitas dan Integritas merupakan fondasi yang perlu untuk selalu ditingkatkan para pegawai aparatur sipil negara (ASN) dalam rangka menjaga profesionalitas dan meningkatkan kinerja organisasi Inspektorat Utama dalam menjalankan fungsi pengawasan intern. Lebih lanjut, melalui misi ini pula, Inspektorat Utama akan selalu berupaya meningkatkan kapabilitas dan integritas melalui kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan secara efektif dan efisien untuk memberikan efek keberlanjutan (*sustainability*).

MISI 2:

’’ Meningkatkan kualitas tata kelola, manajemen risiko, pengendalian, dan kepatuhan untuk mewujudkan efektivitas, efisiensi, dan keekonomisan pengelolaan keuangan dan kinerja BPOM.”

Misi ini mencerminkan komitmen Inspektorat Utama sebagai unsur pengawasan internal yang berperan penting dalam memastikan pelaksanaan kegiatan di BPOM efektif dan efisien serta sesuai dengan peraturan atau kebijakan yang berlaku.
Melalui perbaikan dan penguatan kualitas tata kelola, Inspektorat Utama mendorong budaya organisasi yang transparan dan bertanggung jawab. Tata kelola yang baik menjadi fondasi bagi terciptanya proses kerja yang terstruktur, terukur, dan berorientasi pada hasil. Sementara itu, penguatan manajemen risiko bertujuan untuk mengidentifikasi potensi risiko sejak dini, serta menetapkan langkah-langkah mitigasi agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan optimal tanpa terhambat oleh kendala yang tidak terduga.

Dalam aspek pengendalian, Inspektorat Utama memastikan bahwa seluruh proses, program, dan kegiatan di lingkungan BPOM berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengendalian internal yang efektif akan mencegah terjadinya penyimpangan, kesalahan, atau kecurangan dalam pengelolaan sumber daya negara. Di samping itu, kepatuhan terhadap regulasi dan standar operasional menjadi syarat utama agar kinerja organisasi dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, moral, dan profesional.

Dengan melaksanakan misi ini secara konsisten, Inspektorat Utama berperan sebagai *mitra strategis* dalam mendorong peningkatan kinerja BPOM secara keseluruhan. Upaya ini pada akhirnya mendukung tercapainya pengelolaan keuangan organisasi dan pelayanan publik yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

MISI 3:

”Memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor pembangunan nasional”

Misi ini menunjukkan bahwa pengawasan internal tidak dapat berjalan secara terisolasi, melainkan membutuhkan kerja sama erat dengan berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta antar instansi pemerintah dan sektor non-pemerintah.

Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menghadapi kompleksitas tantangan pembangunan, termasuk dalam bidang pengawasan obat dan makanan yang bersifat multidimensi dan melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu, Inspektorat Utama mendorong pendekatan yang integratif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, agar pengawasan dapat dilakukan secara menyeluruh dan saling melengkapi. Sinergi ini diwujudkan melalui pertukaran informasi, harmonisasi kebijakan, serta kerja sama dalam audit, reviu, dan pemantauan kinerja. Dengan memperkuat jejaring lintas sektor, Inspektorat Utama turut memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh BPOM sejalan dengan arah pembangunan nasional, serta mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui misi ini, Inspektorat Utama tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga berperan sebagai fasilitator dan katalisator dalam membangun tata kelola pemerintahan yang kolaboratif, adaptif, dan berorientasi pada hasil yang berkelanjutan dengan tetap mengedepankan integritas.

2.1.3 Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Utama Badan POM, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi yang ingin dicapai pada periode Renstra dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan yang ditetapkan Inspektorat Badan POM adalah sebagai berikut:

"Tercapainya visi dan misi BPOM melalui pengawasan intern yang memberikan keyakinan memadai bagi terwujudnya efektivitas, efisiensi, keekonomisan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan".

Tujuan Inspektorat Utama tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas obat dan makanan di Indonesia, sesuai dengan perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah. Tujuan tersebut diukur melalui indikator sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 6 Indikator Tujuan Inspektorat Utama 2025-2029

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Tercapainya visi dan misi BPOM melalui pengawasan intern yang memberikan keyakinan memadai bagi terwujudnya efektivitas, efisiensi, keekonomisan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Indeks RB BPOM di lingkup Inspektorat Utama	18,37	18,55	18,73	18,95	19,17

Indikator tujuan merupakan indikator yang sama dengan indikator kinerja sasaran program yang bersifat *ultimate outcome.* Hal ini dikarenakan untuk "Indeks RB BPOM di lingkup Inspektorat Utama" telah mencakup hasil pengawalan Inspektorat Utama yang berdampak pada BPOM meliputi indikator: Persentase Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas unit kerja BPOM, Nilai evaluasi SPIP BPOM, Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM, Nilai survei Penilaian Integritas BPOM, dan Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti.

2.1.4 Sasaran

Dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi, serta mewujudkan kondisi yang secara nyata yang akan dicapai oleh Inspektorat Utama, sesuai dengan tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh dinamika lingkungan strategis nasional dan global, Inspektorat Utama telah merumuskan sejumlah sasaran program yang merupakan cascade dari Sasaran Strategis BPOM nomor delapan yakni **"Terwujudnya Birokrasi yang efektif, berintegritas, kolaboratif dan adaptif untuk pelayanan publik yang prima".** Sasaran ini dirancang untuk memperkuat fondasi dan fungsi pengawasan intern di BPOM, meningkatkan kualitas layanan kepada mitra pengawasan atau *stakeholder,* serta meningkatkan profesionalisme. Berikut adalah sasaran Program Inspektorat Utama 2025 – 2029 dengan penjelasannya, yang mencakup berbagai aspek kunci dari pengawasan intern.

1. **Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama**

   Sasaran ini ditujukan untuk membangun BPOM sebagai lembaga yang kuat, fleksibel, dan berintegritas tinggi dengan koordinasi aktif yang diberikan Inspektorat Utama. Strategi memperkuat pengawasan intern ditargetkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis dan operasional.

2. **Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien**

   Teknologi, selera konsumen, dan lingkungan sosial politik yang berubah sangat cepat merupakan risiko yang harus dimaknai oleh auditor internal untuk mentransformasi organisasi kerja, cara atau metode kerja, dan kompetensi sehingga dapat memenuhi ekspektasi stakeholders.

Konsep manfaat pengawasan pada organisasi tersebut menjadi paradigma baru pengawasan internal. Auditor internal masa kini diharapkan dapat menjadi partner/mitra strategis dan advisor yang bisa dipercaya bagi manajemen dan seluruh unit kerja di organisasi. Setelah shifting dari konsep *watchdog* menjadi fungsi *assurance* and *consulting* dan *trusted advisor*, auditor internal diharapkan dapat selangkah lebih maju lagi, berperan sebagai *value driver.*

Sesuai dengan peran APIP dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP), peraturan perundang-undangan dan sistem pengendalian intern yang telah ditetapkan oleh organisasi, Inspektorat Utama melakukan pengawasan intern ke seluruh mitra kerja sesuai PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Intern Pemerintah, meliputi kegiatan sebagai berikut: (1) Audit; (2) Reviu; (3).Evaluasi; (4) Pemantauan; (5) Pengawasan Lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

3. Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional

Sumber daya yang meliputi 5 M *(man, material, money, method, and machine)* merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan Inspektorat Utama BPOM untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi dan menciptakan organisasi yang profesional.

Untuk melaksanakan tugas, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Utama BPOM.

2.1.5 Strategi

Untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan, Inspektorat Utama merumuskan berbagai strategi dengan menetapkan langkah-langkah yang menjadi fokus perhatian, yaitu:

1. Penguatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Budaya Anti-Korupsi;
2. Penguatan aktivitas pengawasan melalui pengawalan desain kebijakan yang mampu menghasilkan informasi berupa *insight, hindsight, foresight, early warning, dan bottlenecking*
3. Pengembangan teknologi yang berkualitas dalam pengawasan intern;
4. Peningkatan keterlibatan dan memperkuat fungsi lini kedua sebagai *oversight* manajemen dalam implementasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern; dan
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor dalam peningkatan pengawasan intern.

2.1.6 Program

Sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi yang telah diuraikan tersebut, seluruh kegiatan Inspektorat Utama dirangkum dalam Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan. Rumusan strategi dan program tersebut diterjemahkan ke dalam bentuk yang lebih operasional, antara lain:

1. Dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi unit
2. Perencanaan, koordinasi, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan intern
3. Pengawalan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BPOM
4. Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat
5. Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat
6. Pengawalan dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif

2.2 Rencana Kinerja Tahunan 2025

Inspektorat Utama telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025 terutama menyangkut kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program pada tahun 2025. Selain itu,

Inspektorat Utama juga telah menetapkan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran.

Rencana Kinerja Tahunan terdiri dari format yang menghubungkan sasaran dan indikator kinerja yang akan digunakan dalam pengukuran capaian sasaran, serta target yang akan dicapai. Rencana Kinerja Tahunan tersebut selain sebagai bentuk penjabaran langkah-langkah pencapaian sasaran, juga digunakan sebagai acuan untuk penyusunan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program/kegiatan. Rencana kinerja Inspektorat Utama tertuang pada Keputusan Inspektur Utama Nomor HK.02.02.7.09.24.23 Tahun 2024 tentang Rencana Kinerja Inspektorat Utama BPOM Tahun 2025.

Tabel 7 Rencana Kinerja Inspektorat Utama 2025

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	16,43
		Nilai Pembangunan Zona Integritas di lingkup Inspektorat Utama	88,04
		Nlai AKIP Inspektorat Utama	83,11
		Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	91,25
		Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	3,4
2.	Meningkatnya kualitas layanan pengawasan yang efektif dan efisien	Persentase Laporan layanan jasa *assurance* pada mitra kerja Inspektorat Utama yang dilaksanakan sesuai standar mutu	100%
		Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	96,50%
		Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja Inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%
		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%
3	Terwujudnya Organisasi Inspektorat Utama yang profesional	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	3,7
		Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	87,81

Inspektorat Utama memiliki pagu awal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp19.427.456.000,-. Berdasarkan Surat Edaran Sekretariat Utama Nomor B-PR.05.03.2.01.25.07 perihal Penyampaian Mekanisme Pemanfaatan Optimalisasi Sisa Anggaran TA 2025, dilakukan pemblokiran anggaran akun Perjalanan Dinas sebesar 50%, dengan nilai sebesar Rp4.350.244.000,-. Selanjutnya, sehubungan dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja, serta menindaklanjuti Surat Edaran Sekretariat Utama Nomor B-PR.05.03.2.02.25.82 perihal Penyampaian Data Besaran Anggaran Melalui Pemblokiran Mandiri dalam Rangka Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025, Inspektorat Utama melakukan pemblokiran mandiri sebesar Rp5.579.264.000,-. Selain itu, Inspektorat Utama melakukan revisi anggaran untuk pemenuhan kebutuhan PPNPN sebesar Rp220.520.000,-, sesuai dengan Surat Edaran Sekretariat Utama Nomor B-PR.05.03.2.03.25.145 perihal Revisi Optimalisasi Anggaran Belanja Modal TA 2025. Selanjutnya, berdasarkan Surat Edaran Sekretariat Utama Nomor KU.02.03.2.06.25.363, Inspektorat Utama juga melakukan revisi anggaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan Belanja Pegawai Existing dan Anggaran CASN TA 2025 sebesar Rp1.411.020.000,-. Dengan memperhatikan seluruh perubahan tersebut, total pagu anggaran Inspektorat Utama Tahun 2025 menjadi sebesar Rp21.058.996.000,-.

Sebagai wujud pelaksanaan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan POM pada Tahun 2025, Inspektorat Utama memiliki pagu anggaran sebesar Rp 21.058.996.000,- untuk pelaksanaan 2 (dua) kegiatan, yaitu: (1) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I dan (2) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I dengan alokasi anggaran Rp 15.605.847.000,-. Alokasi anggaran ini diikuti dengan 4 (empat) Klasifikasi Rincian Output yang mengikat yakni:
   A. Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sejumlah Rp 373.055.000,- dengan target 18 unit;
   B. Layanan Dukungan Manajemen Internal untuk belanja MAK 51 dan belanja mengikat sejumlah Rp 10.673.444.000,- dengan target 11 layanan;
   C. Layanan Sarana dan Prasarana Internal sejumlah Rp25.000.000,- dengan target 9 Unit; dan

D. Layanan Manajemen Kinerja Internal sejumlah Rp4.534.348.000,- dengan target 19 laporan.

2. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II dengan alokasi anggaran Rp5.453.149.000,-. Alokasi anggaran ini diikuti dengan 2 (dua) Klasifikasi Rincian Output yang mengikat yakni:

A. Layanan Dukungan Manajemen Internal sejumlah Rp 2.264.213.000,- dengan target 9 laporan;dan

B. Layanan Manajemen Kinerja Internal sejumlah Rp 3.188.936.000,- dengan target 19 laporan.

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Setelah DIPA Inspektorat Utama Tahun 2025 disahkan, Inspektorat Utama menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Dasar untuk penyusunan Perjanjian Kinerja 2025 adalah Rencana Kinerja Tahunan 2025 dengan target dan anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan DIPA 2025 yang telah disahkan. Untuk melihat lebih detail Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 8 Sasaran Program, Indikator, Target Tahun 2025 (PK Awal)

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	IKSP 1	Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	17,88
		IKSP 2	Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama	87,6
		IKSP 3	Nilai AKIP Inspektorat Utama	82,58
		IKSP 4	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	5
		IKSP 5	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	3,4
2	Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan yang efektif dan efisien	IKSP 6	Persentase Laporan layanan jasa assurance pada mitra kerja inspektorat Utama yang dilaksanakan sesuai standar mutu	100%
		IKSP 7	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	92,69%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3	4	5
		IKSP 8	Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%
		IKSP 9	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%
3	Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional	IKSP 10	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	3,9
		IKSP 11	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	88,28

Pada bulan **Agustus 2025**, telah dilakukan revisi perjanjian kinerja sesuai dengan nota dinas Sekretaris Utama nomor PR.07.2.08.25.451 hal Permintaan Revisi PK dan RAPK 2025. Penyesuaian tersebut terdapat sebagai berikut:

Tabel 9 Matriks Semula Menjadi Revisi Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2025

Semula			Menjadi			Justifikasi
Sasaran Program	**Indikator**	**Target 2025**	**Sasaran Program**	**Indikator**	**Target 2025**	
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	17,88	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	18,37	Adanya penyesuaian target pada tahun 2025 karena adanya penyesuaian target pada Eselon II dengan mempertimbangkan realisasi kinerja di tahun 2024
	Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama	87,6		Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama	87,6	Tetap
	Nilai AKIP Inspektorat Utama	82,58		Nilai AKIP Inspektorat Utama	82,58	Tetap
	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	5		Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	5	Tetap
	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	3,4		Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	3,39	Penyesuaian target dilakukan dengan memperhatikan realisasi kinerja di tahun 2024
Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan yang efektif dan efisien	Persentase Laporan layanan jasa assurance pada mitra kerja inspektorat Utama yang dilaksanakan sesuai standar mutu	100%	Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	88,28	Penyesuaian indikator dengan menggambarkan *outcome*. Indeks kepuasan mitra dapat menggambarkan dari sasaran program 2 yang lebih *outcome*
	Persentase	92,69%		Persentase	92,69%	Penyesuaian nomenklatur

Semula			Menjadi			Justifikasi
Sasaran Program	**Indikator**	**Target 2025**	**Sasaran Program**	**Indikator**	**Target 2025**	
	rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti			rekomendasi pengawasan assurance yang ditindaklanjuti		untuk lebih menggambakan peran *assurance* dari Inspektorat. yang dimaksud pengawasan *assurance* adalah audit kinerja/ operasional
	Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%		Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%	Penyesuaian kata konsultansi sesuai dengan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI)
	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%	Tetap
Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	3,9	Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	3,9	Tetap
	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	88,28		Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama	82,8	Merupakan indikator baru yang lebih menggambarkan dalam mewujudkan organisasi Inspektorat Utama yang profesional. Penentuan target berdasarkan nilai TSE pada tahun 2020 dan 2024.

Atas dasar adanya penyesuaian di atas, kemudian disusun penyusunan Revisi Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2025 yang telah ditandatangani oleh Inspektur Utama dan disahkan oleh Kepala Badan POM pada tanggal 28 Agustus 2025 sehingga Perjanjian Kinerjanya menjadi:

Tabel 10 Revisi Sasaran Program, Indikator, Target Tahun 2025

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	IKSP 1	Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	18,37
		IKSP 2	Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama	87,6
		IKSP 3	Nilai AKIP Inspektorat Utama	82,58
		IKSP 4	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	5
		IKSP 5	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	3,39
2	Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	IKSP 6	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	88,28
		IKSP 7	Persentase rekomendasi pengawasan *assurance* yang ditindaklanjuti	92,69%
		IKSP 8	Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%
		IKSP 9	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%
3	Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional	IKSP 10	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	3,9
		IKSP 11	Nilai Telaah Sejawat Intern Inspektorat Utama	82,8

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan melalui aplikasi *e-performance* untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap triwulan berikutnya. Dasar pemantauan tiap triwulan pada tahun 2025 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama pada Triwulan III ini sudah menggunakan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang terbaru.

Tabel 11. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2025

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET	TARGET BULAN												ANGGARAN
					B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	IKSP 1	Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	18.37												18.37	Rp2,178,441,000
		IKSP 2	Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama	87.60												87.60	Rp233,457,000
		IKSP 3	Nilai AKIP Inspektorat Utama	82.58												82.58	Rp5,996,000
		IKSP 4	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	5												5	Rp10,913,008,000
		IKSP 5	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	3.39												3.39	Rp4,810,000
2	Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan yang efektif dan efisien	IKSP 6	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	88.28												88.28	Rp2,437,282,000

INSPEKTORAT UTAMA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET	TARGET BULAN												ANGGARAN
					B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		IKSP 7	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	92.69%	90%	90%	90%	91%	91%	91%	92%	92%	92%	92,69 %	92,69 %	92.69 %	Rp1,357,219,500
		IKSP 8	Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%	94%	94%	94%	96%	96%	96%	98%	98%	98%	100%	100%	100%	Rp31,307,500
		IKSP 9	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%			50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	100%	Rp293,736,000
3	Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional	IKSP 10	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	3.90												3.90	Rp3,360,219,000
		IKSP 11	Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama	82.8												82.8	Rp243,520,000
					Total												Rp21,058,996,000

2.5 Metode Pengukuran

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran dapat diukur melalui capaian indikator-indikator kinerjanya. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator sesuai Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Surat Edaran Nomor PR.09.01.2.03.25.10 Tahun 2025 tentang Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja, dengan rumus di bawah ini:

Pengukuran **indikator positif/polarisasi *maximize*** (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\%\ Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

Untuk **indikator negatif**/polarisasi *minimize* (semakin kecil realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\%\ \text{Capaian} = 1 + \frac{(1 - \text{Realisasi})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dalam Laporan Kinerja ini, Kategori pencapaian indikator kinerja dan Sasaran Program yang digunakan adalah:

Tabel 12. Kategori Pencapaian Indikator Kinerja dan Sasaran Program

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>110%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 110%	
Baik	90% < x ≤ 100%	
Cukup	60% ≤ x ≤ 90%	
Kurang	<60%	

Dari capaian indikator-indikatornya, kemudian dapat dihitung Nilai Kinerja Organisasi (NKO). NKO pada triwulan III 2025 merupakan NKO periodik. NKO periodik triwulan III 2025 dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja triwulan III yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada triwulan III 2025.

Tabel 13. Contoh perhitungan NKO Periodik

No	Sasaran	Indiktor Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (1)	Normalisasi Capaian PK (2)
1					186,52%	110%
2					194,82%	110%
3					83,33%	83,33%
4					N/A	-
5					105,08%	105,08%
6					112,01%	110%
Total Capaian PK (4)						518,41%
Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK (5)						=(518,41%/5) =103,68%
Predikat NKO (6)						Istimewa

Kinerja yang dicapai organisasi diberikan predikat kinerja organisasi sebagai acuan dalam penetapan sebaran predikat kinerja pegawai. Penetapan predikat kinerja organisasi berdasarkan pada capaian kinerja organisasi yaitu NKO dan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Tabel 14. Predikat Nilai Kinerja Organisasi

Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna
Istimewa	>100%	
Baik	80% < x ≤ 100%	
Butuh Perbaikan	60% < x ≤ 80%	
Kurang	20% < x ≤ 60%	
Sangat Kurang	0% ≤ x ≤ 20%	

Selanjutnya, metode pengukuran pada masing-masing indikator kinerja yang tercantum pada perjanjian kinerja tahun 2025, dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 15. Manual IKU Sasaran Program Inspektorat Utama Tahun 2025

No	IKSP	Definisi Operasional	Cara Perhitungan
1	Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) di lingkup Inspektorat Utama adalah gambaran tingkat kemajuan BPOM dalam mewujudkan birokrasi yang berkualitas sesuai lingkup tugas dan fungsi Inspektorat Utama. Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama merupakan indikator baru di tahun 2025 yang terdiri dari indikator-indikator pendukung pada Reformasi	Penjumlahan nilai RB General sesuai tugas dan fungsi Inspektorat Utama sesuai dengan bobot RB General.

No	IKSP	Definisi Operasional	Cara Perhitungan
		Birokrasi General BPOM dalam lingkup Inspektorat Utama sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 165 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tahun 2020-2024. Penilaian yang dikoordinatori oleh Inspektorat Utama pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 165 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tahun 2020-2024 adalah: 1. Persentase tingkat keberhasilan pembangunan zona integritas unit kerja BPOM; 2. Nilai survei penilaian integritas BPOM; 3. Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM (Bagian dari SAKIP BPOM); 4. Nilai evaluasi SPIP BPOM; dan 5. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	

<table>
<tr><th>No</th><th>IKSP</th><th>Definisi Operasional</th><th>Cara Perhitungan</th></tr>
<tr><td>2</td><td>Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama</td><td>Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.</td><td>Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan self-assessment dan reviu oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I.
Cara perhitungan terbagi dari 2 (dua komponen) yaitu:
<table><tr><th>NO</th><th>KOMPONEN PENGUNGKIT</th><th>BOBOT</th></tr><tr><td>1</td><td>Manajemen Perubahan</td><td>8%</td></tr><tr><td>2</td><td>Penataan Tatalaksana</td><td>7%</td></tr><tr><td>3</td><td>Penataan Sistem Manajemen SDM</td><td>10%</td></tr><tr><td>4</td><td>Penguatan Akuntabilitas Kinerja</td><td>10%</td></tr><tr><td>5</td><td>Penguatan Pengawasan</td><td>15%</td></tr><tr><td>6</td><td>Penguatan Kualitas Pelayanan Publik</td><td>10%</td></tr></table><table><tr><th>No</th><th>KOMPONEN HASIL</th><th>BOBOT</th></tr><tr><td>1</td><td>Birokrasi yang bersih dan akuntabel</td><td>22,5 %</td></tr><tr><td>2</td><td>Pelayanan Publik yang prima</td><td>17,5 %</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>3</td><td>Nilai AKIP Inspektorat Utama</td><td>Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN&RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan</td><td>Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM.

Penjumlahan 5 (lima) komponen penilaian AKIP, yaitu:</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No</th><th>IKSP</th><th>Definisi Operasional</th><th>Cara Perhitungan</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasiikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja.</td><td>(1) Perencanaan Kinerja (Bobot 24);
(2) Pengukuran Kinerja (Bobot 24);
(3) Pelaporan Kinerja (Bobot 12);
(4) Evaluasi Kinerja Internal (Bobot 20);
(5) Capaian Kinerja (Bobot 20).

Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut:

<table><tr><th>No</th><th>Komponen</th><th>Bobot</th></tr><tr><td>1</td><td>Perencanaan Kinerja</td><td>24</td></tr><tr><td>2</td><td>Pengukuran Kinerja</td><td>24</td></tr><tr><td>3</td><td>Pelaporan Kinerja</td><td>12</td></tr><tr><td>4</td><td>Evaluasi Kinerja Internal</td><td>20</td></tr><tr><td>5</td><td>Capaian Kinerja</td><td>20</td></tr><tr><td></td><td>Nilai Evaluasi</td><td>100</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>4</td><td>Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama</td><td>Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran Satuan Kerja BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai</td><td>Nilai Kinerja Anggaran =
(Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%)
Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No</th><th>IKSP</th><th>Definisi Operasional</th><th>Cara Perhitungan</th></tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. 8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:
a. Revisi DIPA (bobot 10%)
b. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
c. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
d. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
e. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
f. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
g. Capaian Output (bobot 25%)
h. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:

a. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)
b. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)</td>
<td>
<table>
<tr><th>Nilai</th><th>Kategori</th><th>Konversi NIlai</th></tr>
<tr><td>0 s.d. 50</td><td>Sangat Kurang</td><td>1</td></tr>
<tr><td>50,01 s.d. 60</td><td>Kurang</td><td>2</td></tr>
<tr><td>60,01 s.d. 80</td><td>Cukup</td><td>3</td></tr>
<tr><td>80,01 s.d. 90</td><td>Baik</td><td>4</td></tr>
<tr><td>90,01 s.d. 100</td><td>Sangat Baik</td><td>5</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><th>No</th><th>IKSP</th><th>Definisi Operasional</th><th>Cara Perhitungan</th></tr>
<tr><td>5</td><td>Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama</td><td>a. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko;
b. Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi;
c. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi; dan
d. Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:
1. Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan
2. Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko
3. Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko</td><td>Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manejemen risiko yang nilainya terbagi dalam kategori sebagai berikut:
<table><tr><th>Menuju Tingkat Maturitas</th><th>Skor Total</th><th>Nilai Maturitas</th><th>Tingkat Maturitas</th></tr><tr><td>Risk Naive</td><td>0-16</td><td>1</td><td>-</td></tr><tr><td>Risk Aware</td><td>17-32</td><td>2</td><td>Peningkatan Risk Naive menuju Risk Aware</td></tr><tr><td>Risk Defined</td><td>33-48</td><td>3</td><td>Peningkatan Risk Aware menuju Risk Defined</td></tr><tr><td>Risk Managed</td><td>49-64</td><td>4</td><td>Peningkatan Risk Defined menuju Risk Managed</td></tr><tr><td>Risk Enabled</td><td>65-80</td><td>5</td><td>Peningkatan Risk Managed menuju Risk Enabled</td></tr></table>
Cara perhitungan level maturitas
Skor Maturitas = Skor Total 16
Keterangan:
a. Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen risiko
b. Skor Total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja evaluasi berdasarkan penilaian oleh Inspektorat Utama</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Indeks kepuasan mitra</td><td>Indeks kepuasan mitra pengawasan intern</td><td>Survei dilaksanakan 1 tahun sekali pada mitra</td></tr>
</table>

No	IKSP	Definisi Operasional	Cara Perhitungan
	pengawasan intern Inspektorat Utama	merupakan suatu pengukuran melalui survei untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan pengawasan yang mendapatkan penilaian positif dari mitra Inspektorat Utama berupa tingkat kepuasan satuan kerja/unit kerja atas pengawasan intern yang telah diberikan Inspektorat Utama. Konsep yang digunakan dalam menyusun survei kepuasan mitra pengawasan intern adalah Service Quality (ServQual) yang merupakan salah satu konsep layanan jasa yang dberikan organisasi. ServQual memiliki lima aspek utama, yakni *Reliability, Assurance, Tangible, Empathy, dan Responsiveness (RATER*) sebagai berikut: 1. Wujud Fisik (Tangible); Elemen ini mengacu pada segala sesuatu yang bersifat wujud fisik dan memengaruhi kualitas layanan kepada mitra pengawasan intern 2. Keandalan (Reliability); Elemen ini merujuk pada kemampuan Inspektorat Utama memberikan layanan secara akurat kepada mitra pengawasan intern. Produk dan layanan Inspektorat Utama dapat diakses oleh mitra pengawasan intern kapan saja dan di mana saja. 3. Kesigapan (Responsiveness); Elemen ini mengacu pada bentuk tindakan Inspektorat Utama dalam merespons mitra pengawasan intern secara tepat waktu. 4. Jaminan (Assurance); Elemen ini mengacu	kerja: a. Responden dari semula kepala unit kerja menjadi ASN yang telah berinteraksi atau memanfaatkan layanan yang diberikan Inspektorat utama; b. Fokus pertanyaan dari semula berfokus pada pelayanan audit menjadi berfokus pada pelayanan pengawasan intern yang terdiri dari audit, review, evaluasi, analisis dan pengawasan lainnya; c. Jawaban skala likert 1 sd 4; dan Menggunakan pertanyaan kepuasan atas layanan yang telah diberikan dan harapan yang diinginkan responden; d. Mengolah data survei kepuasan mitra pengawasan intern

No	IKSP	Definisi Operasional	Cara Perhitungan
		pada kemampuan Inspektorat Utama untuk menumbuhkan kepercayaan mitra pengawasan intern. 5. Empati (Empathy); Elemen ini mengacu pada perhatian Inspektorat Utama pada mitra pengawasan intern. Praktik empati bisa diwujudkan dengan mendengarkan dan membantu menemukan solusi atau memahami.	
7	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	Inspektorat Utama sesuai tugas dan fungsinya, melakukan pemantauan secara berkesinambungan atas hasil pengawasan intern yang dilakukan, yang difokuskan pada penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan serta pelaksanaan mulai dari tahap perencanaan anggaran sampai dengan tindak lanjut hasil evaluasi. Persentase rekomendasi pengawasan assurance yang ditindaklanjuti dihitung dari jumlah rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti sesuai saran dan tidak dapat ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah total rekomendasi pengawasan intern. Berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia: Auditor harus mendokumentasikan fakta untuk keperluan pemantauan tindak lanjut dan memutakhirkan fakta sesuai dengan informasi tentang tindak lanjut yang telah dilaksanakan auditi. Pemantauan dan	1. Data persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti tersedia secara realtime pada dashboard aplikasi Sistem Aplikasi terpadu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah APIP; 2. Penginputan data rekomendasi hasil pengawasan maksimal di tanggal 1 Desember Tahun berjalan untuk auditor, dan 31 Desember untuk auditi; 3. Penghitungan realisasi menggunakan data screenshoot di SAPA APIP maksimal per tanggal 10 bulan selanjutnya atau penghitungan manual khusus untuk perhitungan realisasi kinerja di akhir tahun

No	IKSP	Definisi Operasional	Cara Perhitungan
		penilaian tindak lanjut bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat telah dilaksanakan oleh auditi sesuai rekomendasi.	
8	Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	Perkembangan dan kemajuan teknologi dalam tata kelola kepemerintahan (e-governance) merupakan suatu keniscayaan dan menjadi kewajiban setiap instansi pemerintah dalam melaksanakan bisnis proses kepemerintahan, pelayanan publik dan penegakan aturan hukum. Layanan Saluran Online Layanan Untuk Konsutasi (SOLUSI) yang dapat diakses oleh seluruh ASN Badan POM melalui laman https://solusi.pom.go.id merupakan kanal / saluran informasi yang dapat digunakan oleh Aparatur Sipil Negara yang bertanggungjawab di bidang pengadaan barang / jasa dan pengelolaan keuangan dalam menyampaikan kendala ataupun mendiskusikan risiko yang timbul dalam pelaksanaan tugasnya. Tindak lanjut dari pemanfaatan kanal / saluran informasi SOLUSI menjadi penting dalam rangka mewujudkan peran Inspektorat Utama sebagai *trusted advisor* yang membantu permalahan dan memberikan solusi bagi keberlangsungan capaian kinerja unit kerja.	(Jumlah pertanyaan pada aplikasi SOLUSI yang dijawab dalam waktu 5 hari kerja/jumlah pertanyaan pada aplikasi SOLUSI) x100%
9	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan	Pengaduan adalah Pengaduan Berkadar Pengawasan yang isinya mengandung informasi atau adanya dugaan terjadinya	Jumlah pengaduan yang layak ditindaklanjuti ATT (sesuai bobot) + jumlah pengaduan yang tidak layak ditindaklanjuti ATT (sesuai bobot) /

<table>
<tr><th>No</th><th>IKSP</th><th>Definisi Operasional</th><th>Cara Perhitungan</th></tr>
<tr><td></td><td>tepat waktu</td><td>Pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pengaduan bersumber dari Whistleblowing System (WBS) atau pengaduan Masyarakat.
WBS adalah mekanisme penyampaian Pengaduan oleh Pegawai sebagai whistleblower terkait dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai atau melibatkan Pegawai.
Pengaduan Masyarakat adalah bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai atau melibatkan Pegawai.</td><td>Jumlah seluruh pengaduan yang diterima x 100%.
Klasifikasi Bobot:
<table><tr><th rowspan="2">Tahap</th><th rowspan="2">Kegiatan</th><th rowspan="2">Detail</th><th colspan="2">Bobot</th></tr><tr><th>Layak</th><th>Tidak Layak</th></tr><tr><td>1</td><td>Telaah Awal (Dalam rangka menilai pemenuhan unsur 5W+1H termasuk komunikasi kepada pelapor untuk meminta kelengkapan informasi awal)</td><td>Simpulan Layak /tidak layak oleh tim GT yang menangani pengaduan</td><td>50</td><td>80</td></tr><tr><td>2</td><td>Arahan Inspektur Utama</td><td>Dispo Arahan Inspektur Utama</td><td>10</td><td>20</td></tr><tr><td>3</td><td>Pelaksanaan ATT</td><td>Sesuai Pedoman ATT</td><td>30</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>4</td><td>Penyusunan Laporan ATT</td><td>Penyusunan Draft Final ATT, Reviu Final oleh Irtama dan Laporan yang ditandatangani Irtama</td><td>10</td></tr></table>
Note:
a. Pengaduan terdiri dari pengaduan masyarakat dan WBS;
b. Jangka waktu penanganan pengaduan harus dapat diselesaikan selama 90 hari kerja sejak diterimanya pengaduan, kecuali terdapat alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
c. Periode pelaporan pengaduan yang dihitung sebagai capaian kinerja adalah pengaduan yang diterima sejak hari kerja pertama bulan Oktober tahun sebelumnya sampai dengan akhir hari kerja bulan September tahun berjalan (Oktober Y-1 sampai dengan September Y); dan</td></tr>
</table>

No	IKSP	Definisi Operasional	Cara Perhitungan
			d. Tahapan perhitungan realisasi kinerja dibagi menjadi 4 (empat) tahap dengan bobot realisasi kinerja dibagi menjadi 2 (dua) kriteria yaitu layak dan tidak layak untuk ditindaklanjuti sesuai tabel tersebut diatas.
10	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	Kapabilitas APIP diukur dengan menggunakan model Internal Audit Capability Model (IA-CM) yang dikembangkan BPKP. IACM Model BPKP mengadopsi model peningkatan kapabilitas yang dikembangkan oleh Institute of Internal Auditors (IIA). IA-CM merupakan kerangka kerja yang mengindentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik dan menggambarkan jalur evolusi untuk organisasi sektor publik dalam mengembangkan pengawasan intern yang efektif untuk memenuhi persyaratan tata kelola organisasi dan harapan profesional. IA-CM menunjukkan langkah-langkah untuk maju dari tingkat pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang kuat, efektif, kapabilitas pengawasan intern umumnya, terkait dengan organisasi yang lebih matang dan kompleks. Di dalam model IA-CM, APIP dibagi menjadi lima level kapabilitas, yaitu Level 1 (Initial), Level 2 (Infrastructure), Level 3 (Integrated), Level 4 (Managed), dan Level 5 (Optimizing).	Pemenuhan indikator keberhasilan pelaksanaan tata kelola yang baik yang tercantum dan ditentukan dalam internal audit capability model (IACM) untuk 240 pernyataan

INSPEKTORAT UTAMA

No	IKSP	Definisi Operasional	Cara Perhitungan
11	Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama	Nilai telaah sejawat intern merupakan proses evaluasi atau penilaian yang dilakukan oleh auditor internal lain (rekan sejawat) untuk menilai kualitas pekerjaan audit internal. Proses ini biasa dikenal dengan Peer Review Internal atau Quality Assurance Review (QAR), dan merupakan bagian dari upaya peningkatan mutu audit internal. Nilai telaah sejawat intern berpedoman pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.6.06.5.2657 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern, Standar Audit Intern Dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern.	Rata-rata dari hasil telaah sejawat intern Inspektorat I dan Inspektorat II. Penilaian Inspektorat I dan Inspektorat II dilakukan evaluasi silang

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
3.2 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI
3.3 REALISASI ANGGARAN



BAB 03

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada tahun 2025, Inspektorat Utama telah menetapkan 3 (Tiga) Sasaran Program dengan 11 (sebelas) indikator kinerja, yang keseluruhannya merupakan indikator kinerja Sasaran Program (IKSP). Pencapaian Sasaran Program dan IKSP Inspektorat Utama tahun 2025 sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 secara ringkas adalah sebagai berikut:

Tabel 16. Capaian Kinerja Inspektorat Utama TW III Tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target TW III 2025	Target 2025	Realisasi TW III 2025	Capaian TW III 2025 (%)	Capaian Target 2025 (%)	Kategori TW III 2025	Normalisasi Capaian PK	Ket
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	1.1	Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	-	18,37	-	-	-	-	-	Diukur pada akhir TW IV 2025
		1.2	Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama	-	87.6	-	-	-	-	-	Diukur pada akhir TW IV 2025
		1.3	Nilai AKIP Inspektorat Utama	-	82.58	-	-	-	-	-	Diukur pada akhir TW IV 2025
		1.4	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	-	5	-	-	-	-	-	Diukur pada akhir TW IV 2025
		1.5	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	-	3.39	-	-	-	-	-	Diukur pada akhir TW IV 2025

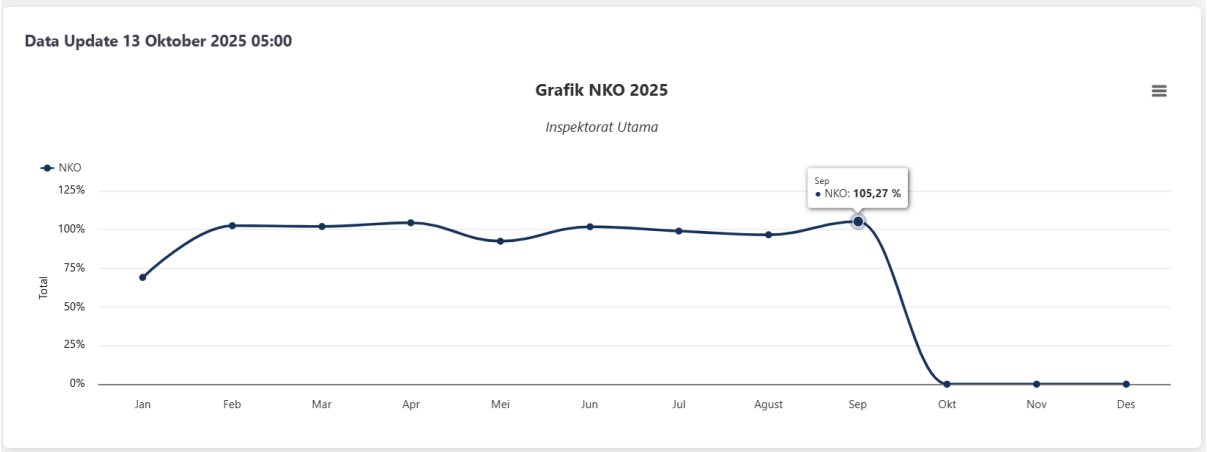
INSPEKTORAT UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target TW III 2025	Target 2025	Realisasi TW III 2025	Capaian TW III 2025 (%)	Capaian Target 2025 (%)	Kategori TW III 2025	Normalisasi Capaian PK	Ket
2	Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	2.1	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	-	88.28	-	-	-	-	-	Diukur pada akhir TW IV 2025
		2.2	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	92.00%	92.69%	95.46%	103.76	102.99	Sangat Baik	103.76	Berdasarkan data SAPA APIP per tanggal 6 Oktober 2025: Inspektorat I: 2554/2667= 95,76% Inspektorat II: 2341/2461= 95,12% Inspektorat Utama: 4895/5128= 95,46%

INSPEKTORAT UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target TW III 2025	Target 2025	Realisasi TW III 2025	Capaian TW III 2025 (%)	Capaian Target 2025 (%)	Kategori TW III 2025	Normalisasi Capaian PK	Ket
		2.3	Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	96%	100%	100%	104.17	100.00	Sangat Baik	104.17	Berdasarkan olah data aplikasi SOLUSI September 2025: Inspektorat I: 20/20=100% Inspektorat II: 21/21=100% Inspektorat Utama: 41/41=100%
		2.4	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	80%	100%	93.75%	117.19	93.75	Tidak dapat disimpulkan	110.00	Berdasarkan data pengaduan triwulan III 2025
3	Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional	3.1	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	-	3.9	-	-	-	-	-	Diukur pada akhir TW IV 2025
		3.2	Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama	-	82.8	-	-	-	-	-	Diukur pada akhir TW IV 2025
Nilai Kinerja Organisasi TW III 2025									**Istimewa**	**105.27**	

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 11 (Sebelas) IKSP, terdapat 1 (satu) IKSP memperoleh kategori "Tidak dapat disimpulkan", 2 (dua) IKSP memperoleh Kategori "Sangat Baik", Serta 8 (delapan) IKSP yang masih belum dapat diukur pada TW III 2025. Pengukuran capaian kinerja Inspektorat Utama tahun TW III 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target IKSP. Dari hasil pengukuran tersebut, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi Inspektorat Utama adalah sebesar **105,27** dengan Kategori **"Istimewa".** Penjelasan Capaian Sasaran Program dan IKU Inspektorat Utama tahun 2025 secara detail akan disampaikan pada bagian analisis akuntabilitas kinerja berikut ini.



Gambar 4 Capaian Nilai Kinerja Organisasi Inspektorat Utama Triwulan III Tahun 2025

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Inspektorat Utama dapat merealisasikan target output yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja/Kontrak Kinerja. Rincian realisasi ouput dari tiap kegiatan disajikan sebagai berikut:

3.1.1 Capaian Sasaran Program 1 – Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama

Pencapaian sasaran program "Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama" diukur dengan 5 (lima) indikator kinerja, yaitu: (1) Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama; (2) Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama; (3) Nilai AKIP Inspektorat Utama; (4) Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama; dan (5) Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama.

Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel berikut.

Tabel 17. Capaian Sasaran Program 1 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama

No	Sasaran Program	Indikator	Baseline TW II 2025	Triwulan III 2025			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)	8
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	-	-	*Diukur pada Akhir TW IV 2025	-	-
		Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama	-	-	*Diukur pada Akhir TW IV 2025	-	-
		Nilai AKIP Inspektorat Utama	-	-	*Diukur pada Akhir TW IV 2025	-	-
		Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	-	-	*Diukur pada Akhir TW IV 2025	-	-
		Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	-	-	*Diukur pada Akhir TW IV 2025	-	-

IKSP.1 Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama

Indeks Reformasi Birokrasi (RB) BPOM di lingkup Inspektorat Utama adalah gambaran tingkat kemajuan BPOM dalam mewujudkan birokrasi yang berkualitas sesuai lingkup tugas dan fungsi Inspektorat Utama.

Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama merupakan indikator baru di tahun 2025 yang terdiri dari indikator-indikator pendukung pada Reformasi Birokrasi General BPOM dalam lingkup Inspektorat Utama

sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 165 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tahun 2020-2024. Penilaian yang dikoordinatori oleh Inspektorat Utama pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 165 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tahun 2020-2024 adalah:

1. Persentase tingkat keberhasilan pembangunan zona integritas Unit Kerja BPOM
2. Nilai survei penilaian integritas BPOM
3. Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM (Bagian dari hasil SAKIP BPOM yang dinilai PANRB)
4. Nilai evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPOM
5. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK BPOM

lima hal di atas menjadi indikator kinerja di level Eselon II (Inspektorat I dan Inspektorat II). Indeks RB di lingkup Inspektorat Utama diukur dengan melakukan penjumlahan bobot nilai RB General pada tugas dan fungsi Inspektorat Utama.

Sebagai informasi, pada rancangan Rencana Strategis Inspektorat Utama tahun 2025-2029 telah dilaksanakan pembahasan indikator dan target lebih mendalam. Hal ini dilakukan karena pada saat Perjanjian Kinerja ini disusun, terdapat realisasi indikator pendukung pada tingkat eselon II yang belum dapat diukur. Sehingga pembahasan lebih mendalam dilakukan terhadap indikator ini dengan mempertimbangkan realisasi kinerja di tahun 2024. Selain itu, pada penyesuaian ini juga sudah ditambahkan bobot pada indikator tingkat eselon II yaitu “Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM”. Pada indikator “Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama” dilakukan penyesuaian target sebagai berikut:

Tabel 18. Matriks penyesuaian target indikator "Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama"

Semula		Menjadi		Justifikasi
Indikator	**Target 2025**	**Indikator**	**Target 2025**	
Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	17,88	Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	18,37	Adanya penyesuaian target pada tahun 2025 karena adanya penyesuaian target pada Eselon II dengan mempertimbangkan baseline di 2024

Pada tingkat Eselon II, terdapat penyesuaian target 2025 pada indikator berikut:

Tabel 19. Matriks penyesuaian target 2025 indikator di Tingkat Eselon II Inspektorat I/Inspektorat II

Semula		Menjadi		Justifikasi
Indikator	**Target 2025**	**Indikator**	**Target 2025**	
Persentase Keberhasilan Tingkat Pembangunan Zona Integritas	73,7%	Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	62,86%	Adanya penyesuaian DO. Perhitungan yang semula WBK dan WBBM, menjadi hanya menggunakan WBBM
Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	20,73	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	20,75	Penyesuaian target dilakukan dengan mempertimbangkan adanya realisasi kinerja tahun 2024 yang baru diterima dari PAN RB
Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM	84,6	Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM	84,48	Penyesuaian target dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kendali IKU yang rendah sehingga menggunakan gap terendah dari realisasi kinerja di periode 2021-2024

Atas dasar penyesuaian tersebut, berikut kami sampaikan hasil capaian kinerja pada indikator Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspetorat Utama sebagaimana berikut:

Tabel 20. Capaian kinerja IKSP.1 Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama TW III 2025

No	Sasaran Program	Indikator	Baseline TW II 2025	Triwulan III 2025				Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target	Capaian (%)	Kategori
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)	8	9	10 (6/9)	11
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	*Diukur pada Akhir TW IV 2025	-	*Diukur pada Akhir TW IV 2025	-	-	18,37	-	-

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi kinerja indikator Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama triwulan III tahun 2025 belum dapat diketahui karena pengukuran kinerja baru dilakukan pada akhir triwulan IV 2025. Sehingga realisasi **belum dapat dibandingkan pada target triwulan III 2025 maupun target akhir tahun 2025.**

Pada triwulan III 2025, Inspektorat Utama melaksanakan rencana aksi sebagai upaya mencapai target pada akhir tahun 2025. **Upaya yang dilakukan pada triwulan III 2025** adalah sebagai berikut:

1. Monitoring Kepatuhan Pelaporan Manajemen Risiko Unit Pemilik Risiko Semester II Tahun 2025.
2. Bimbingan Teknis Manajemen Risiko Unit Kerja.
3. Revisi petunjuk pelaksanaan manajemen risiko.
4. Penyusunan rencana aksi RB tahun 2025 bersama Biro Hukum dan Organisasi.
5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi RB *ex-ante* dan *on-going* triwulan I s.d triwulan II tahun 2025.
6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPKP dan SPAK triwulan III tahun 2025.
7. Evaluasi ZI menuju WBK secara mandiri.

8. Pendampingan unit kerja yang dilakukan evaluasi menuju WBBM oleh Kementerian PANRB.
9. Bimbingan Teknis Pembangunan ZI.
10. Monitoring dan evaluasi kepada unit kerja yang telah mendapat predikat WBK/WBBM dari KemenPANRB.
11. Pemantauan *Area of Improvement* (AoI) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIPT) Tahun 2025.
12. Finalisasi Rancangan Petunjuk Teknis Auditor Internal Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Terintegrasi.
13. Pengelolaan pelaksanaan audit internal Sistem Manajemen POM Terintegrasi.
14. Sosialisasi kepada eksternal terkait terkait kebijakan, regulasi, SOP, serta alur penanganan apabila terjadi penyimpangan integritas.
15. Penyusunan Laporan Evaluasi Internal sesuai dengan pedoman SAKIP; terbaru dan melakukan dokumentasi sesuai timeline.
16. Pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan SPI dan aplikasi sang integritas.
17. *Workshop* penguatan anti korupsi: Cafe Integritas Seri 7 dengan tema Pengelolaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan Pengelolaan Tambahan Uang Persediaan (TUP).
18. *Public Campaign* Anti Korupsi.
19. Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP dalam aplikasi SAPA APIP secara berkala.
20. Pendampingan Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja dan Pemeriksaan Rinci Kinerja Badan POM oleh Badan Pemeriksa keuangan.
21. Pemantauan dan evaluasi tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas BPOM Semester I TA 2025 dan Penyelesaian Kerugian Negara Semester I Tahun 2025.
22. Reviu Laporan Keuangan Semester I TA 2025.
23. Reviu Pemutakhiran Data Barang Milik Negara Semester I TA 2025.
24. Menyusun Laporan Hasil Pengawasan Intern di Lingkungan BPOM Triwulan II 2025.
25. Melakukan rekapitulasi hasil rencana aksi SPI BPOM tahun 2024 dan menyampaikan rencana aksi kepada KPK melalui aplikasi JAGA.
26. Melakukan koordinasi dengan PIC KPK dan unit terkait di BPOM untuk pengisian *milestone* Stranas PK B09/triwulan III tahun 2025.

27. Melaksanakan monitoring atas kelengkapan pengisian LHKPN periodik tahun 2024.
28. Melaksanakan monitoring pengisian LHKPN khusus awal menjabat (CPNS dan PPPK) tahun 2025 di lingkungan BPOM.
29. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaporan gratifikasi dan Benturan Kepentingan triwulan III.
30. Menyusun telaah awal pengaduan masyarakat dan WBS triwulan III.
31. Melaksanakan penginputan data implementasi Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) tahun 2025.
32. Monitoring responden terhadap pengisian SPI tahun 2025.
33. Melaksanakan monitoring tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP tahun 2024 dan melaksanakan evaluasi SAKIP tahun 2025 kepada seluruh Satuan Kerja BPOM.
34. Sosialisasi persiapan survei penilaian integritas tahun 2025 pada 4 Agustus 2025.
35. Pencanangan laboratorium integritas dan akuntabilitas.

Pada indikator ini, realisasi anggaran berdasarkan aplikasi SAKTI Bulan September 2025 adalah sebesar Rp 424.894.286 atau 81,90% dari pagu sebesar Rp 518.816.000. Selanjutnya dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja, dengan menggunakan realisasi anggaran sesuai Rencana Penarikan Dana (RPD)** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 21 Efisiensi Capaian kinerja IKSP.1 Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama TW III 2025

Indikator Kinerja	Dalam ribuan rupiah		Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran						
Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	518.816	424.894	81.90%	*diukur pada akhir TW IV	-	1	-	Belum dapat disimpulkan

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja masih belum dapat disimpulkan. Hal ini dikarenakan capaian kinerja baru dapat diukur pada akhir tahun 2025.

Realisasi anggaran **mendukung pada terlaksananya kegiatan** intervensi pemenuhan serta evaluasi WBK mandiri/WBBM, bimbingan teknis pengawasan intern, serta pendampingan pemeriksaan BPK. Kegiatan ini merupakan

kegiatan yang sangat penting dan perlu dukungan serta komitmen penuh pimpinan untuk menuju Badan POM yang lebih transparan dan akuntabel.



Gambar 5 *Entry meeting* pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan tahun 2024 dan 2025



Gambar 6 Pencanangan Laboratorium Integritas dan Akuntabilitas

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya sampai dengan akhir tahun dalam mencapai target akhir tahun 2025 adalah:

1. Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko di lingkungan BPOM tahun 2025.

2. Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi RB *on-going* triwulan III tahun 2025.
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPKP dan SPAK triwulan IV tahun 2025.
4. Pleno Hasil Penilaian Unit Kerja Menuju WBK secara Mandiri di Lingkungan BPOM Tahun 2025.
5. Penetapan unit kerja berpredikat WBK secara mandiri.
6. Pendampingan evaluasi SPIPT oleh BPKP.
7. Pengelolaan pelaksanaan audit internal Sistem Manajemen POM Terintegrasi.
8. Sosialisasi kepada eksternal terkait terkait kebijakan, regulasi, SOP, serta alur penanganan apabila terjadi penyimpangan integritas.
9. *Workshop* penguatan anti korupsi.
10. *Public Campaign* Anti Korupsi.
11. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP dalam aplikasi SAPA APIP secara berkala.
12. Pelaksanaan *desk* manajemen risiko kepada seluruh unit kerja Badan POM.
13. Pelaksanaan kegiatan lokakarya Strategi Peningkatan Efektivitas Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI dalam memperkuat akuntabilitas kinerja di BPOM.
14. Pendampingan Pemeriksaan Rinci Kinerja Badan POM oleh Badan Pemeriksa keuangan atas Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2024 dan 2025 pada Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan Daerah.
15. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK atas BPOM Semester II TA 2025 dan Penyelesaian Kerugian Negara Semester II Tahun 2025.
16. Reviu Usulan RKBMN Tahun 2025 untuk RKAKL Tahun Anggaran 2027.
17. Reviu Laporan Keuangan Triwulan III TA 2025.
18. Program Kerja Reviu PIPK tahun 2025.
19. Pelaporan E-Mawas PNBP.
20. Menyusun Laporan Hasil Pengawasan Intern di Lingkungan BPOM Triwulan III 2025.
21. Rekapitulasi hasil rencana aksi SPI BPOM tahun 2024 dan menyampaikan rencana aksi kepada KPK melalui aplikasi JAGA.

22. Koordinasi dengan PIC KPK dan unit terkait di BPOM untuk pengisian *milestone* Stranas PK B12/triwulan IV tahun 2025.
23. Monitoring atas kelengkapan pengisian LHKPN periodik tahun 2024.
24. Monitoring pengisian LHKPN khusus awal menjabat (CPNS dan PPPK) tahun 2025 di lingkungan BPOM.
25. Monitoring dan evaluasi pelaporan gratifikasi dan Benturan Kepentingan triwulan IV.
26. Penyusunan telaah awal pengaduan masyarakat dan WBS triwulan IV.
27. Penginputan data implementasi Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) tahun 2025.
28. Monitoring responden terhadap pengisian SPI tahun 2025.
29. Monitoring tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP tahun 2024 dan melaksanakan evaluasi SAKIP tahun 2025 kepada seluruh Satuan Kerja BPOM.
30. Revisi petunjuk pelaksanaan manajemen risiko.
31. Reviu RKA-K/L pagu Alokasi Anggaran TA 2026 pada seluruh Satuan Kerja BPOM.
32. Rapat Tinjauan Manajemen tahun 2025.
33. Monitoring dan evaluasi kebijakan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan dalam rangka penerapan Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi di lingkungan BPOM.
34. Monitoring pencapaian target responden BPOM untuk pelaksanaan SPI 2025.
35. Penyampaian data dukung tindak lanjut hasil SPI 2024 pada aplikasi JAGA.

IKSP.2 Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama

Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.

Nilai pembangunan zona integritas Inspektorat Utama merupakan hasil dari implementasi pelaksanaan zona integritas di lingkup Inspektorat Utama.

Terdapat perubahan nomenklatur dari Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama (Salah satu indikator Inspektorat Utama pada rencana strategis periode 2020-2024) menjadi Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama. Penyesuaian dilakukan karena Indeks RB di tingkat Eselon I sudah tidak relevan lagi dilakukan, melainkan yang dilakukan saat ini adalah penilaian pembangunan Zona Integritas pada Unit Kerja. Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama merupakan nilai rata-rata dari hasil penilaian pembangunan zona integritas pada Inspektorat I dan Inspektorat II.

Tabel 22 Capaian kinerja IKSP.2 Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama TW III 2025

Sasaran Program	Indikator	Baseline TW II 2025	Triwulan II 2025				Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target	Capaian (%)	Kategori
2	3	4	5	6	7 (6/5)	8	9	10 (6/9)	11
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama	*Diukur pada Akhir TW IV 2025	-	*Diukur pada Akhir TW IV 2025	-	-	87,6	-	-

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi kinerja indikator Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama triwulan III tahun 2025 belum dapat diketahui karena pengukuran kinerja baru dilakukan pada akhir triwulan IV 2025. Sehingga realisasi **belum dapat dibandingkan pada target triwulan II 2025 maupun target akhir tahun 2025.** Indikator ini merupakan indikator keberlanjutan dari periode rencana strategis Inspektorat Utama periode 2020-2024. Pada akhir periode rencana strategis Inspektorat Utama 2020-2024, yang dilakukan penyesuaian nomenklatur (Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama). Sehingga pada triwulan III 2025, Inspektorat Utama melaksanakan rencana aksi sebagai upaya mencapai target pada akhir tahun 2025. **Upaya yang dilakukan pada triwulan III 2025** adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembangunan Zona Integritas sebagaimana telah diprogramkan di masing-masing Inspektorat.
2. Mengukur dan senantiasa memantau pelaksanaan program dan melaporkannya secara berkala kepada pimpinan.

Pada indikator ini, realisasi anggaran berdasarkan aplikasi SAKTI Bulan September 2025 adalah sebesar Rp102.570.569 atau 79,12% dari pagu sebesar Rp129.643.000. Selanjutnya, dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja dengan menggunakan realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD)** yang dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 23 Efisiensi Capaian kinerja IKSP.2 Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama TW III 2025

Indikator Kinerja	Dalam ribuan rupiah		Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran						
Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama	129,643	102,570	79.12%	*diukur pada TW IV 2025	-	1	-	Belum dapat disimpulkan

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah **belum dapat disimpulkan.** Hal ini dikarenakan capaian kinerja **baru dapat diukur pada akhir tahun 2025.**

Realisasi anggaran **mendukung pada terlaksananya kegiatan** evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang mendukung pembangunan zona integritas di lingkup Inspektorat Utama untuk menuju Inspektorat Utama yang lebih baik. Koordinasi pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Inspektorat I dan Inspektorat II dalam membangun zona integritas di lingkup Inspektorat Utama.

Rencana tindak lanjut Inspektorat Utama pada triwulan selanjutnya sampai dengan akhir tahun adalah:

1. Melaksanakan pembangunan Zona Integritas sebagaimana telah diprogramkan di masing-masing Inspektorat.
2. Sesuai dengan Pedoman Pembangunan ZI, maka Inspektorat I dan Inspektorat II sebagai unit kerja secara berkala (triwulan) mengukur program sebagaimana disebut pada poin 1 (satu) dan senantiasa memantau pelaksanaan program dan melaporkannya secara berkala kepada pimpinan.

3. Memastikan keterlibatan pimpinan dimana pimpinan harus berperan sebagai teladan dan memastikan komitmen di 6 (enam) area perubahan.
4. Memastikan program yang diinisiasi Agen Perubahan berjalan secara berkelanjutan dan terlaksana.

IKSP.3 Nilai AKIP Inspektorat Utama

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah dan unit kerja wajib menerapkan manajemen kinerja yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Implementasi dan evaluasi implementasi SAKIP di Lingkungan Badan POM tahun 2024 juga berpedoman pada Keputusan Kepala Badan POM Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM dan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM.

Evaluasi implementasi SAKIP meliputi: (1) Perencanaan kinerja (bobot 24); (2) Pengukuran kinerja (bobot 24); (3) Pelaporan kinerja (bobot 12); (4) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal (bobot 20); dan (5) Capaian Kinerja (bobot 20). Perhitungan realisasi dan capaian indikator ini berdasarkan hasil evaluasi implementasi SAKIP di Inspektorat Utama oleh Tim Evaluator SAKIP BPOM.

Tabel 24 Capaian kinerja IKSP.3 Nilai AKIP Inspektorat Utama TW III 2025

Sasaran Program	Indikator	Baseline TW II	Triwulan III 2025				Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target	Capaian (%)	Kategori
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	Nilai AKIP Inspektorat Utama	*Diukur pada Akhir TW IV 2025	-	*Diukur pada Akhir TW IV 2025	-	-	82,58	-	-

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi kinerja indikator Nilai AKIP Inspektorat Utama triwulan III tahun 2025 belum dapat diketahui karena pengukuran kinerja baru dilakukan pada akhir triwulan IV 2025. Sehingga

realisasi **belum dapat dibandingkan pada target triwulan III 2025 maupun target akhir tahun 2025.**

Indikator ini merupakan indikator keberlanjutan dari periode rencana strategis Inspektorat Utama periode 2020-2024. Pada akhir periode rencana strategis Inspektorat Utama 2020-2024, Nilai AKIP Inspektorat Utama tidak mencapai target dengan nilai 81,58. Sehingga pada triwulan III 2025, Inspektorat Utama melaksanakan rencana aksi sebagai upaya mencapai target pada akhir tahun 2025. **Upaya yang dilakukan pada triwulan III 2025** adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana tindak lanjut rekomendasi evaluasi SAKIP Inspektorat Utama tahun 2024 sebagai berikut:

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Timeline	Realisasi TW III 2025
A. Perencanaan Kinerja				
1	Mempublikasikan dokumen perencanaan SAKIP pada subsite Satuan Kerja sehingga mudah diakses oleh stakeholder/masyarakat.	Melakukan publikasi dokumen evaluasi paruh waktu Renstra Inspektorat Utama pada subsite Inspektorat Utama.	Triwulan I 2025	Melakukan publikasi dokumen evaluasi paruh waktu Renstra Inspektorat Utama pada subsite Inspektorat Utama (Ittama.pom.go.id)
		Melakukan publikasi dokumen perencanaan Inspektorat Utama tahun 2025 pada subsite Inspektorat Utama. (PK, RAPK, RKT, Rencana Strategis, SK Manual IKU)	Triwulan I 2025	Melakukan publikasi dokumen perencanaan Inspektorat Utama tahun 2025 pada subsite Inspektorat Utama (Ittama.pom.go.id (PK, RAPK, RKT, Rencana Strategis, SK Manual IKU)
2	Memastikan keselarasan penyajian target indikator kinerja pada dokumen SAKIP	Mengoptimalkan tim monev pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Utama, Inspektorat I dan Inspektorat II untuk melaksanakan tugas sesuai Kepka BPOM No 111 Tahun 2024 tentang Tim monev pelaksanaan program dan kegiatan BPOM Tahun 2024	Triwulan I 2025	Mengoptimalkan tim monev pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Utama, Inspektorat I dan Inspektorat II untuk melaksanakan tugas sesuai Kepka BPOM No 111 Tahun 2024 tentang Tim monev pelaksanaan program dan kegiatan BPOM Tahun 2024
		Menyusun matriks identifikasi penyebab perbedaan penyajian target dan langkah mitigasi		Menyusun matriks identifikasi penyebab perbedaan penyajian target dan langkah mitigasi
B. Pengukuran Kinerja				
1	Menyusun notulen rapat evaluasi internal dilengkapi dengan lampiran daftar hadir rapat	Menyusun notulen rapat evaluasi internal TW I sd IV 2025 dilengkapi dengan lampiran daftar hadir rapat	Triwulan I - 4 2025	Menyusun laporan evaluasi dengan notulen rapat dan dilengkapi dengan lampiran daftar hadir rapat
2	Memastikan perhitungan capaian kinerja (angka pembilang dan penyebut) yang tercantum pada Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK)/kertas kerja dapat ditelusur/sesuai dengan dokumen monev (sumber data);	Mencantumkan dan melampirkan perhitungan capaian kinerja (angka pembilang dan penyebut) yang tercantum pada RHPK/kertas kerja laporan kinerja dan laporan evaluasi internal	Triwulan I - 4 2025	Mencantumkan dan melampirkan perhitungan capaian kinerja (angka pembilang dan penyebut) yang tercantum pada RHPK/kertas kerja laporan kinerja 2024 dan laporan evaluasi internal TW IV 2024

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Timeline	Realisasi TW III 2025
		Memastikan data capaian kinerja dapat ditelusuri dan sesuai dengan dokumen monev (sumber data) pada RHPK		Memastikan data capaian kinerja dapat ditelusuri dan sesuai dengan dokumen monev (sumber data) pada RHPK
3	Melakukan pengisian kendala dan rencana tindak lanjut per bulan pada aplikasi SIMETRIS secara tertib	Melakukan pengisian kendala dan rencana tindak lanjut per bulan pada aplikasi SIMETRIS secara tertib	Triwulan I - 4 2025	Melakukan pengisian kendala dan rencana tindak lanjut per bulan pada aplikasi SIMETRIS secara tertib
4	Memastikan penggunaan sumber data yang valid dalam melakukan pengukuran kinerja sehingga tidak terjadi perbedaan penyajian realisasi kinerja pada aplikasi SIMETRIS, SKP Pimpinan, Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja;	Melakukan verifikasi/reviu berjenjang sesuai SOP penyusunan data kinerja terhadap realisasi kinerja pada aplikasi SIMETRIS, SKP Pimpinan, Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja per triwulan oleh tim Monev Inspektorat Utama yang dituangkan dalam kertas kerja	Triwulan I - 4 2025	Melakukan verifikasi/reviu berjenjang sesuai SOP penyusunan data kinerja terhadap realisasi kinerja pada aplikasi SIMETRIS, SKP Pimpinan, Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja oleh tim Monev Inspektorat Utama yang dituangkan dalam kertas kerja
C. Pelaporan Kinerja				
1	Menyusun laporan kinerja interim dengan menyajikan penjelasan terkait adanya penambahan indikator kinerja pada tahun bersangkutan;	Menyusun laporan kinerja interim tahun 2025 dengan menyajikan penjelasan terkait adanya penambahan indikator kinerja pada tahun bersangkutan;	Triwulan I - 4 2025	Menyusun laporan kinerja interim tahun 2025 dengan menyajikan penjelasan terkait adanya penambahan indikator kinerja pada tahun bersangkutan;
2	Memastikan keselarasan penyajian realisasi kinerja pada SKP Pimpinan, Laporan Evaluasi Internal, dan Laporan Kinerja berdasarkan data sumber yang valid	Melakukan verifikasi/reviu berjenjang sesuai SOP penyusunan data kinerja terhadap realisasi kinerja pada pada data sumber, laporan ebaluasi internal, dan laporan kinerja	Triwulan I - 4 2025	Melakukan verifikasi/reviu berjenjang sesuai SOP penyusunan data kinerja terhadap realisasi kinerja pada pada data sumber, laporan evaluasi internal, dan laporan kinerja

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Timeline	Realisasi TW III 2025
		Melakukan verifikasi/reviu berjenjang sesuai SOP penyusunan data kinerja terhadap Sasaran Kinerja Pegawai Inspektur I dan Inspektur II, Laporan Evaluasi Internal, dan Laporan Kinerja interim		Melakukan verifikasi/reviu berjenjang sesuai SOP penyusunan data kinerja terhadap Sasaran Kinerja Pegawai Inspektur I dan Inspektur II, Laporan Evaluasi Internal, dan Laporan Kinerja
3	Menyusun Laporan Kinerja Interim dengan menyajikan perbandingan realisasi kinerja triwulan bersangkutan dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya	Menyusun Laporan Kinerja Interim Tahun 2025 dengan menyajikan perbandingan realisasi kinerja triwulan bersangkutan dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya	Triwulan I - 4 2025	Menyusun Laporan Kinerja Interim Tahun 2025 dengan menyajikan perbandingan realisasi kinerja triwulan bersangkutan dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal				
1	Merencanakan pengembangan kompetensi personil Tim Penyusun Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja terkait implementasi SAKIP	Menjadwalkan pengembangan kompetensi SAKIP pada tim penyusun Laporan Kinerja di IDEAS	Triwulan I 2025	Menjadwalkan pengembangan kompetensi SAKIP pada tim penyusun Laporan Kinerja di IDEAS
2	Memastikan keselarasan penyajian rencana tindak lanjut/rencana aksi pada Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja Interim;	Melakukan verifikasi/reviu berjenjang sesuai SOP penyusunan data kinerja terhadap penyajian rencana tindak lanjut/rencana aksi pada laporan evaluasi internal dan laporan kinerja interim	Triwulan I - 4 2025	Melakukan verifikasi/reviu berjenjang sesuai SOP penyusunan data kinerja terhadap penyajian rencana tindak lanjut/rencana aksi pada laporan evaluasi internal dan laporan kinerja interim
3	Menyusun Laporan Evaluasi Internal sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan SAKIP BPOM yaitu menyajikan:	Menyusun laporan evaluasi internal dengan menyajikan analisis capaian target output beserta kendala dan rencana tindak lanjutnya	Triwulan I - 4 2025	Menyusun laporan evaluasi internal dengan menyajikan analisis capaian target output beserta kendala dan rencana tindak lanjutnya
	1) Analisis capaian target output beserta identifikasi kendala/hambatan, rencana tindak lanjutnya	Monitoring tindak lanjut atas rencana aksi periode sebelumnya		Monitoring tindak lanjut atas rencana aksi periode sebelumnya
	2) Monitoring tindak lanjut atas rencana aksi periode sebelumnya			

2. Menyusun laporan kinerja interim tahun 2025 dengan menyajikan penjelasan terkait adanya penambahan indikator kinerja pada tahun bersangkutan.
3. Menyusun penyesuaian Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja TA 2025.
4. Memastikan pengukuran dan pelaporan data kinerja telah handal dan tepat waktu setiap bulan dan triwulan.
5. Memastikan keselarasan data kinerja yang dilaporkan dalam SIMETRIS, Laporan Evaluasi Internal, Laporan Kinerja Interim setiap bulan dan triwulan.
6. Meningkatkan kompetensi pegawai Inspektorat Utama dengan mengikuti bimtek SAKIP secara mandiri melalui IDEAS.
7. Membentuk *sites* SAKIP pada https://bit.ly/sakipcorner dalam rangka pengumpulan dan pengukuran data kinerja .
8. Menyusun manual indikator kinerja dengan perjanjian kinerja yang sudah direvisi sebagai pedoman pengukuran kinerja.

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp216.000 atau 100% dari pagu sebesar Rp216.000. Selanjutnya, dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja menggunakan pagu dan realisasi anggaran berdasarkan rencana penarikan dana (RPD),** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 25 Efisiensi Capaian kinerja IKSP.3 Nilai AKIP Inspektorat Utama TW III 2025

Indikator Kinerja	Dalam ribuan rupiah		Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran						
Nilai AKIP Inspektorat Utama	216	216	100,00%	*diukur pada TW IV	-	1	-	Belum dapat disimpulkan

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai capaian kinerja adalah **belum dapat disimpulkan.** Hal ini dikarenakan capaian kinerja **baru dapat diukur pada akhir tahun 2025.**
Anggaran yang telah terealisasi tersebut digunakan untuk mendukung terlaksananya kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas, Laporan Tahunan, Laporan Pengawasan, dan Laporan Lainnya yang diharapkan dapat berdampak positif pada pencapaian target kinerja di akhir periode TA 2025.

Rencana tindak lanjut Inspektorat Utama hingga akhir tahun adalah:

1. Menyusun laporan kinerja interim tahun 2025 dengan menyajikan penjelasan terkait adanya penambahan indikator kinerja pada tahun bersangkutan.
2. Menyusun rencana kinerja Inspektorat Utama Tahun 2026.
3. Menyusun rancangan rencana strategis Inspektorat Utama dengan penambahan indikasi dan perlakuan risiko pada sasaran program.
4. Memastikan pengukuran dan pelaporan data kinerja telah handal dan tepat waktu setiap bulan dan triwulan.
5. Memastikan keselarasan data kinerja yang dilaporkan dalam SIMETRIS, Laporan Evaluasi Internal, Laporan Kinerja Interim setiap bulan dan triwulan.
6. Meningkatkan kompetensi pegawai Inspektorat Utama dengan mengikuti bimtek SAKIP secara mandiri melalui IDEAS.
7. Menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja sesuai pedoman SAKIP.

IKSP.4 Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama

Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama adalah penilaian terhadap kinerja anggaran Inspektorat Utama yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA (bobot 10%)
2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
4. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
7. Capaian Output (bobot 25%)
8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:

1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)
2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

Capaian indikator Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama dapat dihitung dengan rumus berikut:

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) = (Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%)
Inspektorat Utama

Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran:

Nilai	Kategori	Konversi NIlai
0 s.d. 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d. 60	Kurang	2
60,01 s.d. 80	Cukup	3
80,01 s.d. 90	Baik	4
90,01 s.d. 100	Sangat Baik	5

Tabel 26 Capaian kinerja IKSP.4 Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama TW III 2025

Sasaran Program	Indikator	Baseline TW II 2025	Triwulan III 2025				Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target	Capaian (%)	Kategori
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	*Diukur pada akhir TW IV 2025	-	*Diukur pada Akhir TW IV 2025	-	-	5	-	-

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi kinerja indikator Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama triwulan III tahun 2025 belum dapat diketahui karena pengukuran kinerja baru dilakukan pada akhir triwulan IV 2025. Sehingga realisasi **belum dapat dibandingkan pada target triwulan III 2025 maupun target akhir tahun 2025.**

Indikator ini merupakan indikator keberlanjutan dari periode rencana strategis Inspektorat Utama periode 2020-2024. Pada akhir periode rencana strategis Inspektorat Utama 2020-2024, Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama **mencapai target** dengan nilai 98,75. Pada triwulan III 2025, Inspektorat Utama melaksanakan rencana aksi sebagai upaya mencapai target pada akhir tahun 2025. **Upaya yang dilakukan pada triwulan III 2025** adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi antar PPK, dan PPK dengan pengelola kegiatan, dalam melakukan pengawasan, perhitungan, dan pelaporan data capaian output.
2. Monitoring realisasi anggaran, progres capaian output, dan penyelesaian tagihan.

3. Monitoring realisasi anggaran dan progress pencapaian Rincian Output;
4. Menjaga ketercapaian volume dan indikator kinerja output.
5. Revisi halaman III DIPA sesuai batas waktu yang ditentukan.
6. Reviu berjenjang atas proses administrasi penyelesaian tagihan.

Pada indikator ini, **realisasi anggaran berdasarkan Aplikasi SAKTI** bulan September 2025 adalah sebesar Rp7.515.695.671 atau 80,99% dari pagu sebesar Rp9.279.353.000**. Selanjutnya, dilakukan analisis efisiensi** terhadap capaian kinerja menggunakan realisasi dan pagu anggaran **berdasarkan rencana penarikan dana (RPD),** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 27 Efisiensi Capaian kinerja IKSP.4 Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama TW III 2025

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	9,279,353	7,515,695	80.99%	*diukur pada TW IV 2025	-	1	-	belum dapat disimpulkan

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai capaian kinerja adalah **belum dapat disimpulkan.** Hal ini dikarenakan capaian kinerja **baru dapat diukur pada akhir tahun 2025.**

Realisasi anggaran **mendukung pada terlaksananya kegiatan** pengadaan alat pengolah data, penatausahaan barang milik negara inspektorat utama, penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran, administrasi kegiatan, administrasi keuangan, pembayaran gaji dan tunjangan, pengadaan fasilitas perkantoran, dan Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan.

Rencana tindak lanjut Inspektorat Utama pada triwulan IV 2025 adalah:

1. Meningkatkan koordinasi antar PPK, dan PPK dengan pengelola kegiatan, dalam melakukan pengawasan, perhitungan, dan pelaporan data capaian output.
2. Monitoring realisasi anggaran, progres capaian output, dan penyelesaian tagihan.
3. Monitoring realisasi anggaran dan progress pencapaian Rincian Output.

4. Menjaga ketercapaian volume dan indikator kinerja output.
5. Revisi halaman III DIPA sesuai batas waktu yang ditentukan.
6. Reviu berjenjang atas proses administrasi penyelesaian tagihan.
7. Implementasi kegiatan berdasarkan Langkah-Langkah Akhir Tahun (LLAT) 2025 sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-17/PB/2025 tentang Langkahlangkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran.

IKSP.5 Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
Risk Naive	Manajemen risiko tergantung pada individu perorangan
Risk Aware	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
Risk Defined	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.
Risk Managed	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan
Risk Enabled	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada di atas batas yang ditetapkan

Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:

1. Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan
2. Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko
3. Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko

Sebagai informasi, pada rancangan Renstra Inspektorat Utama tahun 2025-2029, telah dilakukan penyesuaian target pada indikator “Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama”. Hal ini dilakukan dengan

mempertimbangkan lingkungan dan kondisi eksternal yang dapat mempengaruhi manajemen risiko (seperti perubahan regulasi, ancaman baru, atau faktor eksternal lainnya).

Tabel 28 Matriks penyesuaian target 2025 indikator "Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama"

Semula		Menjadi		Justifikasi
Indikator	**Target 2025**	**Indikator**	**Target 2025**	
Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	3,4	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	3,39	Adanya penyesuaian target pada tahun 2025 dengan mempertimbangkan lingkungan dan kondisi eksternal yang dapat mempengaruhi manajemen risiko (seperti perubahan regulasi, ancaman baru, atau faktor eksternal lainnya) bisa mempengaruhi kebutuhan untuk perubahan. Dengan peningkatan yang stabil dan terukur 0,05 poin per tahun, organisasi memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi tanpa harus merombak seluruh sistem secara drastis.

Penyesuaian ini juga berlaku terhadap indikator indeks manajemen risiko tingkat Eselon II di Lingkup Inspektorat Utama. Penyesuaian target dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 29 Matriks Penyesuaian Target 2025 Indeks Manajemen Risiko pada Tingkat Eselon II lingkup Inspektorat Utama

Semula		Menjadi		Justifikasi
Indikator	**Target 2025**	**Indikator**	**Target 2025**	
Indeks Manajemen Risiko Inspektorat I	3,6	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat I	3,64	Adanya penyesuaian target pada tahun 2025 dengan mempertimbangkan lingkungan dan kondisi eksternal yang dapat mempengaruhi manajemen risiko (seperti perubahan regulasi, ancaman baru, atau faktor eksternal lainnya) bisa mempengaruhi kebutuhan untuk perubahan. Dengan peningkatan yang stabil dan terukur 0,05 poin per tahun, organisasi memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi tanpa harus merombak seluruh sistem secara drastis.
Indeks Manajemen Risiko Inspektorat II	3,2	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat II	3,24	

Atas dasar penyesuaian tersebut, berikut capaian kinerja pada indikator Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama sebagaimana berikut:

Tabel 30 Capaian kinerja IKSP.5 Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama TW III 2025

Sasaran Program	Indikator	Baseline TW II 2025	Triwulan III 2025				Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target	Capaian (%)	Kategori
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	*Diukur pada Akhir TW IV 2025	-	*Diukur pada Akhir TW IV 2025	-	-	3,39	-	-

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi kinerja indikator Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama triwulan III tahun 2025 belum dapat diketahui karena pengukuran kinerja baru dilakukan pada akhir triwulan IV

2025. Sehingga realisasi **belum dapat dibandingkan pada target triwulan III 2025 maupun target akhir tahun 2025.**

Indikator ini merupakan indikator baru pada rencana strategis Inspektorat Utama periode 2025-2029. Pada triwulan III 2025, Inspektorat Utama melaksanakan rencana aksi sebagai upaya mencapai target pada akhir tahun 2025. **Upaya yang dilakukan pada triwulan III 2025** adalah melakukan penerapan manajemen risiko di lingkup Inspektorat Utama dan melaksanakan rencana aksi yang telah disusun terhadap hasil evaluasi manajemen risiko tahun 2024. Kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penerapan manajemen risiko di lingkup Inspektorat Utama.
2. Melaksanakan rencana aksi pada rencana tindak lanjut yang telah disusun:
    a. Melakukan reviu terhadap daftar risiko yang telah disusun sehingga uraian risk event lebih spesifik dan bukan negasi (kebalikan) dari tujuan, serta penyebab dan akibat yang relevan;
    b. Melakukan reviu terhadap atribut pengendalian dengan tujuan selaras dengan aktivitas pengendalian;
    c. Melakukan reviu tindakan mitigasi dalam Rencana Tindak Pengendalian (RTP);
    d. Melakukan reviu terhadap penilaian risiko dengan memastikan kesesuaian antara kesimpulan efektivitas pengendalian dengan penurunan level risiko;
    e. Mengidentifikasi risiko dengan mempertimbangkan seluruh isu internal dan isu eksternal;
    f. Melaksanakan pengujian aktivitas pengendalian untuk risiko dengan level risiko inheren tinggi dan sangat tinggi;
    g. Melakukan reviu Rencana Tindak Pengendalian (RTP) secara berkala minimal dua kali dalam satu tahun;
    h. Menyusun dan menetapkan uraian tugas terkait tanggung jawab untuk penentuan, penilaian, dan pengelolaan manajemen risiko pada SKP seluruh pegawai yang terlibat dalam tim penyelenggara/pengelola manajemen risiko sesuai Surat Keputusan Sestama tentang Tim Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern BPOM.
3. Melaporkan daftar risiko semester II tahun 2025 pada SAPA APIP.
4. Melaksanakan reviu, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan manajemen risiko di lingkungan Inspektorat Utama tahun 2025.

5. Melakukan penilaian mandiri maturitas manajemen risiko tahun 2025 melalui pengisian Kertas Kerja Evaluasi (KKE) dan pengumpulan data dukung.

Pada indikator ini, dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran maka indikator ini **dilakukan tanpa adanya anggaran**. Sehingga pada indikator Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama tidak dapat dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja**.

Rencana tindak lanjut Inspektorat Utama pada triwulan IV 2025 adalah:

1. Melakukan penerapan manajemen risiko di lingkup Inspektorat Utama.
2. Melaksanakan reviu, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan manajemen risiko di lingkungan Inspektorat Utama tahun 2025.
3. Mengikuti desk penilaian tingkat maturitas manajemen risiko di lingkungan Inspektorat Utama tahun 2025.

3.1.2 Capaian Sasaran Program 2 – Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien

Sebagaimana dijelaskan pada Bab 2. Terdapat perubahan nomenklatur Sasaran Program ini dengan penambahan kata "intern" untuk dapat menggambarkan tugas utama Inspektorat Utama sebagai pengawasan intern. Dari yang semula "Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan yang efektif dan efisien" menjadi "Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan **intern** yang efektif dan efisien". Pencapaian sasaran program "Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien" diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja, yaitu: (1) Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama; (2) Persentase rekomendasi pengawasan *assurance* yang ditindaklanjuti; (3) Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu; dan (4) Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu. Indikator-indikator ini mengalami penyesuaian baik dari segi nomenklatur dan juga manual IKU sebagaimana telah disampaikan pada Bab 2. Untuk lebih rincinya akan diperjelas pada masing-masing poin capaian indikator kinerja pada poin berikutnya.

Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel berikut.

Tabel 31 Capaian Sasaran Program 2 Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien

No	Sasaran Program	Indikator	Baseline TW II 2025	Triwulan III 2025			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
2	Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	-		*Diukur pada Akhir TW IV 2025	-	-
		Persentase rekomendasi pengawasan *assurance* yang ditindaklanjuti	95,99%	92%	95.46%	103.76%	Sangat Baik
		Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%	98%	100%	102.04%	Sangat Baik

No	Sasaran Program	Indikator	Baseline TW II 2025	Triwulan III 2025			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	63,63%	80%	93.75%	117.19%	Tidak Dapat Disimpulkan

IKSP.6 Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama

Indeks kepuasan mitra pengawasan intern merupakan suatu pengukuran melalui survei untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan pengawasan yang mendapatkan penilaian positif dari mitra Inspektorat Utama berupa tingkat kepuasan satuan kerja/unit kerja atas pengawasan intern yang telah diberikan Inspektorat Utama. Indikator Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama mengalami penyesuaian dari Sasaran Program 3 menjadi Sasaran Program 2 sesuai surat dari Sekretaris Utama nomor PR.07.2.08.25.451 hal Permintaan Revisi PK dan RAPK 2025. Hal ini dilakukan karena indikator ini dinilai lebih menggambarkan Sasaran Program 2 yakni Meningktnya kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien.

Konsep yang digunakan dalam menyusun survei kepuasan mitra pengawasan intern adalah *Service Quality* (ServQual) yang merupakan salah satu konsep layanan jasa yang diberikan organisasi. ServQual memiliki lima aspek utama, yakni *Reliability, Assurance, Tangible, Empathy,* dan *Responsiveness* (RATER) sebagai berikut:

1. **Keandalan (*Reliability*)**; Elemen ini merujuk pada kemampuan Inspektorat Utama memberikan layanan secara akurat kepada mitra pengawasan intern. Produk dan layanan Inspektorat Utama dapat diakses oleh mitra pengawasan intern kapan saja dan di mana saja.
2. **Jaminan (*Assurance*)**; Elemen ini mengacu pada kemampuan Inspektorat Utama untuk menumbuhkan kepercayaan mitra pengawasan intern.
3. **Wujud Fisik (*Tangible*)**; Elemen ini mengacu pada segala sesuatu yang bersifat wujud fisik dan memengaruhi kualitas layanan kepada mitra pengawasan intern.
4. **Empati (*Empathy*)**; Elemen ini mengacu pada perhatian Inspektorat Utama pada mitra pengawasan intern. Praktik empati bisa diwujudkan dengan mendengarkan dan membantu menemukan solusi atau memahami.
5. **Kesigapan (*Responsiveness*)**; Elemen ini mengacu pada bentuk tindakan Inspektorat Utama dalam merespons mitra pengawasan intern secara tepat waktu

Tabel 32 Capaian Kinerja IKSP.6 Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama TW III 2025

Sasaran Program	Indikator	TW II 2025	Triwulan III 2025				Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target	Capaian (%)	Kategori
Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	*Diukur pada Akhir TW IV 2025	-	*Diukur pada Akhir TW IV 2025	-	-	88,28	-	-

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi kinerja indikator Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama triwulan III tahun 2025 belum dapat diketahui karena pengukuran kinerja baru dilakukan pada akhir triwulan IV 2025. Sehingga realisasi **belum dapat dibandingkan pada target triwulan III 2025 maupun target akhir tahun 2025.** Indikator ini merupakan indikator keberlanjutan dari periode rencana strategis Inspektorat Utama periode 2020-2024.

Pada triwulan III 2025, Inspektorat Utama melaksanakan rencana aksi sebagai upaya mencapai target pada akhir tahun 2025. **Upaya yang telah dilakukan pada triwulan III 2025** adalah:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengawasan terhadap mitra pengawasan dengan menindaklanjuti rencana aksi yang telah disusun
2. Melakukan persiapan pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Inspektorat Utama BPOM Tahun 2025.

Salah satu yang menjadi isu dari survei kepuasan mitra pengawasan adalah kecepatan dalam pelayanan SOLUSI. Pada Triwulan III, telah terjadi perbaikan dengan rata-rata penyelesaian SOLUSI berada di kisaran 2 hari dari standar 5 hari menurut Standar Pelayanan yang ditetapkan. Hal ini menjadi komitmen Inspektorat Utama untuk menjaga marwah dari SOLUSI untuk tetap kredibel namun tetap mendukung harapan dari mitra pengawasan.

Pada indikator ini, realisasi anggaran berdasarkan Aplikasi SAKTI bulan September 2025 adalah sebesar Rp252.411.686 atau 76,39% dari pagu sebesar Rp330.417.000. Selanjutnya, dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja menggunakan pagu anggaran berdasarkan Rencana Penarikan Dana (RPD)** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 33 Capaian Efisiensi IKSP.6 Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama TW III 2025

Indikator Kinerja	Dalam ribuan rupiah		Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran						
Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	330,417,000	252,411,686	76.39%	*diukur pada TW IV 2025	-	1	-	Belum dapat disimpulkan

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah **belum dapat disimpulkan**, dikarenakan capaian kinerja baru dapat diukur pada akhir tahun 2025. Realisasi anggaran **mendukung pada terlaksananya kegiatan** asistensi dalam rangka persiapan pemeriksaan BPK, bimbingan teknis pimpinan, penyusunan laporan BMN dan keuangan Inspektorat Utama.

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Utama pada triwulan selanjutnya sampai pada akhir tahun adalah

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengawasan terhadap mitra pengawasan dengan menindaklanjuti rencana aksi yang telah disusun
2. Pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Inspektorat Utama BPOM Tahun 2025.
3. Melakukan pelaporan hasil survei Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Inspektorat Utama BPOM Tahun 2025 kepada pimpinan.

Inspektorat Utama melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern berdasarkan Surat Inspektur Utama Nomor B-PI.06.07.7.10.25.345 hal Survei Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025. Hal ini menjadi kesinambungan

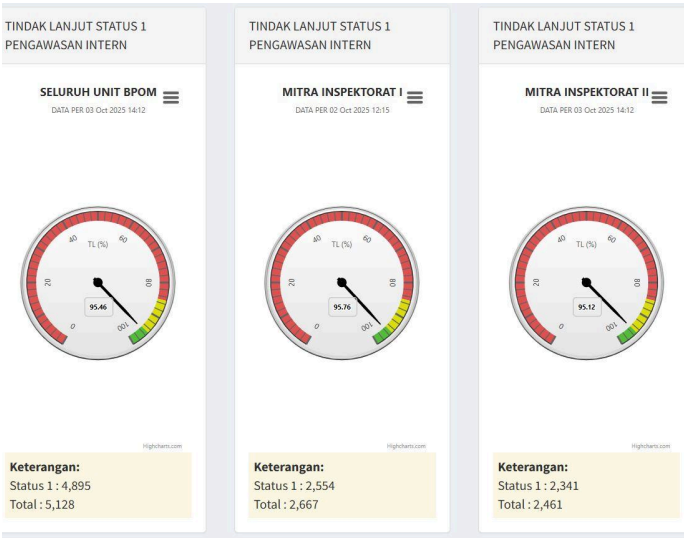
pengukuran yang sejalan dengan prinsip *continuous improvement* sebagaimana dinyatakan dalam Sistem Manajemen Terintegrasi yang diakui oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.

IKSP.7 Persentase rekomendasi pengawasan *assurance* yang ditindaklanjuti

Inspektorat Utama sesuai tugas dan fungsinya, pemantauan secara berkesinambungan atas hasil pengawasan intern yang dilakukan, yang difokuskan pada penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan serta pelaksanaan mulai dari tahap perencanaan anggaran sampai dengan tindak lanjut hasil evaluasi. Persentase rekomendasi pengawasan assurance yang ditindaklanjuti dihitung dari jumlah rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti sesuai saran dan tidak dapat ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah total rekomendasi pengawasan intern. Indikator kinerja ini mengalami penyesuaian nomenklatur dari "Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti" menjadi "Persentase rekomendasi pengawasan ***assurance*** yang ditindaklanjuti". Hal ini dilakukan sebagai langkah untuk dapat menggambarkan tugas pokok Inspektorat Utama sebagai *assurance*.

Tabel 34 Capaian Kinerja IKSP.7 Persentase rekomendasi pengawasan assurance yang ditindaklanjuti TW III 2025

Sasaran Program	Indikator	Baseline TW II 2025	Triwulan III 2025				Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target	Capaian (%)	Kategori
Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase rekomendasi pengawasan *assurance* yang ditindaklanjuti	95,99%	92%	95.46%	103.76%	Sangat Baik	92.69%	102.99%	Melampaui



Gambar 7 Digitalisasi rekomendasi pengawasan *assurance* yang ditindaklanjuti melalui aplikasi SAPA APIP

Pada tabel dan gambar di atas realisasi persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti pada triwulan III 2025 yaitu sebesar 95,46% **telah mencapai** target triwulan III 2025 dan masuk dalam Kategori **"Sangat Baik". Jika dibandingkan dengan triwulan II**, capaian kinerja di triwulan III tahun 2025 **menurun sebesar 1,76 poin**. Apabila **dibandingkan dengan target akhir tahun 2025** yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja Inspektorat Utama maka realisasi masuk pada kategori **"Melampaui".** Indikator ini merupakan indikator keberlanjutan dari periode rencana strategis Inspektorat Utama periode 2020-2024. Pada akhir periode rencana strategis Inspektorat Utama 2020-2024, persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti **tidak mencapai target** dengan nilai 90,75%. Pada triwulan III 2025, Inspektorat Utama melaksanakan rencana aksi sebagai upaya mencapai target pada akhir tahun 2025. **Upaya yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan mencapai target pada triwulan III 2025** adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemantauan maupun evaluasi tindak lanjut atas laporan hasil audit dilakukan paralel dengan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK;
2. Penyusunan laporan pengawasan yang meliputi audit, pemantauan tindak lanjut temuan, reviu, evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pengawasan lainnya, yang menjadi kompilasi dari hasil pengawasan sehingga mempermudah pemantauan hasil pengawasan intern yang dilakukan;

3. Penyampaian tindak lanjut dan pelaksanaan evaluasi tindak lanjut melalui aplikasi berbasis web yaitu aplikasi SAPA APIP sehingga mempermudah bagi *auditee* untuk melakukan tindak lanjut di manapun dan kapanpun.
4. Secara konsisten mengawal tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan intern sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan pada Sistem Manajemen Mutu;
5. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam monitoring dan evaluasi serta menyempurnakan integrasi data pengawasan intern serta fitur aplikasi berbasis web "Sapa APIP". Dengan dimanfaatkannya aplikasi tersebut, audit dan proses tindak lanjutnya dapat dilakukan melalui aplikasi, sehingga memberi kontribusi langsung pada percepatan penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan intern oleh unit kerja auditan;
6. Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut APIP secara berkala setiap bulan.
7. Melakukan rapat koordinasi penyamaan persepsi tindak lanjut APIP guna menentukan *action plan*, dan koordinasi antar tim setiap bulan
8. Pengiriman surat setiap triwulan ke *auditee* yang memiliki persentase tinggi untuk temuan yang belum ditindaklanjuti untuk dapat mengakselerasi pemenuhan tindak lanjut.

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp 521.739.562 atau 82.23% dari pagu sebesar Rp 626.865.000. Selanjutnya, dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja menggunakan pagu anggaran berdasarkan Rencana Penarikan Dana (RPD)** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 35 Capaian Efisiensi IKSP.7 Persentase Rekomendasi Pengawasan Assurance yang Ditindaklanjuti TW III 2025

Indikator Kinerja	Dalam ribuan rupiah		Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran						
Persentase rekomendasi pengawasan assurance yang ditindaklanjuti	626,865	521,739	83.23%	103.76%	1.25	1	0.25	Efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah **efisien**, dikarenakan capaian kinerja melebihi dari capaian anggaran. Hal yang diupayakan dalam rangka efisiensi anggaran adalah

dengan memanfaatkan teknologi seperti rapat koordinasi, pemantauan secara berkala dan monitoring terhadap rekomendasi yang belum ditindaklanjuti.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Inspektorat Utama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja untuk menjaga ketercapaian target di triwulan IV 2025 adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan laporan pengawasan yang meliputi audit, pemantauan tindak lanjut temuan, reviu, evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pengawasan lainnya, yang menjadi kompilasi dari hasil pengawasan sehingga mempermudah pemantauan hasil pengawasan intern yang dilakukan;
2. Penyampaian tindak lanjut dan pelaksanaan evaluasi tindak lanjut melalui aplikasi berbasis web yaitu aplikasi SAPA APIP sehingga mempermudah bagi *auditee* untuk melakukan tindak lanjut di manapun dan kapanpun.
3. Secara konsisten mengawal tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan intern sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan pada Sistem Manajemen Mutu;
4. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam monitoring dan evaluasi serta menyempurnakan integrasi data pengawasan intern serta fitur aplikasi berbasis web “Sapa APIP”. Dengan dimanfaatkannya aplikasi tersebut, audit dan proses tindak lanjutnya dapat dilakukan melalui aplikasi, sehingga memberi kontribusi langsung pada percepatan penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan intern oleh unit kerja auditan;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut APIP secara berkala setiap bulan.
6. Mengintegrasikan kertas kerja pengecekan pemenuhan tindak lanjut sebagai kertas kerja capaian Indikator Kinerja Individu masing-masing pegawai.

IKSP.8 Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu

Indikator Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu mengalami penyesuaian nomenklatur sebagaimana dijelaskan pada Bab 2. Penyesuaian dilakukan pada kata yang semula “konsultasi’ menjadi “konsultansi” sebagaimana penggunaan kata yang sudah disepakati oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI). Inspektorat Utama sebagai bagian dari Asosiasi tersebut juga berusaha adaptif

terhadap segala perubahan yang kian dinamis. Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semakin strategis dan bergerak mengikuti kebutuhan zaman. APIP dituntut menjadi agen perubahan yang mampu menciptakan nilai tambah pada produk atau layanan instansi pemerintah. APIP sebagai pengawas intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik (*good governance*) dan mengarah pada pemerintahan/birokrasi yang bersih (*clean government*). Pengawasan intern telah mengalami perubahan paradigma. Konsep *watchdog* yang semata-mata fokus pada upaya mencari kesalahan yang terjadi pada proses yang telah berjalan menjadi tidak relevan dalam memberikan dukungan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Sebagai salah satu upaya transformasi APIP untuk menjadi *Trusted Advisor*, pada tahun 2019 sampai dengan saat ini, telah dilakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi SOLUSI (Saluran Online Layanan Untuk Konsultasi), sebagai saluran komunikasi yang kredibel, komprehensif, aman, *up to date* dan informatif yang mudah diakses oleh seluruh ASN Badan POM. Aplikasi SOLUSI dapat diakses oleh seluruh ASN BPOM pada laman https://solusi.pom.go.id.

Tabel 36 Capaian Kinerja IKSP.8 Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu TW III 2025

Sasaran Program	Indikator	Baseline TW II 2025	Triwulan III 2025				Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target	Capaian (%)	Kategori
Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%	98%	100%	102.04%	Sangat Baik	100%	100.00%	Melampaui

Dari tabel di atas, pada triwulan III tahun 2025 realisasi Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu yaitu sebesar 100%, dimana sudah mencapai target yang dijanjikan pada triwulan III tahun 2025 yaitu sebesar 98%, dengan nilai pencapaian indikator 102,04% dan masuk dalam kategori "Sangat Baik". **Jika dibandingkan dengan Triwulan II,** realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 memiliki realisasi kinerja

yang sama. Hal ini menunjukan bahwa proses penelaahan atas pertanyaan pada SOLUSI sudah efektif. **Selanjutnya jika dibandingkan dengan target akhir tahun 2025,** realisasi kinerja sudah mampu mencapai target sampai dengan akhir tahun 2025 sebesar 100% dengan kategori **"Tercapai"**.

Indikator ini merupakan indikator keberlanjutan dari periode rencana strategis Inspektorat Utama periode 2020-2024. Pada akhir periode rencana strategis Inspektorat Utama 2020-2024, Indikator Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu **mencapai target** dengan nilai 100%. Pada triwulan III 2025, Inspektorat Utama melaksanakan rencana aksi sebagai upaya mencapai target pada triwulan III 2025 dan akhir tahun 2025. **Upaya yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan mencapai target pada triwulan III 2025** adalah

1. Melakukan pengembangan aplikasi SOLUSI agar lebih mengakomodir hal-hal pendukung yang dibutuhkan APIP dalam menjawab pertanyaan, pemantauan dan menjawab pertanyaan SOLUSI max 5 HK, serta memfasilitasi SDM BPOM dalam melakukan konsultasi dengan mudah.
2. Mendorong Tim Kerja untuk mengakselerasi penyelesaian SOLUSI sesuai dengan kebutuhan mitra pengawasan sehingga menghasilkan capaian rata-rata penyelesaian di level 2 hari. Selain itu pelaksanaan SOLUSI juga mengoptimalkan skema konsultasi yang dimiliki oleh pemilik kebijakan seperti fitur HaiDPJb Kementerian Keuangan.

Hal ini didukung oleh komitmen APIP dalam menjawab pertanyaan konsultansi yang masuk dengan tepat waktu. Proses menjawab pertanyaan melalui aplikasi SOLUSI dilakukan dengan reviu berjenjang yang melibatkan anggota, ketua tim, sampai dengan pengendali teknis. Dengan demikian, diharapkan setiap jawaban yang diberikan diharap sudah mampu memberikan kepuasan bagi mitra pengawasan yang mengajukan pertanyaan.

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp 1.520.000 atau 9.41% dari pagu sebesar Rp 16.155.000. Selanjutnya, dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja menggunakan pagu anggaran berdasarkan Rencana Penarikan Dana (RPD)** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 37 Capaian Efisiensi IKSP.8 Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu TW III 2025

Indikator Kinerja	Dalam ribuan rupiah		Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran						
Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	16,155	1,520	9.41%	102.04%	10.85	1	9.85	Efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah **efisien**, dikarenakan capaian kinerja melebihi dari capaian anggaran. upaya yang dilakukan dalam efisiensi anggaran adalah dengan memanfaatkan teknologi dalam berkoordinasi, melakukan pemantauan atau monitoring dan reviu berjenjang. **Rencana tindak lanjut yang dilakukan pada** indikator Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu adalah:

1. Melakukan pengembangan aplikasi SOLUSI agar lebih mengakomodir hal-hal pendukung yang dibutuhkan APIP dalam menjawab pertanyaan, pemantauan dan menjawab pertanyaan SOLUSI max 5 HK, serta memfasilitasi SDM BPOM dalam melakukan konsultasi dengan mudah
2. mengoptimalkan pengetahuan melalui skema Agen Perubahan dengan Palugada sebagai bank pengetahuan serta mendorong penyelesaian untuk dipertahankan di level yang diharapkan seperti saat ini.

IKSP.9 Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM No. 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan POM, pemohon dapat melakukan pengaduan atas pelaksanaan Pelayanan Publik di lingkungan Badan POM. Pengaduan terdiri atas:

- Pemberian informasi adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pelaksana, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Pemohon/Negara; dan

- Permintaan klarifikasi, konfirmasi atau pengaduan terkait penyimpangan Pelayanan Publik di lingkungan Badan POM.

Sehubungan dengan nota dinas Sekretaris Utama nomor PR.08.02.21.09.25.308 hal Permintaan Pelaporan Capaian Kinerja dan Anggaran s.d Triwulan III Tahun 2025 poin 5, Inspektorat Utama melakukan perhitungan ulang terhadap realisasi indikator kinerja triwulan I dan triwulan II berdasarkan Manual IKU terbaru. Sebagai informasi, indikator kinerja sasaran program Inspektorat Utama yang mengalami perubahan manual IKU adalah indikator kinerja "**Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu**". Penyesuaian manual IKU sebagaimana disebutkan sebelumnya disampaikan pada tabel berikut:

Tabel 38. Matriks Semula Menjadi Manual IKU IKSP.9 Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu

Keterangan	Semula	Menjadi	Justifikasi
Definisi	Pengaduan adalah proses atau tindakan mengungkapkan keluhan, masalah, atau ketidakpuasan terhadap suatu hal kepada pihak yang berwenang atau yang dapat melakukan tindakan perbaikan. Pengaduan dapat berkaitan dengan layanan publik, produk, perilaku tidak etis, pelanggaran hukum, atau masalah lainnya yang mempengaruhi organisasi. Dalam hal ini pengaduan yang dimaksud adalah pengaduan masyarakat dan whistleblowing system. Pengaduan Masyarakat adalah bentuk penerapan dari pengawasan eksternal yang disampaikan oleh masyarakat atas ketidaksesuaian penyelenggara pelayanan dan / atau dugaan penyimpangan dan penyalahggunaan wewenang, serta permintaan klarifikasi maupun konfirmasi terhadap pelayanan. Whistleblowing system adalah sistem untuk memproses pengaduan/pemberian informasi yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung	Pengaduan adalah Pengaduan Berkadar Pengawasan yang isinya mengandung informasi atau adanya dugaan terjadinya Pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pengaduan bersumber dari *Whistleblowing System (WBS)* atau pengaduan Masyarakat. WBS adalah mekanisme penyampaian Pengaduan oleh Pegawai sebagai *whistleblower* terkait dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai atau melibatkan Pegawai. Pengaduan Masyarakat adalah bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai atau melibatkan Pegawai.	Disesuaikan dengan Peraturan BPOM No 3 Tahun 2024 tentang Penanganan pengaduan atas dugaan pelanggaran di lingkungan BPOM

<table>
<tr><th>Keterangan</th><th>Semula</th><th>Menjadi</th><th>Justifikasi</th></tr>
<tr><td></td><td>sehubungan dengan adanya perbuatan yang melanggar perundang-undangan, peraturan/standar, kode etik, kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di lingkungan Badan POM. Tindak lanjut penanganan pengaduan menjadi penting untuk menegaskan bahwa Inspektorat Utama berperan aktif untuk mewujdukan budaya pelayanan publik yang prima dan mewujudkan organisasi Badan POM yang bebas dari penyalahgunaan wewenang dan fraud.</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Cara Perhitungan</td><td>Jumlah pengaduan (pengaduan Masyarakat + whistleblowing system) yang ditindaklanjuti / jumlah pengaduan (pengaduan Masyarakat + whistleblowing system) x100%</td><td>Jumlah pengaduan yang layak ditindaklanjuti ATT (sesuai bobot) + jumlah pengaduan yang tidak layak ditindaklanjuti ATT (sesuai bobot) / Jumlah pengaduan x 100%.

Klasifikasi Bobot:
<table><tr><th rowspan="2">Tahap</th><th rowspan="2">Kegiatan</th><th rowspan="2">Detail</th><th colspan="2">Bobot</th></tr><tr><th>Layak</th><th>Tidak Layak</th></tr><tr><td>1</td><td>Telaah Awal (Dalam rangka menilai pemenuhan unsur 5W+1H termasuk komunikasi kepada pelapor untuk meminta kelengkapan informasi awal)</td><td>Simpulan Layak /tidak layak oleh tim GT yang menangani pengaduan</td><td>50</td><td>80</td></tr><tr><td>2</td><td>Arahan Inspektur Utama</td><td>Dispo Arahan Inspektur Utama</td><td>10</td><td>20</td></tr><tr><td>3</td><td>Pelaksanaan ATT</td><td>Sesuai Pedoman ATT</td><td>30</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>4</td><td>Penyusunan Laporan ATT</td><td>Penyusunan Draft Final ATT, Reviu Final oleh Irtama dan Laporan yang ditandatangani Irtama</td><td>10</td></tr></table></td><td>Lebih menggambarkan upaya yang dilakukan dalam menindaklanjuti setiap pengaduan</td></tr>
<tr><td>Catatan tambahan</td><td>a. Telah ditindaklanjuti (close) adalah tindak lanjut Inspektorat Utama atas pengaduan masyarakat yang dilaporkan kepada Pimpinan Badan POM;
b. Kriteria tindak lanjut Inspektorat Utama tertuang pada laporan, telaah, hasil kajian dan lain-lain yang memuat informasi pengaduan tersebut terbukti; tidak terbukti atau tidak dilanjutkan karena kurang barang bukti / identitas pelapor tidak jelas;
c. Periode pelaporan pengaduan</td><td>a. Pengaduan terdiri dari pengaduan masyarakat dan WBS.
b. Jangka waktu penanganan pengaduan harus dapat diselesaikan selama 90 hari kerja sejak diterimanya pengaduan, kecuali terdapat alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
c. Periode pelaporan pengaduan yang dihitung sebagai capaian kinerja adalah pengaduan yang diterima sejak hari kerja pertama bulan Oktober tahun sebelumnya sampai dengan akhir hari kerja bulan September tahun berjalan (Oktober Y-1 sampai dengan September Y); dan</td><td>Pengaduan telah ditindaklanjuti sudah tergambar pada tahap kegiatan 1-4</td></tr>
</table>

Keterangan	Semula	Menjadi	Justifikasi
	adalah pengaduan yang diterima sejak hari kerja pertama bulan Oktober tahun sebelumnya sampai dengan akhir hari kerja September tahun berjalan (Oktober Y-1 sampai dengan September Y); dan d. Jangka waktu penanganan pengaduan masyarakat/WBS harus dapat diselesaikan pada 90 hari kerja, kecuali terdapat alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.	d. Tahapan perhitungan realisasi kinerja dibagi menjadi 4 (empat) tahap dengan bobot realisasi kinerja dibagi menjadi 2 (dua) kriteria yaitu layak dan tidak layak untuk ditindaklanjuti sesuai tabel tersebut diatas.	

Berdasarkan penyesuaian manual IKU di atas, Perhitungan ulang indikator "**Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu"** pada triwulan I dan II adalah sebagai berikut:

Tabel 39. Perhitungan Ulang IKU Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu

Indikator Kinerja	Semula				Menjadi			
	Bulan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Bulan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	B01	-	-	-	B01	-	-	-
	B02	-	-	-	B02	-	-	-
	B03	50%	50,00%	100,00	B03	50%	86,67%	173,34
	B04	55%	66,67%	121,22	B04	55%	90,00%	163,63
	B05	60%	36,36%	60,60	B05	60%	58,18%	96,97
	B06	65%	63,63%	97,89	B06	65%	80,91%	124,48

Penyesuaian manual IKU dilakukan agar setiap tahapan dalam menindaklanjuti pengaduan dapat diukur dan dipantau sehingga lebih jelas dan tergambar proses tindak lanjut pengaduan. Hal ini terlihat dari realisasi yang meningkat setelah dilakukan penghitungan manual berdasarkan tahap tindak lanjut pengaduan.

Tabel 40 Capaian Kinerja IKSP.9 Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu TW III 2025

Sasaran Program	Indikator	Baseline TW II 2025	Triwulan III 2025				Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target	Capaian (%)	Kategori
Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan yang efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	80,91% (menggunakan perhitungan manual iku terbaru)	80%	93.75%	117.19%	Tidak dapat disimpulkan	100%	93.75%	Akan tercapai

Pada triwulan III tahun 2025, realisasi kinerja indikator persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai Kategori dan tepat waktu adalah 93,75% dengan capaian 117,19% dan termasuk dalam kategori **"Tidak dapat disimpulkan"**. Realisasi ini dicapai dengan total nilai 15 (lima belas) dari total 16 (enam belas) pengaduan yang masuk baik dari pengaduan maupun whistleblowing. **Jika dibandingkan dengan triwulan II tahun 2025 dengan realisasi yang menggunakan manual IKU terbaru,** realisasi kinerja meningkat sebesar 12,84 poin. Selanjutnya **Jika dibandingkan dengan target akhir tahun 2025,** realisasi kinerja masuk pada kategori **akan tercapai** untuk mencapai target sampai akhir tahun 2025.

Indikator ini merupakan indikator keberlanjutan dari periode rencana strategis Inspektorat Utama periode 2020-2024. Pada akhir periode rencana strategis Inspektorat Utama 2020-2024, Indikator persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai Kategori dan tepat waktu **tercapai target** dengan nilai 117,19%. Pada triwulan III 2025, Inspektorat Utama melakukan u**paya yang dilakukan dalam mencapai target pada triwulan III 2025 adalah:**

1. Melakukan telaah awal dan audit tujuan tertentu terhadap pengaduan yang belum selesai ditindaklanjuti;
2. Mengoptimalkan klarifikasi tindak lanjut hasil Pengaduan secara *online* kepada pihak terkait;
3. Pemutakhiran definisi operasional dan cara perhitungan IKU;
4. Melaksanakan bimbingan teknis aplikasi sang integritas kepada unit kerja di BPOM; dan

5. Publikasi materi terkait pengaduan masyarakat dan *whistleblowing system* pada media sosial.

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp 0 atau 0% dari pagu sebesar Rp 31.840.000. Selanjutnya, dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja menggunakan pagu anggaran berdasarkan Rencana Penarikan Dana (RPD)** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 41 Capaian Efisiensi IKSP.9 Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu TW III 2025

Indikator Kinerja	Dalam ribuan rupiah		Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran						
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	31.840	-	0,00%	117,19%	-	1	-	Belum dapat disimpulkan

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah **belum dapat disimpulkan**, dikarenakan belum adanya realisasi anggaran yang digunakan untuk menindaklanjuti pengaduan. **Upaya yang dilakukan dalam efisiensi anggaran** adalah dengan pemanfaatan teknologi dalam menindaklanjuti pengaduan, APIP mengefisiensikan sumber daya yaitu dengan konfirmasi online, lalu dilakukan telaah lebih lanjut melalui daring, baru melakukan luring terhadap hal yang penting dan perlu konfirmasi fisik, sehingga lebih efisien secara waktu dan anggaran.

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Utama dalam meningkatkan capaian indikator persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu, antara lain

1. Melakukan telaah awal dan audit tujuan tertentu terhadap pengaduan yang belum selesai ditindaklanjuti;
2. Mengoptimalkan klarifikasi tindak lanjut hasil Pengaduan secara *online* kepada pihak terkait;
3. Melaksanakan bimbingan teknis aplikasi sang integritas kepada unit kerja di BPOM; dan
4. Publikasi materi terkait pengaduan masyarakat dan whistleblowing system pada media sosial.

3.1.3 Capaian Sasaran Program 3 – Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional

Pencapaian sasaran program "Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional" diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu: (1) Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP; dan (2) Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama

Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel berikut.

Tabel 42 Capaian Kinerja Sasaran Program 3 Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional Triwulan III 2025

Sasaran Program	Indikator	Baseline TW II 2025	Triwulan III 2025			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	*Diukur pada akhir TW IV 2025	-	*Diukur pada Akhir TW IV 2025	-	-
	Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama	*Diukur pada akhir TW IV 2025	-	*Diukur pada Akhir TW IV 2025	-	-

IKSP.10 Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP

Kapabilitas APIP merupakan kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik dan menggambarkan jalur evolusi untuk organisasi sektor publik dalam mengembangkan pengawasan intern yang efektif untuk memenuhi persyaratan tata kelola organisasi dan harapan profesional. Kapabilitas APIP menunjukkan langkah-langkah untuk maju dari tingkat pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang kuat, efektif, kapabilitas pengawasan intern umumnya, terkait dengan organisasi yang lebih matang dan kompleks. Di dalam Internal Audit Capability Model (IA-CM), APIP dibagi menjadi lima level kapabilitas, yaitu Level 1 (*Initial*), Level 2 (*Infrastructure*), Level 3 (*Integrated*), Level 4 (*Managed*), dan Level 5 (*Optimizing*).

Indeks mengacu pada 6 elemen Kapabilitas APIP:

1. Peran dan layanan;
2. Pengelolaan SDM;

3. Praktik professional;
4. Akuntabilitas dan manajemen kinerja;
5. Budaya dan hubungan organisasi; dan
6. Struktur tata kelola

Sebagai informasi, pada rancangan Renstra Inspektorat Utama tahun 2025-2029 telah dilakukan penyesuaian nomenklatur dan target indikator tingkat Eselon II yang mendukung pada indikator "Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP". Penyesuaian ini dilakukan karena pada renstra Inspektorat Utama tahun 2025-2029 menggunakan *logical frame work*, sehingga indikator di Tingkat Eselon II, merupakan indikator dengan lingkup dipersempit dari indikator di Tingkat Eselon I. Penyesuaian dilakukan sebagai berikut:

Tabel 43 Matriks Penyesuaian Target dan Nomenklatur Indikator Tingkat Eselon II yang mendukung pada Indikator "Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP"

Semula		Menjadi		Justifikasi
Indikator	**Target 2025**	**Indikator**	**Target 2025**	
Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	3,9	Persentase pemenuhan dokumen Kapabilitas APIP pada wilayah pengawasan Inspektorat I/Inspektorat II yang sesuai standar	100%	Adanya penyesuaian target pada tahun 2025 dengan mempertimbangkan adanya perubahan dari *balance score card* ke *logical frame work*. Sehingga indikator harus mencakup ruang lingkup yang lebih sempit dari indikator di tingkat Eselon I.

Selanjutnya, dilakukan pengukuran terhadap indikator kinerja pada triwulan III tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 44 Capaian Kinerja IKSP.10 Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP TW III 2025

Sasaran Program	Indikator	Baseline TW II 2025	Triwulan III 2025				Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target	Capaian (%)	Kategori
Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	*Diukur pada akhir TW IV 2025	-	*Diukur pada Akhir TW IV 2025	-	-	3,9	-	-

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi kinerja indikator Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP pada triwulan III tahun 2025 belum dapat diketahui karena pengukuran kinerja baru dilakukan pada akhir triwulan IV 2025. Sehingga realisasi **belum dapat dibandingkan pada target triwulan III 2025 maupun target akhir tahun 2025.**

Upaya yang telah dilakukan pada triwulan III tahun 2025 adalah:

1. Melakukan *self assessment* penilaian kapabilitas APIP
2. Rapat koordinasi penilaian kapabilitas APIP
3. Menindaklanjuti rencana aksi yang telah disusun pada hasil rekomendasi evaluasi kapabilitas APIP tahun 2024
4. Menyusun kebijakan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan dalam rangka penerapan Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi di lingkungan BPOM.

Indikator ini merupakan indikator keberlanjutan dari periode rencana strategis Inspektorat Utama periode 2020-2024. Pada akhir periode rencana strategis Inspektorat Utama 2020-2024, Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP **mencapai target** dengan nilai 3,77.

Pada indikator ini, realisasi anggaran berdasarkan Aplikasi SAKTI bulan September 2025 adalah sebesar Rp117.541.663 atau 69,35% dari pagu sebesar Rp169.483.000. Selanjutnya, dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** menggunakan anggaran Rencana Penarikan Dana (RPD) pada TW III dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 45 Capaian Efisiensi IKSP.10 Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP TW III 2025

Indikator Kinerja	Dalam ribuan rupiah		Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran						
Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	169.483	117.541	69,35%	*diukur pada TW IV 2025	-	1	-	Belum dapat disimpulkan

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah **belum dapat disimpulkan**, dikarenakan capaian kinerja baru dapat diukur pada akhir tahun 2025. Realisasi anggaran **mendukung pada terlaksananya kegiatan** Koordinasi Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat, Pengelolaan Jabatan Fungsional, Rapat Kerja Rencana Pengawasan Internal Inspektorat Utama TA 2025, Penyusunan Analisis pengawasan intern / Tren Analisis Pemeriksaan, Rapat Evaluasi Tingkat Ittama.

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Utama pada triwulan selanjutnya sampai pada akhir tahun adalah:

1. Rapat koordinasi penilaian kapabilitas APIP
2. Melaksanakan penilaian kapabilitas APIP di lingkungan Inspektorat Utama tahun 2025 berdasarkan kebijakan kapabilitas APIP terbaru.
3. Menyusun kebijakan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan dalam rangka penerapan Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi di lingkungan BPOM.

IKSP.11 Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama

Nilai telaah sejawat intern merupakan proses evaluasi atau penilaian yang dilakukan oleh auditor internal lain (rekan sejawat) untuk menilai kualitas pekerjaan audit internal Inspektorat Utama. Proses ini dikenal dengan ***Peer Review Internal / Quality Assurance Review (QAR),*** dan merupakan bagian dari upaya peningkatan mutu audit internal. Adapun nilai telaah sejawat intern mencakup beberapa aspek, antara lain:

1. Kepatuhan terhadap standar audit internal, seperti Standar Profesional Audit Internal
2. Kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan audit.
3. Kesesuaian dengan kebijakan dan prosedur Inspektorat.

4. Efektivitas dalam memberikan nilai tambah dan memperbaiki proses organisasi.
5. Tingkat objektivitas dan independensi auditor.

Tabel 46 Capaian Kinerja IKSP.11 Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama TW III 2025

Sasaran Program	Indikator	TW II 2025	Triwulan III 2025				Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target	Capaian (%)	Kategori
Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional	Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama	merupakan indikator baru dari revisi PK	-	*Diukur pada Akhir TW IV 2025	-	-	82,8	-	-

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi kinerja indikator Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama triwulan III tahun 2025 belum dapat diketahui karena pengukuran kinerja baru dilakukan pada akhir triwulan IV 2025. Sehingga realisasi **belum dapat dibandingkan pada target triwulan III 2025 maupun target akhir tahun 2025.**

Pada triwulan III 2025, Inspektorat Utama melaksanakan rencana aksi sebagai upaya mencapai target pada akhir tahun 2025. **Upaya yang telah dilakukan pada triwulan III 2025** adalah mempersiapkan penilaian telah sejawat intern Inspektorat Utama

Pada indikator ini, realisasi anggaran berdasarkan Aplikasi SAKTI bulan September 2025 adalah sebesar Rp18.400.000 atau 68,91% dari pagu sebesar Rp26.700.000. Selanjutnya, dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja menggunakan pagu anggaran berdasarkan Rencana Penarikan Dana (RPD)** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 47 Capaian Efisiensi IKSP.11 Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama TW III 2025

Indikator Kinerja	Dalam ribuan rupiah		Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran						
Nilai sejawat intern Inspektorat Utama	26.700	18.400	68.91%	*diukur pada TW IV 2025	-	1	-	Belum dapat disimpulkan

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah **belum dapat disimpulkan**, dikarenakan capaian kinerja baru dapat diukur pada akhir tahun 2025. Realisasi anggaran **mendukung pada terlaksananya kegiatan** Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor Bidang Pengawasan dan Antar K/L.

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Utama pada triwulan selanjutnya sampai pada akhir tahun adalah dengan:

1. Mempersiapkan penilaian telaah sejawat intern Inspektorat Utama
    a. Penyiapan link kertas kerja telaah sejawat intern
    b. Pembuatan SK Tim telaah sejawat intern
2. Entry meeting pelaksanaan telaah sejawat intern
3. Pelaksanaan telaah sejawat intern
4. Pelaporan telaah sejawat intern

Sebagai informasi, pada rancangan Renstra Inspektorat Utama tahun 2025-2029 indikator ini merupakan hasil penyesuaian pada indikator "Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama" menjadi "Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama". Penyesuaian ini dilakukan dengan melakukan indikator pengganti yang lebih mencerminkan atau menggambarkan pada sasaran program 3 Inspektorat Utama "Terwujudnya Inspektorat Utama yang Profesional". Penyesuaian ini dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 48 Matriks penyesuaian indikator Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama

Semula		Menjadi		Justifikasi
Indikator	**Target 2025**	**Indikator**	**Target 2025**	
Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	-	Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama	82,8	usulan baru lebih menggambarkan dalam mewujudkan organisasi ittama yang profesional. usulan target dilakukan berdasarkan nilai TSE pada tahun 2020 dan 2024

Penyesuaian ini juga dilakukan pada indikator Tingkat Eselon II, penyesuaian dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 49 Matriks Penyesuaian indikator Nilai telaah sejawat intern Inspektorat I / Inspektorat II

Semula		Menjadi		Justifikasi
Indikator	**Target 2025**	**Indikator**	**Target 2025**	
Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat I	88,48	Nilai telaah sejawat intern Inspektorat I	82,8	usulan baru lebih menggambarkan dalam mewujudkan organisasi Inspektorat I/Inspektorat II yang profesional. usulan target dilakukan berdasarkan nilai TSE pada tahun 2020 dan 2024
Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat II	88,33	Nilai telaah sejawat intern Inspektorat II	82,8	

3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tindak lanjut rekomendasi TW III Tahun 2025 merupakan monitoring dan penyempurnaan dari matriks tindak lanjut pada laporan kinerja interim triwulan II 2025. Tindak lanjut TW III dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 50 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi TW III 2025

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	Merupakan indikator baru di Inspektorat Utama yang merepresentasikan dari IKU di Eselon II seperti: a. Persentase tingkat keberhasilan pembangunan zona integritas b. Nilai evaluasi SPIP BPOM c. Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM d. Nilai survei penilaian integritas BPOM e. Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM Pada triwulan II tahun 2025 terdapat rencana aksi indikator terkait	1. Menyelesaikan rencana aksi pada triwulan II tahun 2025 (Terlampir pada tabel kondisi awal):		1. Menyelesaikan rencana aksi pada triwulan II tahun 2025:	**1. Rencana aksi pada laporan kinerja interim triwulan II yang belum selesai;**		Seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sehingga indikator dapat mencapai target TW IV yang ditetapkan

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		pada laporan kinerja interim triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:						
		1) Monitoring Kepatuhan Pelaporan Manajemen Risiko Unit Pemilik Risiko Semester II Tahun 2025	1) Monitoring Kepatuhan Pelaporan Manajemen Risiko Unit Pemilik Risiko Semester II Tahun 2025	Triwulan III	1) Monitoring Kepatuhan Pelaporan Manajemen Risiko Unit Pemilik Risiko Semester II Tahun 2025 berdasarkan surat inspektur Utama nomor B-PI.06.07.7.07.25.221 perihal hasil monitoring kepatuhan pelaporan manrisk kepada Unit kerja Pusat dan UPT semester II tahun 2025 & Pemberitahuan Pelaporan Manajemen Risiko Unit Pemilik Risiko Semester II Tahun 2025 melalui surat dinas Inspektur Utama no B-PI.06.07.7.06.25.201	-	-	

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		2) Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko di lingkungan BPOM tahun 2025	2) Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko di lingkungan BPOM tahun 2025	Triwulan III sd Triwulan IV	-	1) Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko di lingkungan BPOM tahun 2025	Triwulan IV	
		3) Penyusunan *road map* RB tahun 2025 bersama Biro Hukum dan Organisasi dan monitoring *ex-ante*.	3) Penyusunan *road map* RB tahun 2025 bersama Biro Hukum dan Organisasi dan monitoring *ex-ante*.	Triwulan III sd Triwulan IV	2) Penyusunan rencana aksi RB tahun 2025 bersama Biro Hukum dan Organisasi (dilakukan pemutakhiran nomenklatur kegiatan)	-	-	
		4) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan *Roadmap* RB tahun 2025	4) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan *Roadmap* RB tahun 2025	Triwulan III sd Triwulan IV	-	2) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi RB *on-going* triwulan III tahun 2025. (dilakukan pemutakhiran nomenklatur kegiatan)	Triwulan IV	

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		5) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPKP dan SPAK triwulan III s.d triwulan IV tahun 2025.	5) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPKP dan SPAK triwulan III s.d triwulan IV tahun 2025.	Triwulan III sd Triwulan IV	3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPKP dan SPAK triwulan III tahun 2025.	3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPKP dan SPAK triwulan IV tahun 2025.	Triwulan IV	
		6) Evaluasi ZI menuju WBK secara mandiri	6) Evaluasi ZI menuju WBK secara mandiri	Triwulan III sd Triwulan IV	4) Evaluasi ZI menuju WBK secara mandiri	-	-	
		7) Pendampingan unit kerja yang dilakukan evaluasi menuju WBBM oleh Kementerian PANRB	7) Pendampingan unit kerja yang dilakukan evaluasi menuju WBBM oleh Kementerian PANRB	Triwulan III sd Triwulan IV	5) Pendampingan unit kerja yang dilakukan evaluasi menuju WBBM oleh Kementerian PANRB	-	-	
		8) Pendampingan evaluasi SPIPT oleh BPKP	8) Pendampingan evaluasi SPIPT oleh BPKP	Triwulan III sd Triwulan IV	-	4) Pendampingan evaluasi SPIP-T oleh BPKP	Triwulan IV	
		9) Pemantauan *Area of Improvement* (AoI)	9) Pemantauan *Area of Improvement* (AoI)	Triwulan III sd Triwulan IV	6) Pemantauan *Area of Improvement* (AoI) Penyelenggaraan SPIPT Tahun 2025	-	-	
		10) Pelatihan Auditor Internal Sistem	10) Pelatihan Auditor Internal Sistem Manajemen	Triwulan III sd	7) Hasil koordinasi, pelatihan audit	-	-	

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan	Pengawasan Obat dan Makanan	Triwulan IV	internal dilaksanakan oleh PPSDM			
		11) Pengelolaan pelaksanaan audit internal Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan	11) Pengelolaan pelaksanaan audit internal Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan	Triwulan III sd Triwulan IV	8) Pengelolaan pelaksanaan audit internal Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi	5) Pengelolaan pelaksanaan audit internal Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi	Triwulan IV	
		12) Sosialisasi kepada eksternal terkait terkait kebijakan, regulasi, SOP, serta alur penanganan apabila terjadi penyimpangan integritas	12) Sosialisasi kepada eksternal terkait terkait kebijakan, regulasi, SOP, serta alur penanganan apabila terjadi penyimpangan integritas	Triwulan III sd Triwulan IV	9) Sosialisasi kepada eksternal terkait terkait kebijakan, regulasi, SOP, serta alur penanganan apabila terjadi penyimpangan integritas	-	-	
		13) Penyusunan Laporan Evaluasi Internal sesuai dengan pedoman SAKIP; terbaru dan melakukan dokumentasi sesuai timeline	13) Penyusunan Laporan Evaluasi Internal sesuai dengan pedoman SAKIP; terbaru dan melakukan dokumentasi sesuai timeline	Triwulan III sd Triwulan IV	10) Penyusunan Laporan Evaluasi Internal sesuai dengan pedoman SAKIP; terbaru dan melakukan dokumentasi sesuai timeline	-	-	

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		14) Pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan SPI dan aplikasi sang integritas	14) Pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan SPI dan aplikasi sang integritas	Triwulan III sd Triwulan IV	11) Pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan SPI dan aplikasi sang integritas	-	-	
		15) *Workshop* penguatan anti korupsi	15) *Workshop* penguatan anti korupsi	Triwulan III sd Triwulan IV	12) *Workshop* penguatan anti korupsi. Pelaksanaan cafe integritas seri 7 Judul "Pengelolaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan Pengelolaan Tambahan Uang Persediaan (TUP)"	7) *Workshop* penguatan anti korupsi: Cafe integritas	Triwulan IV	
		16) *Public Campaign* Anti Korupsi	16) *Public Campaign* Anti Korupsi	Triwulan III sd Triwulan IV	13) *Public Campaign* Anti Korupsi	8) *Public Campaign* Anti Korupsi	Triwulan IV	
		17) Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP dalam aplikasi SAPA APIP secara berkala	17) Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP dalam aplikasi SAPA APIP secara berkala	Triwulan III sd Triwulan IV	14) Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP dalam aplikasi SAPA APIP secara berkala	9) Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP dalam aplikasi SAPA APIP secara berkala	Triwulan IV	

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		18) Melaksanakan sosialisasi pedoman manajemen risiko terbaru kepada seluruh unit kerja Badan POM	18) Melaksanakan sosialisasi pedoman manajemen risiko terbaru kepada seluruh unit kerja Badan POM	Triwulan III sd Triwulan IV	-	10) Melaksanakan sosialisasi pedoman manajemen risiko terbaru kepada seluruh unit kerja Badan POM	Triwulan IV	
		19) Pelaksanaan *desk* manajemen risiko kepada seluruh unit kerja Badan POM	19) Pelaksanaan *desk* manajemen risiko kepada seluruh unit kerja Badan POM	Triwulan III sd Triwulan IV	-	11) Pelaksanaan *desk* manajemen risiko kepada seluruh unit kerja Badan POM	Triwulan IV	
		20) Pelaksanaan kegiatan lokakarya Strategi Peningkatan Efektivitas Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI dalam memperkuat akuntabilitas kinerja di BPOM	20) Pelaksanaan kegiatan lokakarya Strategi Peningkatan Efektivitas Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI dalam memperkuat akuntabilitas kinerja di BPOM	Triwulan III sd Triwulan IV	-	12) Pelaksanaan kegiatan lokakarya Strategi Peningkatan Efektivitas Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI dalam memperkuat akuntabilitas kinerja di BPOM	Triwulan IV	
		21) Pendampingan Pemeriksaan BPK atas Kinerja pada BPOM	21) Pendampingan Pemeriksaan BPK atas Kinerja pada BPOM	Triwulan III sd Triwulan IV	15) Pendampingan Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja BPOM dan Pemeriksaan Rinci Kinerja BPOM oleh BPK	13) Pendampingan Pemeriksaan Rinci Kinerja Badan POM oleh Badan Pemeriksa keuangan atas Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan	Triwulan IV	

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
						Olahan Tahun 2024 dan 2025 pada Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan Daerah.		
		22) Pemantauan dan evaluasi tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas BPOM Semester I TA 2024 dan Penyelesaian Kerugian Negara Semester I Tahun 2024	22) Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK atas BPOM Semester I TA 2024 dan Penyelesaian Kerugian Negara Semester I Tahun 2024	Triwulan III sd Triwulan IV	16) Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK atas BPOM Semester I TA 2024 dan Penyelesaian Kerugian Negara Semester I Tahun 2024	14) Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK atas BPOM Semester II TA 2025 dan Penyelesaian Kerugian Negara Semester II Tahun 2025.	-	
		23) Reviu PIPK tahun 2025.	23) Reviu PIPK tahun 2025.	Triwulan III sd Triwulan IV	-	15) Reviu PIPK tahun 2025	Triwulan IV	
		24) Melakukan rekapitulasi hasil rencana aksi SPI BPOM tahun 2024 dan menyampaikan rencana aksi kepada KPK melalui aplikasi JAGA.	24) Melakukan rekapitulasi hasil rencana aksi SPI BPOM tahun 2024 dan menyampaikan rencana aksi kepada	Triwulan III sd Triwulan IV	15) Melakukan rekapitulasi hasil rencana aksi SPI BPOM tahun 2024 dan menyampaikan rencana aksi kepada	16) Melakukan rekapitulasi hasil rencana aksi SPI BPOM tahun 2024 dan menyampaikan rencana aksi kepada	Triwulan IV	

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
			KPK melalui aplikasi JAGA.		KPK melalui aplikasi JAGA.	KPK melalui aplikasi JAGA.		
		25) Melakukan koordinasi dengan PIC KPK dan unit terkait di BPOM untuk pengisian *milestone* Stranas PK B09/triwulan III tahun 2025.	25) Melakukan koordinasi dengan PIC KPK dan unit terkait di BPOM untuk pengisian *milestone* Stranas PK B09/triwulan III tahun 2025.	Triwulan III sd Triwulan IV	16) Melakukan koordinasi dengan PIC KPK dan unit terkait di BPOM untuk pengisian *milestone* Stranas PK B09/triwulan III tahun 2025.	17) Melakukan koordinasi dengan PIC KPK dan unit terkait di BPOM untuk pengisian *milestone* Stranas PK B12/triwulan IV tahun 2025.	Triwulan IV	
		26) Melaksanakan monitoring atas kelengkapan pengisian LHKPN periodik tahun 2024.	26) Melaksanakan monitoring atas kelengkapan pengisian LHKPN periodik tahun 2024.	Triwulan III sd Triwulan IV	17) Melaksanakan monitoring atas kelengkapan pengisian LHKPN periodik tahun 2024.	18) Melaksanakan monitoring atas kelengkapan pengisian LHKPN periodik tahun 2024	Triwulan IV	
		27) Melaksanakan monitoring pengisian LHKPN khusus awal menjabat (CPNS dan PPPK) tahun 2025 di lingkungan BPOM.	27) Melaksanakan monitoring pengisian LHKPN khusus awal menjabat (CPNS dan PPPK) tahun 2025 di lingkungan BPOM.	Triwulan III sd Triwulan IV	18) Melaksanakan monitoring pengisian LHKPN khusus awal menjabat (CPNS dan PPPK) tahun 2025 di lingkungan BPOM.	19) Melaksanakan monitoring pengisian LHKPN khusus awal menjabat (CPNS dan PPPK) tahun 2025 di lingkungan BPOM	Triwulan IV	
		28) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaporan gratifikasi dan Benturan Kepentingan triwulan III.	28) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaporan gratifikasi dan Benturan Kepentingan triwulan III.	Triwulan III sd Triwulan IV	19) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaporan gratifikasi dan Benturan Kepentingan triwulan III.	20) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaporan gratifikasi dan Benturan	Triwulan IV	

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
						Kepentingan triwulan IV.		
		29) Menyusun telaah awal pengaduan masyarakat dan WBS triwulan III.	29) Menyusun telaah awal pengaduan masyarakat dan WBS triwulan III.	Triwulan III sd Triwulan IV	20) Menyusun telaah awal pengaduan masyarakat dan WBS triwulan III.	21) Menyusun telaah awal pengaduan masyarakat dan WBS triwulan IV.	Triwulan IV	
		30) Melaksanakan penginputan data implementasi Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) tahun 2025.	30) Melaksanakan penginputan data implementasi Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) tahun 2025	Triwulan III sd Triwulan IV	21) Melaksanakan penginputan data implementasi Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) tahun 2025	22) Melaksanakan penginputan data implementasi Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) tahun 2025	Triwulan IV	
		31) Monitoring responden terhadap pengisian SPI tahun 2025.	31) Monitoring responden terhadap pengisian SPI tahun 2025.	Triwulan III sd Triwulan IV	20) Monitoring responden terhadap pengisian SPI tahun 2025.	23) Monitoring responden terhadap pengisian SPI tahun 2025.	Triwulan IV	
		32) Melaksanakan monitoring tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP tahun 2024 dan melaksanakan evaluasi SAKIP tahun 2025 kepada seluruh Satuan Kerja BPOM.	32) Melaksanakan monitoring tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP tahun 2024 dan melaksanakan evaluasi SAKIP tahun 2025 kepada seluruh Satuan Kerja BPOM.	Triwulan III sd Triwulan IV	21)Melaksanakan monitoring tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP tahun 2024 dan melaksanakan evaluasi SAKIP tahun 2025 kepada seluruh Satuan Kerja BPOM	24) Melaksanakan monitoring tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP tahun 2024 dan melaksanakan evaluasi SAKIP tahun 2025 kepada seluruh Satuan Kerja BPOM.	Triwulan IV	

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		33) Revisi petunjuk pelaksanaan manajemen risiko.	33) Revisi petunjuk pelaksanaan manajemen risiko.	Triwulan III sd Triwulan IV	21) Revisi petunjuk pelaksanaan manajemen risiko.	25) Revisi petunjuk pelaksanaan manajemen risiko.	Triwulan IV	
		2. Selain rencana aksi pada laporan kinerja triwulan II, terdapat kegiatan yang dilakukan dalam mendukung IKU, yakni:	2. Melakukan kegiatan dalam mendukung IKU:		2. Melakukan kegiatan dalam mendukung IKU:	2. Melakukan kegiatan dalam mendukung IKU:		
		1) Reviu Pemutakhiran data BMN Semester I TA 2025	1) Reviu Pemutakhiran data BMN Semester I TA 2025	Triwulan III sd Triwulan IV	1) Reviu Pemutakhiran data BMN Semester I TA 2025	1) Reviu Usulan RKBMN Tahun 2025 untuk RKAKL Tahun Anggaran 2027.	Triwulan IV	
		2) Reviu RKAKL	2) Reviu RKAKL	Triwulan III sd Triwulan IV	-	2) Reviu RKAKL pagu alokasi anggaran TA 2026 pada seluruh satuan kerja	Triwulan IV	
		3) Bimbingan teknis manajemen risiko unit kerja	3) Bimbingan teknis manajemen risiko unit kerja	Triwulan III sd Triwulan IV	2) Bimbingan teknis manajemen risiko unit kerja	-	-	
		4) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi RB ex-ante	4) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi RB	Triwulan III sd Triwulan IV	3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi RB ex-ante	3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi RB	Triwulan IV	

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		dan on-going TW I sd II tahun 2025	ex-ante dan on-going TW I sd II tahun 2025		dan on-going TW I sd II tahun 2025	ex-ante TW III tahun 2025		
		5) Bimbingan teknis pembangunan ZI	5) Bimbingan teknis pembangunan ZI	Triwulan III	4) Bimbingan teknis pembangunan ZI	-	-	
		6) Finalisasi rancangan Petunjuk Teknis Auditor Internal Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Terintegrasi	6) Finalisasi rancangan Petunjuk Teknis Auditor Internal Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Terintegrasi	Triwulan III	5) Finalisasi rancangan Petunjuk Teknis Auditor Internal Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Terintegrasi	-	-	
		7) Reviu Laporan Keuangan Semester I TA 2025	7) Reviu Laporan Keuangan Semester I TA 2025	Triwulan III sd Triwulan IV	6) Reviu Laporan Keuangan Semester I TA 2025	4) Reviu Laporan Keuangan Triwulan III TA 2025	Triwulan IV	
		8) Sosialisasi Persiapan SPI tahun 2025	8) Sosialisasi Persiapan SPI tahun 2025	Triwulan III	7) Sosialisasi Persiapan SPI tahun 2025	-	-	
		9) Pencanangan Lab Integritas dan Akuntabilitas	9) Pencanangan Lab Integritas dan Akuntabilitas	Triwulan III	8) Pencanangan Lab Integritas dan Akuntabilitas	-	-	
		10) Menyusun Laporan Hasil Pengawasan Intern di Lingkungan BPOM Triwulan II 2025	10) Menyusun Laporan Hasil Pengawasan Intern di Lingkungan BPOM Triwulan II 2025.	Triwulan III sd Triwulan IV	9) Menyusun Laporan Hasil Pengawasan Intern di Lingkungan BPOM Triwulan II 2025.	5) Menyusun Laporan Hasil Pengawasan Intern di Lingkungan BPOM Triwulan III 2025.	Triwulan IV	

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		12) Monitoring dan evaluasi kepada unit kerja yang telah mendapat predikat WBK/WBBM dari KemenPANRB	12) Monitoring dan evaluasi kepada unit kerja yang telah mendapat predikat WBK/WBBM dari KemenPANRB	Triwulan III	10) Monitoring dan evaluasi kepada unit kerja yang telah mendapat predikat WBK/WBBM dari KemenPANRB	-		
		13) Rapat tinjauan Manajemen Tahun 2025	13) Rapat tinjauan Manajemen Tahun 2025	Triwulan III s.d Triwulan IV	-	6) Rapat tinjauan Manajemen Tahun 2025	Triwulan IV	
		14) Penetapan unit kerja berpredikat WBK secara mandiri	14) Penetapan unit kerja berpredikat WBK secara mandiri	Triwulan IV	-	7) Penetapan unit kerja berpredikat WBK secara mandiri	Triwulan IV	
		15) Pleno Hasil Penilaian Unit Kerja Menuju WBK secara Mandiri di Lingkungan BPOM Tahun 2025	15) Pleno Hasil Penilaian Unit Kerja Menuju WBK secara Mandiri di Lingkungan BPOM Tahun 2025	Triwulan IV	-	8) Pleno Hasil Penilaian Unit Kerja Menuju WBK secara Mandiri di Lingkungan BPOM Tahun 2025	Triwulan IV	
		16) Pelaporan E-Mawas PNBP	16) Pelaporan E-Mawas PNBP	Triwulan IV	-	9) Pelaporan E-Mawas PNBP	Triwulan IV	
		17) Monitoring dan evaluasi kebijakan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan dalam rangka penerapan Sistem Manajemen Pengawasan	17) Monitoring dan evaluasi kebijakan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan dalam rangka penerapan Sistem Manajemen	Triwulan IV	-	10) Monitoring dan evaluasi kebijakan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan dalam rangka penerapan Sistem	Triwulan IV	

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		Obat dan Makanan Terintegrasi di lingkungan BPOM	Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi di lingkungan BPOM			Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi di lingkungan BPOM		
		18) Monitoring pencapaian target responden BPOM untuk pelaksanaan SPI 2025	18) Monitoring pencapaian target responden BPOM untuk pelaksanaan SPI 2025	Triwulan IV	-	11) Monitoring pencapaian target responden BPOM untuk pelaksanaan SPI 2025	Triwulan IV	
		19) Penyampaian data dukung tindak lanjut hasil SPI 2024 pada aplikasi JAGA.	19) Penyampaian data dukung tindak lanjut hasil SPI 2024 pada aplikasi JAGA.	Triwulan IV	-	12) Penyampaian data dukung tindak lanjut hasil SPI 2024 pada aplikasi JAGA.	Triwulan IV	
2	Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama	Merupakan indikator lanjutan dari periode renstra Inspektorat Utama 2020-2024 yang dilakukan penyesuaian nomenklatur (Indeks reformasi birokrasi Inspektorat Utama). Pada triwulan II tahun 2025 terdapat rencana aksi indikator terkait pada laporan kinerja interim triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:	1. Menyelesaikan rencana aksi pada triwulan II tahun 2025 (Terlampir pada tabel kondisi awal):		Menyelesaikan rencana aksi pada triwulan II tahun 2025 (Terlampir pada tabel kondisi awal):	**Rencana aksi pada triwulan selanjutnya:**	-	Seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sehingga indikator dapat mencapai target TW IV yang ditetapkan

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		1. Melaksanakan pembangunan Zona Integritas sebagaimana telah diprogramkan	1) Melaksanakan pembangunan Zona Integritas sebagaimana telah diprogramkan	Triwulan III sd Triwulan IV	1) Melaksanakan pembangunan Zona Integritas sebagaimana telah diprogramkan. Hal ini termasuk dalam hal implementasi kegiatan *Agent of Change* di Inspektorat I, Inspektorat II, dan Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama. Cakupan lainnya adalah ketaatan pelaporan LHKPN yang berpengaruh langsung pada komponen Reform untuk area Penguatan Pengawasan serta implementasi manajemen risiko yang menjadi bagian komponen Pengungkit elemen yang sama. (Penyesuaian nomenklatur rencana aksi)	1) Melaksanakan pembangunan Zona Integritas sebagaimana telah diprogramkan	Triwulan IV	
		2. Melakukan penilaian mandiri pembangunan ZI	2) Melakukan penilaian mandiri pembangunan ZI	Triwulan III sd Triwulan IV				
		3. Mengikuti kegiatan *desk* penilaian pembangunan Zona Integritas TA 2025	3) Mengikuti kegiatan *desk* penilaian pembangunan Zona Integritas TA 2025	Triwulan III sd Triwulan IV				

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
					2) Melakukan penilaian mandiri pembangunan ZI	-	-	
					3) Mengikuti kegiatan *desk* penilaian pembangunan Zona Integritas TA 2025	-	-	
		Selain dari kegiatan di atas, dilakukan juga kegiatan yang mendukung tercapainya IKU ini yaitu:	Selain dari kegiatan di atas, dilakukan juga kegiatan yang mendukung tercapainya IKU ini yaitu:		Selain dari kegiatan di atas, dilakukan juga kegiatan yang mendukung tercapainya IKU ini yaitu:	Selain dari kegiatan di atas, dilakukan juga kegiatan yang mendukung tercapainya IKU ini yaitu:		
		1. Mengukur dan senantiasa memantau pelaksanaan program dan melaporkannya secara berkala kepada pimpinan	1. Mengukur dan senantiasa memantau pelaksanaan program dan melaporkannya secara berkala kepada pimpinan	Triwulan III sd Triwulan IV	1. Mengukur dan senantiasa memantau pelaksanaan program dan melaporkannya secara berkala kepada pimpinan	1. Mengukur dan senantiasa memantau pelaksanaan program dan melaporkannya secara berkala kepada pimpinan	Triwulan IV	

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		2. Memastikan keterlibatan pimpinan dimana pimpinan harus berperan sebagai teladan dan memastikan komitmen di 6 (enam) area perubahan	2. Memastikan keterlibatan pimpinan dimana pimpinan harus berperan sebagai teladan dan memastikan komitmen di 6 (enam) area perubahan	Triwulan III sd Triwulan IV	-	2. Memastikan keterlibatan pimpinan dimana pimpinan harus berperan sebagai teladan dan memastikan komitmen di 6 (enam) area perubahan	Triwulan IV	
		3. Memastikan program yang diinisiasi Agen Perubahan berjalan secara berkelanjutan dan terlaksana	3. Memastikan program yang diinisiasi Agen Perubahan berjalan secara berkelanjutan dan terlaksana	Triwulan III sd Triwulan IV	-	3. Memastikan program yang diinisiasi Agen Perubahan berjalan secara berkelanjutan dan terlaksana	Triwulan IV	
3	Nilai AKIP Inspektorat Utama	Merupakan indikator lanjutan dari periode renstra Inspektorat Utama 2020-2024. Pengukuran kinerja dilakukan pada TW IV 2025. Pada periode RENSTRA 2020-2024, Nilai AKIP Inspektorat Utama memperolah nilai	Menindaklanjuti Rencana aksi pada laporan kinerja interim triwulan II 2025:		**Rencana aksi pada laporan kinerja interim triwulan II yang sudah selesai:**	**1. Rencana aksi pada laporan kinerja interim triwulan II yang belum selesai:**		Seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sehingga indikator dapat mencapai target TW IV

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		81,58 (A) namun tidak mencapai target. Pada triwulan II tahun 2025 terdapat rencana aksi indikator terkait pada laporan kinerja interim triwulan II tahun 2025						yang ditetapkan
		1. Menyusun laporan kinerja interim tahun 2025 dengan menyajikan penjelasan terkait adanya penambahan indikator kinerja pada tahun bersangkutan	1) Menyusun laporan kinerja interim tahun 2025 dengan menyajikan penjelasan terkait adanya penambahan indikator kinerja pada tahun bersangkutan	Triwulan III sd Triwulan IV	1. Menyusun laporan kinerja interim tahun 2025 dengan menyajikan penjelasan terkait adanya penambahan indikator kinerja pada tahun bersangkutan	1) Menyusun laporan kinerja interim tahun 2025 dengan menyajikan penjelasan terkait adanya penambahan indikator kinerja pada tahun bersangkutan	Triwulan IV	
		2. Menyusun penyesuaian Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja TA 2025	2) Menyusun penyesuaian Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja TA 2025	Triwulan III sd Triwulan IV	2. Memastikan pengukuran dan pelaporan data kinerja telah handal dan tepat waktu setiap bulan dan triwulan	2) Menyusun penyesuaian Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja TA 2025	Triwulan IV	

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		3. Memastikan pengukuran dan pelaporan data kinerja telah handal dan tepat waktu setiap bulan dan triwulan	3) Memastikan pengukuran dan pelaporan data kinerja telah handal dan tepat waktu setiap bulan dan triwulan	Triwulan III sd Triwulan IV	3. Memastikan keselarasan data kinerja yang dilaporkan dalam SIMETRIS, Laporan Evaluasi Internal, Laporan Kinerja Interim setiap bulan dan triwulan	3) Memastikan pengukuran dan pelaporan data kinerja telah handal dan tepat waktu setiap bulan dan triwulan	Triwulan IV 2025	
		4. Memastikan keselarasan data kinerja yang dilaporkan dalam SIMETRIS, Laporan Evaluasi Internal, Laporan Kinerja Interim setiap bulan dan triwulan	4) Memastikan keselarasan data kinerja yang dilaporkan dalam SIMETRIS, Laporan Evaluasi Internal, Laporan Kinerja Interim setiap bulan dan triwulan	Triwulan III sd Triwulan IV	4. Meningkatkan kompetensi pegawai Inspektorat Utama dengan mengikuti bimtek SAKIP secara mandiri melalui IDEAS	4) Memastikan keselarasan data kinerja yang dilaporkan dalam SIMETRIS, Laporan Evaluasi Internal, Laporan Kinerja Interim setiap bulan dan triwulan	Triwulan IV 2025	

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		5. Meningkatkan kompetensi pegawai Inspektorat Utama dengan mengikuti bimtek SAKIP secara mandiri melalui IDEAS	5) Meningkatkan kompetensi pegawai Inspektorat Utama dengan mengikuti bimtek SAKIP secara mandiri melalui IDEAS	Triwulan III sd Triwulan IV	5) Meningkatkan kompetensi pegawai Inspektorat Utama dengan mengikuti bimtek SAKIP secara mandiri melalui IDEAS	5) Meningkatkan kompetensi pegawai Inspektorat Utama dengan mengikuti bimtek SAKIP secara mandiri melalui IDEAS	Triwulan IV 2025	
		Selain dari kegiatan di atas, dilakukan juga kegiatan yang mendukung tercapainya IKU ini yaitu:	Selain dari kegiatan di atas, dilakukan juga kegiatan yang mendukung tercapainya IKU ini yaitu:		Selain dari kegiatan di atas, dilakukan juga kegiatan yang mendukung tercapainya IKU ini yaitu:	Selain dari kegiatan di atas, dilakukan juga kegiatan yang mendukung tercapainya IKU ini yaitu:		
		1. Membentuk sites SAKIP pada https://bit.ly/sakipcorner dalam rangka pengumpulan dan pengukuran data kinerja	1) Membentuk sites SAKIP pada https://bit.ly/sakipcorner dalam rangka pengumpulan dan pengukuran data kinerja	Triwulan III sd Triwulan IV	1. Membentuk sites SAKIP pada https://bit.ly/sakipcorner dalam rangka pengumpulan dan pengukuran data kinerja			

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		2. Menyusun Manual Indikator Kinerja dengan Perjanjian Kinerja yang sudah direvisi sebagai pedoman pengukuran kinerja	2) Menyusun Manual Indikator Kinerja dengan Perjanjian Kinerja yang sudah direvisi sebagai pedoman pengukuran kinerja	Triwulan III sd Triwulan IV	2. Menyusun Manual Indikator Kinerja dengan Perjanjian Kinerja yang sudah direvisi sebagai pedoman pengukuran kinerja			
		3. Menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja sesuai pedoman SAKIP	3) Menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja sesuai pedoman SAKIP	Triwulan III sd Triwulan IV		1) Menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja sesuai pedoman SAKIP	Triwulan IV	
		4. Menyusun rencana kinerja Inspektorat Utama Tahun 2026	4) Menyusun rencana kinerja Inspektorat Utama Tahun 2026	Triwulan III sd Triwulan IV		2) Menyusun rencana kinerja Inspektorat Utama Tahun 2026	Triwulan IV	

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
4	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	Merupakan indikator lanjutan dari periode renstra Inspektorat Utama 2020-2024. Pengukuran kinerja dilakukan pada TW IV 2025. Pada periode renstra Inspektorat Utama 2020-2024, indikator berhasil mencapai target. Pada triwulan II tahun 2025 terdapat rencana aksi indikator terkait pada laporan kinerja interim triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:	1. Melaksanakan rencana tindak lanjut triwulan II, yaitu dengan:		1. Melaksanakan rencana tndak lanjut triwulan II, yaitu dengan:	**1. Rencana aksi pada TW II 2025 yang belum dilaksanakan:**		Seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sehingga indikator dapat mencapai target TW IV yang ditetapkan
		1. Meningkatkan koordinasi antar PPK, dan PPK dengan pengelola kegiatan, dalam melakukan pengawasan, perhitungan, dan pelaporan data capaian output;	1) Meningkatkan koordinasi antar PPK, dan PPK dengan pengelola kegiatan, dalam melakukan pengawasan, perhitungan, dan pelaporan data capaian output;	Triwulan III sd Triwulan IV	1) Meningkatkan koordinasi antar PPK, dan PPK dengan pengelola kegiatan, dalam melakukan pengawasan, perhitungan, dan pelaporan data capaian output;	1) Meningkatkan koordinasi antar PPK, dan PPK dengan pengelola kegiatan, dalam melakukan pengawasan, perhitungan, dan pelaporan data capaian output;	Triwulan IV	

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		2. Monitoring realisasi anggaran, progres capaian output, dan penyelesaian tagihan;	2) Monitoring realisasi anggaran, progres capaian output, dan penyelesaian tagihan;	Triwulan III sd Triwulan IV	2) Monitoring realisasi anggaran, progres capaian output, dan penyelesaian tagihan;	2) Monitoring realisasi anggaran, progres capaian output, dan penyelesaian tagihan;	Triwulan IV	
		3. Monitoring realisasi anggaran dan progress pencapaian Rincian Output;	3) Monitoring realisasi anggaran dan progress pencapaian Rincian Output;	Triwulan III sd Triwulan IV	3) Monitoring realisasi anggaran dan progress pencapaian Rincian Output;	3) Monitoring realisasi anggaran dan progress pencapaian Rincian Output;	Triwulan IV	
		4. Menjaga ketercapaian volume dan indikator kinerja output;	4) Menjaga ketercapaian volume dan indikator kinerja output;	Triwulan III sd Triwulan IV	4) Menjaga ketercapaian volume dan indikator kinerja output;	4) Menjaga ketercapaian volume dan indikator kinerja output;	Triwulan IV	
		5. Revisi halaman III DIPA sesuai batas waktu yang ditentukan;	5) Revisi halaman III DIPA sesuai batas waktu yang ditentukan;	Triwulan III sd Triwulan IV	5) Revisi halaman III DIPA sesuai batas waktu yang ditentukan;	5) Revisi halaman III DIPA sesuai batas waktu yang ditentukan;	Triwulan IV	
		6. Reviu berjenjang atas proses adiminstrasi penyelesaian tagihan;	6) Reviu berjenjang atas proses	Triwulan III sd	6) Reviu berjenjang atas proses	6) Reviu berjenjang atas proses	Triwulan IV	

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
			adiminstrasi penyelesaian tagihan;	Triwulan IV	administrasi penyelesaian tagihan;	administrasi penyelesaian tagihan;		
		Selain itu, dalam menghadapi TW IV perlu melaksanakan langkah-langkah akhir tahun (LLAT) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-17/PB/2025 tentang Langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2025	2. Melaksanakan langkah-langkah akhir tahun (LLAT) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-17/PB/2025 tentang Langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2025	Triwulan IV	-	2. Melaksanakan langkah-langkah akhir tahun (LLAT) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-17/PB/2025 tentang Langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2025	Triwulan IV	

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
5	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	Merupakan indikator baru periode renstra Inspektorat Utama 2025-2029. Pengukuran kinerja dilakukan pada TW IV 2025. Pada tahun 2024, indeks manajemen risiko Inspektorat Utama sebesar 3,34. Dalam mencapai target diperlukan implementasi manajemen risiko sesuai dengan pedoman manajemen risiko. Pada triwulan II tahun 2025 terdapat rencana aksi indikator terkait pada laporan kinerja interim triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:	1. Melaksanakan rencana tindak lanjut triwulan II, yaitu dengan:		A. Melaksanakan rencana tindak lanjut triwulan II, yaitu dengan:	1. Rencana aksi pada triwulan selanjutnya:		Seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sehingga indikator dapat mencapai target TW IV yang ditetapkan
		1. Melakukan penerapan manajemen risiko di lingkup Inspektorat Utama	1. Melakukan penerapan manajemen risiko di lingkup Inspektorat Utama	Triwulan III sd Triwulan IV	1. Melakukan penerapan manajemen risiko di lingkup Inspektorat Utama	1. Melakukan penerapan manajemen risiko di lingkup Inspektorat Utama	Triwulan IV	

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		2. Melaksanakan rencana aksi pada rencana tindak lanjut yang telah disusun:	2. Melaksanakan rencana aksi pada rencana tindak lanjut yang telah disusun:		2. Melaksanakan rencana aksi pada rencana tindak lanjut yang telah disusun:			
		1) Melakukan reviu terhadap daftar risiko yang telah disusun sehingga uraian risk event lebih spesifik dan bukan negasi (kebalikan) dari tujuan, serta penyebab dan akibat yang relevan	1) Melakukan reviu terhadap daftar risiko yang telah disusun sehingga uraian risk event lebih spesifik dan bukan negasi (kebalikan) dari tujuan, serta penyebab dan akibat yang relevan	Triwulan III sd Triwulan IV	1) Melakukan reviu terhadap daftar risiko yang telah disusun sehingga uraian risk event lebih spesifik dan bukan negasi (kebalikan) dari tujuan, serta penyebab dan akibat yang relevan			
		2) Melakukan reviu terhadap atribut pengendalian dengan tujuan selaras dengan aktivitas pengendalian;	2) Melakukan reviu terhadap atribut pengendalian dengan tujuan selaras dengan aktivitas pengendalian;	Triwulan III sd Triwulan IV	2) Melakukan reviu terhadap atribut pengendalian dengan tujuan selaras dengan aktivitas pengendalian;			

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		3) Melakukan reviu tindakan mitigasi dalam Rencana Tindak Pengendalian (RTP);	3) Melakukan reviu tindakan mitigasi dalam Rencana Tindak Pengendalian (RTP);	Triwulan III sd Triwulan IV	3) Melakukan reviu tindakan mitigasi dalam Rencana Tindak Pengendalian (RTP);			
		4) Melakukan reviu terhadap penilaian risiko dengan memastikan kesesuaian antara kesimpulan efektivitas pengendalian dengan penurunan level risiko;	4) Melakukan reviu terhadap penilaian risiko dengan memastikan kesesuaian antara kesimpulan efektivitas pengendalian dengan penurunan level risiko;	Triwulan III sd Triwulan IV	4) Melakukan reviu terhadap penilaian risiko dengan memastikan kesesuaian antara kesimpulan efektivitas pengendalian dengan penurunan level risiko;			
		5) Mengidentifikasi risiko dengan mempertimbangkan seluruh isu internal dan isu eksternal;	5) Mengidentifikasi risiko dengan mempertimbangkan seluruh isu internal dan isu eksternal;	Triwulan III sd Triwulan IV	5) Mengidentifikasi risiko dengan mempertimbangkan seluruh isu internal dan isu eksternal;			

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		6) Melaksanakan pengujian aktivitas pengendalian untuk risiko dengan level risiko inheren tinggi dan sangat tinggi;	6) Melaksanakan pengujian aktivitas pengendalian untuk risiko dengan level risiko inheren tinggi dan sangat tinggi;	Triwulan III sd Triwulan IV	6) Melaksanakan pengujian aktivitas pengendalian untuk risiko dengan level risiko inheren tinggi dan sangat tinggi;			
		7) Melakukan reviu Rencana Tindak Pengendalian (RTP) secara berkala minimal dua kali dalam satu tahun:	7) Melakukan reviu Rencana Tindak Pengendalian (RTP) secara berkala minimal dua kali dalam satu tahun:	Triwulan III sd Triwulan IV	7) Melakukan reviu Rencana Tindak Pengendalian (RTP) secara berkala minimal dua kali dalam satu tahun:			
		8) Menyusun dan menetapkan uraian tugas terkait tanggung jawab untuk penentuan, penilaian, dan pengelolaan manajemen risiko pada SKP seluruh pegawai yang terlibat dalam tim penyelenggara/pengelola manajemen risiko sesuai Surat Keputusan Sestama tentang Tim Penyelenggara	8) Menyusun dan menetapkan uraian tugas terkait tanggung jawab untuk penentuan, penilaian, dan pengelolaan manajemen risiko pada SKP seluruh pegawai yang terlibat dalam tim penyelenggara/pengelola manajemen risiko sesuai Surat	Triwulan III sd Triwulan IV	8) Menyusun dan menetapkan uraian tugas terkait tanggung jawab untuk penentuan, penilaian, dan pengelolaan manajemen risiko pada SKP seluruh pegawai yang terlibat dalam tim penyelenggara/pengelola manajemen risiko sesuai Surat Keputusan Sestama			

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		Sistem Pengendalian Intern BPOM.	Keputusan Sestama tentang Tim Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern BPOM.		tentang Tim Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern BPOM.			
		3. Melaporkan daftar risiko semester II tahun 2025 pada SAPA APIP.	3. Melaporkan daftar risiko semester II tahun 2025 pada SAPA APIP.	Triwulan III sd Triwulan IV	3. Melaporkan daftar risiko semester II tahun 2025 pada SAPA APIP	-	-	
		Selain dari kegiatan di atas, dilakukan juga kegiatan yang mendukung tercapainya IKU ini yaitu:	Selain dari kegiatan di atas, dilakukan juga kegiatan yang mendukung tercapainya IKU ini yaitu:		Selain dari kegiatan di atas, dilakukan juga kegiatan yang mendukung tercapainya IKU ini yaitu:	Selain dari kegiatan di atas, dilakukan juga kegiatan yang mendukung tercapainya IKU ini yaitu:		
		1. Melaksanakan reviu, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan manajemen risiko di lingkungan Inspektorat Utama tahun 2025	1) Melaksanakan reviu, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan manajemen risiko di lingkungan Inspektorat Utama tahun 2025	Triwulan III sd Triwulan IV	1) Melaksanakan reviu, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan manajemen risiko di lingkungan Inspektorat Utama tahun 2025	1) Melaksanakan reviu, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan manajemen risiko di lingkungan Inspektorat Utama tahun 2025	Triwulan IV	

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		2. Melakukan penilaian mandiri maturaitas manajemen risiko tahun 2025 melalui pengisian KKE dan pengumpulan data dukung	2) Melakukan penilaian mandiri maturaitas manajemen risiko tahun 2025 melalui pengisian KKE dan pengumpulan data dukung	Triwulan III	2) Melakukan penilaian mandiri maturaitas manajemen risiko tahun 2025 melalui pengisian KKE dan pengumpulan data dukung			
		3. Mengikuti desk penilaian tingkat maturitas manajemen risiko di lingkungan Inspektorat Utama tahun 2025	3) Mengikuti desk penilaian tingkat maturitas manajemen risiko di lingkungan Inspektorat Utama tahun 2025	Triwulan III sd Triwulan IV		3) Mengikuti desk penilaian tingkat maturitas manajemen risiko di lingkungan Inspektorat Utama tahun 2025	Triwulan IV	

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
6	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	Merupakan indikator lanjutan dari periode renstra Inspektorat Utama 2020-2024. Realisasi pada periode renstra Inspektorat Utama 2020-2024 telah mencapai target. Pengukuran kinerja dilakukan pada akhir tahun 2025. *Merupakan IKU yang direvisi dengan perpindahan dari SP/SK 3 ke SP/SK 2*. Pada triwulan II tahun 2025 terdapat rencana aksi indikator terkait pada laporan kinerja interim triwulan II tahun 2025 sebagai berikut: Meningkatkan kualitas pelayanan pengawasan terhadap mitra pengawasan dengan menindaklanjuti rencana aksi yang telah disusun.	Melaksanakan rencana tindak lanjut triwulan II 2025, yaitu dengan **Meningkatkan kualitas pelayanan pengawasan terhadap mitra pengawasan dengan menindaklanjuti rencana aksi yang telah disusun.**	Triwulan III sd Triwulan IV	Meningkatkan kualitas pelayanan pengawasan terhadap mitra pengawasan dengan menindaklanjuti rencana aksi yang telah disusun.	Meningkatkan kualitas pelayanan pengawasan terhadap mitra pengawasan dengan menindaklanjuti rencana aksi yang telah disusun.	Triwulan IV	Seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sehingga indikator dapat mencapai target TW IV yang ditetapkan

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		Selain dari kegiatan di atas, dilakukan juga kegiatan yang mendukung tercapainya IKU ini yaitu:	Selain dari kegiatan di atas, dilakukan juga kegiatan yang mendukung tercapainya IKU ini yaitu:		Selain dari kegiatan di atas, dilakukan juga kegiatan yang mendukung tercapainya IKU ini yaitu:	Selain dari kegiatan di atas, dilakukan juga kegiatan yang mendukung tercapainya IKU ini yaitu:		
		1. Persiapan pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Inspektorat Utama BPOM Tahun 2025	1) Persiapan pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Inspektorat Utama BPOM Tahun 2025	Triwulan III	1) Persiapan pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Inspektorat Utama BPOM Tahun 2025	-		
		2. Pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Inspektorat Utama BPOM Tahun 2025	2) Pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Inspektorat Utama BPOM Tahun 2025	Triwulan III sd Triwulan IV	-	2) Pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Inspektorat Utama BPOM Tahun 2025	Triwulan IV	

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		3. Melakukan pelaporan hasil survei Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Inspektorat Utama BPOM Tahun 2025 kepada pimpinan	3) Melakukan pelaporan hasil survei Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Inspektorat Utama BPOM Tahun 2025 kepada pimpinan	Triwulan III sd Triwulan IV	-	3) Melakukan pelaporan hasil survei Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Inspektorat Utama BPOM Tahun 2025 kepada pimpinan	Triwulan IV	
7	Persentase rekomendasi pengawasan *assurance* yang ditindaklanjuti	Merupakan indikator lanjutan dari periode renstra Inspektorat Utama 2020-2024. Pada periode renstra tahun 2020-2024, realisasi kinerja tidak mencapai target. Nomenklatur Indikator ini mengalami perubahan dari “pengawasan intern” menjadi “Pengawasan *assurance*”. Pada triwulan II tahun 2025 terdapat rencana aksi indikator terkait pada laporan kinerja interim triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:	1. Melaksanakan rencana tindak lanjut triwulan II, yaitu dengan:	-	1. Melaksanakan rencana tindak lanjut triwulan II, yaitu dengan:	Rencana Aksi atas kegiatan yang belum dilaksanakan, yaitu:		Seluruh rencana aksi telah dilaksanakan dan indikator mencapai target bulanan yang ditetapkan

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		1. Pelaksanaan pemantauan maupun evaluasi tindak lanjut atas laporan hasil audit dilakukan paralel dengan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK;	1) Pelaksanaan pemantauan maupun evaluasi tindak lanjut atas laporan hasil audit dilakukan paralel dengan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK;	Triwulan III sd Triwulan IV	1) Pelaksanaan pemantauan maupun evaluasi tindak lanjut atas laporan hasil audit dilakukan paralel dengan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK;	-		
		2. Penyusunan laporan pengawasan yang meliputi audit, pemantauan tindak lanjut temuan, reviu, evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pengawasan lainnya, yang menjadi kompilasi dari hasil pengawasan sehingga mempermudah pemantauan hasil pengawasan intern yang dilakukan;	2) Penyusunan laporan pengawasan yang meliputi audit, pemantauan tindak lanjut temuan, reviu, evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pengawasan lainnya, yang menjadi kompilasi dari hasil pengawasan sehingga mempermudah pemantauan hasil pengawasan intern yang dilakukan;	Triwulan III sd Triwulan IV	2) Penyusunan laporan pengawasan yang meliputi audit, pemantauan tindak lanjut temuan, reviu, evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pengawasan lainnya, yang menjadi kompilasi dari hasil pengawasan sehingga mempermudah pemantauan hasil pengawasan intern yang dilakukan;	1) Penyusunan laporan pengawasan yang meliputi audit, pemantauan tindak lanjut temuan, reviu, evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pengawasan lainnya, yang menjadi kompilasi dari hasil pengawasan sehingga mempermudah pemantauan hasil pengawasan intern yang dilakukan;	Triwulan IV	

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		3. Penyampaian tindak lanjut dan pelaksanaan evaluasi tindak lanjut melalui aplikasi berbasis web yaitu aplikasi SAPA APIP sehingga mempermudah bagi *auditee* untuk melakukan tindak lanjut di manapun dan kapanpun.	3) Penyampaian tindak lanjut dan pelaksanaan evaluasi tindak lanjut melalui aplikasi berbasis web yaitu aplikasi SAPA APIP sehingga mempermudah bagi *auditee* untuk melakukan tindak lanjut di manapun dan kapanpun.	Triwulan III sd Triwulan IV	3) Penyampaian tindak lanjut dan pelaksanaan evaluasi tindak lanjut melalui aplikasi berbasis web yaitu aplikasi SAPA APIP sehingga mempermudah bagi *auditee* untuk melakukan tindak lanjut di manapun dan kapanpun.	2) Penyampaian tindak lanjut dan pelaksanaan evaluasi tindak lanjut melalui aplikasi berbasis web yaitu aplikasi SAPA APIP sehingga mempermudah bagi *auditee* untuk melakukan tindak lanjut di manapun dan kapanpun.	Triwulan IV	
		4. Secara konsisten mengawal tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan intern sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan pada Sistem Manajemen Mutu;	4) Secara konsisten mengawal tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan intern sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan pada Sistem Manajemen Mutu;	Triwulan III sd Triwulan IV	-	3) Secara konsisten mengawal tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan intern sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan pada	Triwulan IV	

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		5. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam monitoring dan evaluasi serta menyempurnakan integrasi data pengawasan intern serta fitur aplikasi berbasis web “Sapa APIP”. Dengan dimanfaatkannya aplikasi tersebut, audit dan proses tindak lanjutnya dapat dilakukan melalui aplikasi, sehingga memberi kontribusi langsung pada percepatan penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan intern oleh unit kerja auditan;	5) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam monitoring dan evaluasi serta menyempurnakan integrasi data pengawasan intern serta fitur aplikasi berbasis web “Sapa APIP”. Dengan dimanfaatkannya aplikasi tersebut, audit dan proses tindak lanjutnya dapat dilakukan melalui aplikasi, sehingga memberi kontribusi langsung pada percepatan penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan intern oleh unit kerja auditan;	Triwulan III sd Triwulan IV	4) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam monitoring dan evaluasi serta menyempurnakan integrasi data pengawasan intern serta fitur aplikasi berbasis web “Sapa APIP”. Dengan dimanfaatkannya aplikasi tersebut, audit dan proses tindak lanjutnya dapat dilakukan melalui aplikasi, sehingga memberi kontribusi langsung pada percepatan penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan intern oleh unit kerja auditan;	4) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam monitoring dan evaluasi serta menyempurnakan integrasi data pengawasan intern serta fitur aplikasi berbasis web “Sapa APIP”. Dengan dimanfaatkannya aplikasi tersebut, audit dan proses tindak lanjutnya dapat dilakukan melalui aplikasi, sehingga memberi kontribusi langsung pada percepatan penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan intern oleh unit kerja auditan;	Triwulan IV	

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		6. Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut APIP secara berkala setiap bulan.	6) Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut APIP secara berkala setiap bulan.	Triwulan III sd Triwulan IV	5) Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut APIP secara berkala setiap bulan.	5) Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut APIP secara berkala setiap bulan.	Triwulan IV	
		Selain dari kegiatan di atas, dilakukan juga kegiatan yang mendukung tercapainya IKU ini yaitu:	Selain dari kegiatan di atas, dilakukan juga kegiatan yang mendukung tercapainya IKU ini yaitu:		Selain dari kegiatan di atas, dilakukan juga kegiatan yang mendukung tercapainya IKU ini yaitu:	Selain dari kegiatan di atas, dilakukan juga kegiatan yang mendukung tercapainya IKU ini yaitu:	-	
		1. Melakukan rapat koordinasi penyamaan persepsi tindak lanjut APIP guna menentukan action plan, dan koordinasi antar tim setiap bulan	1) Melakukan rapat koordinasi penyamaan persepsi tindak lanjut APIP guna menentukan action plan, dan koordinasi antar tim setiap bulan	Triwulan III	1) Melakukan rapat koordinasi penyamaan persepsi tindak lanjut APIP guna menentukan action plan, dan koordinasi antar tim setiap bulan	-	-	

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		2. Pengiriman surat setiap triwulan ke auditee yang memiliki persentase tinggi untuk temuan tang belum ditindaklanjuti untuk dapat mengakselerasi pemenuhan tindak lanjut	2) Pengiriman surat setiap triwulan ke auditee yang memiliki persentase tinggi untuk temuan tang belum ditindaklanjuti untuk dapat mengakselerasi pemenuhan tindak lanjut	Triwulan III	2) Pengiriman surat setiap triwulan ke auditee yang memiliki persentase tinggi untuk temuan tang belum ditindaklanjuti untuk dapat mengakselerasi pemenuhan tindak lanjut	-	-	
		3. Mengintegrasikan kertas kerja pengecekan pemenuhan tindak lanjut sebagai kertas kerja capaian Indikator Kinerja Induvidu masing-masing pegawai	3) Mengintegrasikan kertas kerja pengecekan pemenuhan tindak lanjut sebagai kertas kerja capaian Indikator Kinerja Induvidu masing-masing pegawai	Triwulan III sd Triwulan IV	-	1) Mengintegrasikan kertas kerja pengecekan pemenuhan tindak lanjut sebagai kertas kerja capaian Indikator Kinerja Induvidu masing-masing pegawai	Triwulan IV	

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
8	Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	Merupakan indikator lanjutan dari periode renstra Inspektorat Utama 2020-2024. realisasi pada periode renstra Inspektorat Utama 2020-2024 telah mencapai target. Pengukuran kinerja dilakukan secara rutin setiap bulan. Dalam mencapai target Inspektorat Utama melakukan hal berikut: tidak ditemukan kendala yang berarti.	1) Melakukan pengembangan aplikasi SOLUSI agar lebih mengakomodir hal-hal pendukung yang dibutuhkan APIP dalam menjawab pertanyaan, Pemantauan dan menjawab pertanyaan SOLUSI max 5 HK, serta Memfasilitasi SDM BPOM dalam melakukan konsultasi dengan mudah	Triwulan III sd Triwulan IV	Melakukan pengembangan aplikasi SOLUSI agar lebih mengakomodir hal-hal pendukung yang dibutuhkan APIP dalam menjawab pertanyaan, Pemantauan dan menjawab pertanyaan SOLUSI max 5 HK, serta Memfasilitasi SDM BPOM dalam melakukan konsultasi dengan mudah	Melakukan pengembangan aplikasi SOLUSI agar lebih mengakomodir hal-hal pendukung yang dibutuhkan APIP dalam menjawab pertanyaan, Pemantauan dan menjawab pertanyaan SOLUSI max 5 HK, serta Memfasilitasi SDM BPOM dalam melakukan konsultasi dengan mudah	Triwulan IV	Seluruh rencana aksi telah dilaksanakan dan indikator mencapai target bulanan yang ditetapkan

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		1. Pengembangan aplikasi SOLUSI agar lebih mengakomodir hal-hal pendukung yang dibutuhkan APIP dalam menjawab pertanyaan, pemantauan dan menjawab pertanyaan SOLUSI max 5 HK, serta memfasilitasi SDM BPOM dalam melakukan konsultasi dengan mudah,	2) Mendorong Tim Kerja untuk mengakselerasi penyelesaian SOLUSI sesuai dengan kebutuhan mitra pengawasan sehingga menghasilkan capaian rata-rata penyelesaian di level 2 hari.	Triwulan III	Mendorong Tim Kerja untuk mengakselerasi penyelesaian SOLUSI sesuai dengan kebutuhan mitra pengawasan sehingga menghasilkan capaian rata-rata penyelesaian di level 2 hari.	-		
		2. Mendorong Tim Kerja untuk mengakselerasi penyelesaian SOLUSI sesuai dengan kebutuhan mitra pengawasan sehingga menghasilkan capaian rata-rata penyelesaian di level 2 hari.	3) Pelaksanaan SOLUSI juga mengoptimalkan skema konsultasi yang dimiliki oleh pemilik kebijakan seperti fitur HaiDPJb Kementerian Keuangan.	Triwulan III	Pelaksanaan SOLUSI juga mengoptimalkan skema konsultasi yang dimiliki oleh pemilik kebijakan seperti fitur HaiDPJb Kementerian Keuangan.	-		
		3. pelaksanaan SOLUSI juga mengoptimalkan skema konsultasi yang dimiliki oleh pemilik kebijakan	4) Mengoptimalkan pengetahuan melalui skema Agen Perubahan dengan PALUGADA sebagai bank pengetahuan	Triwulan III sd Triwulan IV	-	Mengoptimalkan pengetahuan melalui skema Agen Perubahan dengan PALUGADA sebagai bank pengetahuan	Triwulan IV	

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		seperti fitur HaiDPJb Kementerian Keuangan.	serta mendorong penyelesaian untuk dipertahankan di level yang diharapkan seperti saat ini.			serta mendorong penyelesaian untuk dipertahankan di level yang diharapkan seperti saat ini.		
		4. Mengoptimalkan pengetahuan melalui skema Agen Perubahan dengan PALUGADA sebagai bank pengetahuan serta mendorong penyelesaian untuk dipertahankan di level yang diharapkan seperti saat ini.						
9	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	Merupakan indikator lanjutan dari periode renstra Inspektorat Utama 2020-2024. Realisasi pada periode renstra Inspektorat Utama 2020-2024 telah mencapai target. Pengukuran kinerja dilakukan per triwulan. Realisasi per bulan Juni 2025, **target tidak tercapai karena adanya pengaduan yang baru**	1. Melaksanakan rencana tindak lanjut triwulan II, yaitu dengan:		1. Melaksanakan rencana tindak lanjut triwulan II, yaitu dengan:	**1. Rencana aksi pada triwulan selanjutnya:**		Seluruh rencana aksi telah dilaksanakan dan indikator mencapai target bulanan yang ditetapkan

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		masuk dan perlunya telaah lebih lanjut. Pada triwulan II tahun 2025 terdapat rencana aksi indikator terkait pada laporan kinerja interim triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:						
		1. Melakukan telaah awal dan audit tujuan tertentu terhadap pengaduan yang belum selesai ditindaklanjuti	1) Melakukan telaah awal dan audit tujuan tertentu terhadap pengaduan yang belum selesai ditindaklanjuti	Triwulan III sd Triwulan IV	1) Melakukan telaah awal dan audit tujuan tertentu terhadap pengaduan yang belum selesai ditindaklanjuti	-	-	
		2. Mengoptimalkan klarifikasi tindak lanjut hasil Pengaduan secara online kepada pihak terkait;	2) Mengoptimalkan klarifikasi tindak lanjut hasil Pengaduan secara online kepada pihak terkait;	Triwulan III sd Triwulan IV	2) Mengoptimalkan klarifikasi tindak lanjut hasil Pengaduan secara online kepada pihak terkait;	-	-	
		3. Melaksanakan bimbingan teknis aplikasi sang integritas kepada unit kerja di BPOM; dan	3) Melaksanakan bimbingan teknis aplikasi sang	Triwulan III sd Triwulan IV	3) Melaksanakan bimbingan teknis aplikasi sang	1) Melaksanakan bimbingan teknis aplikasi sang integritas kepada	Triwulan IV	

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
			integritas kepada unit kerja di BPOM; dan		integritas kepada unit kerja di BPOM; dan	unit kerja di BPOM; dan		
		4. Publikasi materi terkait pengaduan masyarakat dan whistleblowing system pada media sosial.	4) Publikasi materi terkait pengaduan masyarakat dan whistleblowing system pada media sosial.	Triwulan III sd Triwulan IV	4) Publikasi materi terkait pengaduan masyarakat dan whistleblowing system pada media sosial.	2) Publikasi materi terkait pengaduan masyarakat dan whistleblowing system pada media sosial.	Triwulan IV	
		Selain itu pada TW III juga telah dilaksanakan kegiatan untuk mendukung IKU ini yaitu:	Selain itu pada TW III juga telah dilaksanakan kegiatan untuk mendukung IKU ini yaitu:		Selain itu pada TW III juga telah dilaksanakan kegiatan untuk mendukung IKU ini yaitu:			
		1. Pemutakhiran definisi operasional dan cara perhitungan IKU	1) Pemutakhiran definisi operasional dan cara perhitungan IKU	Triwulan III	1) Pemutakhiran definisi operasional dan cara perhitungan IKU	-		

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
10	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	Merupakan indikator lanjutan dari periode renstra Inspektorat Utama 2020-2024. Realisasi pada periode renstra Inspektorat Utama 2020-2024 telah mencapai target. Dalam mencapai target 2025 Inspektorat melakukan kegiatan yang mendukung dalam implementasi Kapabilitas APIP yang lebih baik. Pada triwulan II tahun 2025 terdapat rencana aksi indikator terkait pada laporan kinerja interim triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:	1. Melaksanakan rencana tindak lanjut triwulan II, yaitu dengan:		1. Melaksanakan rencana tindak lanjut triwulan II, yaitu dengan:	**1. Rencana aksi pada triwulan selanjutnya:**		Seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sehingga indikator dapat mencapai target TW IV yang ditetapkan
		1. Melakukan *self assessment* penilaian kapabilitas APIP	1) Melakukan *self assessment* penilaian kapabilitas APIP	Triwulan III sd Triwulan IV	1) Melakukan *self assessment* penilaian kapabilitas APIP	-	Triwulan IV	

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		2. Rapat koordinasi penilaian kapabilitas APIP	2) Rapat koordinasi penilaian kapabilitas APIP	Triwulan III sd Triwulan IV	2) Rapat koordinasi penilaian kapabilitas APIP	1) Rapat koordinasi penilaian kapabilitas APIP	Triwulan IV	
		3. Menindaklanjuti rencana aksi yang telah disusun pada hasil rekomendasi evaluasi kapabilitas APIP tahun 2024	3) Menindaklanjuti rencana aksi yang telah disusun pada hasil rekomendasi evaluasi kapabilitas APIP tahun 2024	Triwulan III sd Triwulan IV	3) Menindaklanjuti rencana aksi yang telah disusun pada hasil rekomendasi evaluasi kapabilitas APIP tahun 2024	-	-	
		4. Menyusun kebijakan fungsi kepatuhan anti penyuapan	4) Menyusun kebijakan fungsi kepatuhan anti penyuapan dalam rangka penerapan Sistem Manajemen POM Terintegrasi di lingkungan BPOM	Triwulan III sd Triwulan IV	4) Menyusun kebijakan fungsi kepatuhan anti penyuapan dalam rangka penerapan Sistem Manajemen POM Terintegrasi di lingkungan BPOM	2) Menyusun kebijakan fungsi kepatuhan anti penyuapan dalam rangka penerapan Sistem Manajemen POM Terintegrasi di lingkungan BPOM		
		5. Melaksanakan penilaian Kapabilitas APIP di lingkungan Inspektorat Utama tahun 2025 berdasarkan	5) Melaksanakan penilaian Kapabilitas APIP di lingkungan Inspektorat Utama tahun 2025 berdasarkan		-	3) Melaksanakan penilaian Kapabilitas APIP di lingkungan Inspektorat Utama tahun 2025 berdasarkan		

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		kebijakan kapabilitas APIP terbaru.	kebijakan kapabilitas APIP terbaru.			kebijakan kapabilitas APIP terbaru.		
11	Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama	Indikator ini merupakan indikator baru yang ditetapkan pada TW III 2025 melalui revisi PK RAPK. Rencana aksi dari indikator ini adalah:	1. Persiapan Penilaian Telaah Sejawat di lingkup Inspektorat Utama, antara lain:	Triwulan III sd Triwulan IV	1) Persiapan penilaian telaah sejawat di lingkup Inspektorat Utama, antara lain	1) Persiapan penilaian telaah sejawat di lingkup Inspektorat Utama	Triwulan IV	Rencana aksi dapat dilaksanakan sehingga indikator dapat mencapai target TW IV yang ditetapkan
		1. Persiapan Penilaian Telaah Sejawat di lingkup Inspektorat Utama, antara lain:	a) Penyiapan link kertas kerja telaah sejawat intern	Triwulan III sd Triwulan IV	a) Penyiapan link kertas kerja telaah sejawat intern	a) Penyiapan link kertas kerja telaah sejawat intern	Triwulan IV	
		a) Penyiapan link kertas kerja telaah sejawat intern	b) Pembuatan SK Tim Telaah Sejawat Intern	Triwulan III sd Triwulan IV	b) Pembuatan SK Tim Telaah Sejawat Intern	b) Pembuatan SK Tim Telaah Sejawat Intern	Triwulan IV	
		b) Pembuatan SK Tim Telaah Sejawat Intern	2. Entry Meeting pelaksanaan telaah sejawat intern	Triwulan III sd Triwulan IV	2. Entry Meeting pelaksanaan telaah sejawat intern	2. Entry Meeting pelaksanaan telaah sejawat intern	Triwulan IV	

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		2. Entry Meeting pelaksanaan telaah sejawat intern	3. Pelaksanaan telaah sejawat intern	Triwulan III sd Triwulan IV	3. Pelaksanaan telaah sejawat intern	3. Pelaksanaan telaah sejawat intern	Triwulan IV	
		3. Pelaksanaan telaah sejawat intern	4. Pelaporan telaah sejawat intern	Triwulan III sd Triwulan IV	4. Pelaporan telaah sejawat intern	4. Pelaporan telaah sejawat intern	Triwulan IV	
		4. Pelaporan telaah sejawat intern						

3.3 Realisasi Anggaran

3.3.1 Realisasi Anggaran

Secara umum, pelaksanaan pengelolaan keuangan Inspektorat Utama telah diupayakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi instansi pemerintah dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang–Undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran Inspektorat Utama secara lengkap dan rinci dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan rekonsiliasi dengan unit KPPN setempat. Adapun hasil pelaporan dan rekonsiliasi ini telah disetujui dan telah dibuatkan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) antara Inspektorat Utama dengan KPPN setempat. Inspektorat Utama memiliki pagu awal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp19.427.456.000,-. Berdasarkan Surat Edaran Sekretariat Utama Nomor B-PR.05.03.2.01.25.07 perihal Penyampaian Mekanisme Pemanfaatan Optimalisasi Sisa Anggaran TA 2025, dilakukan pemblokiran anggaran akun Perjalanan Dinas sebesar 50%, dengan nilai sebesar Rp4.350.244.000,-. Selanjutnya, sehubungan dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja, serta menindaklanjuti Surat Edaran Sekretariat Utama Nomor B-PR.05.03.2.02.25.82 perihal Penyampaian Data Besaran Anggaran Melalui Pemblokiran Mandiri dalam Rangka Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025, Inspektorat Utama melakukan pemblokiran mandiri sebesar Rp5.579.264.000,-. Selain itu, Inspektorat Utama melakukan revisi anggaran untuk pemenuhan kebutuhan PPNPN sebesar Rp220.520.000,-, sesuai dengan Surat Edaran Sekretariat Utama Nomor B-PR.05.03.2.03.25.145 perihal Revisi Optimalisasi Anggaran Belanja Modal TA 2025. Selanjutnya, berdasarkan Surat Edaran Sekretariat Utama Nomor KU.02.03.2.06.25.363, Inspektorat Utama juga melakukan revisi anggaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan Belanja Pegawai Existing dan Anggaran CASN TA 2025 sebesar Rp1.411.020.000,-. Dengan memperhatikan seluruh perubahan tersebut, total pagu anggaran Inspektorat Utama Tahun 2025 menjadi sebesar Rp21.058.996.000,- dan dengan blokir anggaran Rp 9.929.508.000,-.

Penyerapan anggaran Inspektorat Utama pada Triwulan III tahun 2025 untuk pelaksanaan program Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah sebesar

sebesar **Rp8.315.424.786,- atau 39,49% berdasarkan aplikasi OMSPAN, dan Rp8.954.990.257,- atau 42,52%** dari jumlah **keseluruhan pagu Rp21.058.996.000,-**, untuk pelaksanaan 2 (dua) kegiatan, yaitu : (1) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I (Inspektorat I) dan (2) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II (Inspektorat II) dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 51 Realisasi Anggaran Inspektorat Utama Triwulan III Tahun Anggaran 2025

No.	Program/Kegiatan/Output	Anggaran non Blokir			Anggaran dengan Blokir		
		Pagu	Realisasi SAKTI	Capaian	Pagu	Realisasi SAKTI	Capaian
4115	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	10.068.265.000	8.084.786.752	80,30%	15.605.847.000	8.084.786.752	51,81%
4116	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	1.061.223.000	870.203.505	82,00%	5.453.149.000	870.203.505	15,96%
Total		**11.129.488.000**	**8.954.990.257**	**80,46%**	**21.058.996.000**	**8.954.990.257**	**42,52%**

**Berdasarkan data SAKTI per 30 September 2025*

No.	Program/Kegiatan/Output	Anggaran non Blokir			Anggaran dengan Blokir		
		Pagu	Realisasi OMSPAN	Capaian	Pagu	Realisasi OMSPAN	Capaian
4115	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	10.068.265.000	7.450.745.949	74,00%	15.605.847.000	7.450.745.949	47,74%
4116	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	1.061.223.000	864.678.837	81,48%	5.453.149.000	864.678.837	15,86%
Total		**11.129.488.000**	**8.315.424.786**	**74,72%**	**21.058.996.000**	**8.315.424.786**	**39,49%**

**Berdasarkan data OMSPAN per 30 September 2025*

Selanjutnya untuk realisasi anggaran secara detail jika dibandingkan dengan realisasi kinerja di setiap indikator, realisasi anggaran per Sasaran Program, dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 52 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Indikator Inspektorat Utama Triwulan III 2025

Sasaran Program	Indikator Kinerja		Kinerja (Kumulatif)									Anggaran (Kumulatif)						
			Target			Realisasi			Capaian %			Pagu	Realisasi			Capaian %		
			B07	B08	B09	B07	B08	B09	B07	B08	B09	(Dalam ribuan rupiah)	B07	B08	B09	B07	B08	B09
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	IKU 1.1	Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama										518.816	338.954	356.690	424.894	62,28%	65,54%	81,90%
	IKU 1.2	Nilai Pembangunan ZI Inspektorat Utama										129.463	85.321	92.455	102.570	87,14%	94,43%	79,12%
	IKU 1.3	Nilai AKIP Inspektorat Utama										216	216	216	216	100%	100%	100%
	IKU 1.4	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama										9.279.353	5.842.450	6.806.520	7.515.696	85,67%	99,80%	80,99%
	IKU 1.5	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama										-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	IKU 2.1	Persentase Laporan layanan jasa *assurance* pada mitra kerja inspektorat Utama yang dilaksanakan sesuai standar mutu	100%	IKU sudah tidak relevan dengan revisi PK 2025		100%	IKU sudah tidak relevan dengan revisi PK 2025		100%	IKU sudah tidak relevan dengan revisi PK 2025		888.376	**592.129***	Sudah dilakukan penggantian IKU		66,65%	Sudah dilakukan penggantian IKU	
	IKU 2.1	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama		merupakan penyesuaian IKU sesuai revisi PK 2025			merupakan penyesuaian IKU sesuai revisi PK 2025			merupakan penyesuaian IKU sesuai revisi PK 2025		330.417	18.400	18.400	252.411	79,53%	79,53%	76,39%
	IKU 2.2	Persentase rekomendasi pengawasan assurance yang ditindaklanjuti	92%	92%	92%	95,90%	94,46 %	95,46 %	104,24 %	102,68 %	103,76 %	626.865	-	470.802	521.739	0,00%	75,11%	82,23%

INSPEKTORAT UTAMA

Sasaran Program	Indikator Kinerja		Kinerja (Kumulatif)									Anggaran (Kumulatif)						
			Target			Realisasi			Capaian %			Pagu	Realisasi			Capaian %		
			B07	B08	B09	B07	B08	B09	B07	B08	B09	(Dalam ribuan rupiah)	B07	B08	B09	B07	B08	B09
	IKU 2.3	Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	98%	98%	98%	100%	100%	100%	102,04 %	102,04 %	102,04 %	16.155	-	-	1.520	-	-	9,41%
	IKU 2.4	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	70%	75%	80%	66,67%	64,40 %	93,75 %	95,24%	85,57%	117,19 %	31.840	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional	IKU 3.1	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP										169.483	108.777	113.344	117.541	64,18%	66,87%	69,35%
	IKU 3.2	Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama		merupakan penyesuaian IKU sesuai revisi PK 2025			merupakan penyesuaian IKU sesuai revisi PK 2025			merupakan penyesuaian IKU sesuai revisi PK 2025		26.700		merupakan penyesuaian IKU sesuai revisi PK 2025			merupakan penyesuaian IKU sesuai revisi PK 2025	
											Total	**11.129.488**	**6.986.246**	**8.086.529**	**8.954.990**	**62,17%**	**72,66%**	**80,46%**
											AA	**9.929.508**						
											Total pagu + AA	**21.058.996**						

3.3.2 Realisasi Anggaran per Sasaran

Realisasi anggaran Inspektorat Utama dilakukan per sasaran program juga per sasaran kegiatan untuk dapat melihat sejauh mana realisasi anggaran yang mendukung di masing-masing sasaran dan indikator kinerja. secara lebih detail, dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 53 Capaian Realisasi Anggaran per Sasaran Program Inspektorat Utama Triwulan III 2025

Sasaran Program	Indikator Kinerja		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	IKSP 1.1	Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	518,816,000	424,894,286	81.90%
	IKSP 1.2	Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama	129,643,000	102,570,569	79.12%
	IKSP 1.3	Nilai AKIP Inspektorat Utama	216,000	216,000	100.00%
	IKSP 1.4	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	9,279,353,000	7,515,695,671	80.99%
	IKSP 1.5	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	-	-	-
Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	IKSP 2.1	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	330,417,000	252,411,686	76.39%
	IKSP 2.2	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	626,865,000	521,739,562	83.23%
	IKSP 2.3	Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	16,155,000	1,520,000	9.41%
	IKSP 2.4	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	31,840,000	-	0.00%
Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional	IKSP 3.1	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	169,483,000	117,541,663	69.35%
	IKSP 3.2	Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama	26,700,000	18,400,000	68.91%
Total			11,129,488,000	8,954,989,437	80.46%
Blokir Anggaran Inspektorat Utama			9,929,508,000		

**Berdasarkan data SAKTI per 30 September 2025*

Tabel 54 Capaian Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan Inspektorat I Triwulan III 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat I	Persentase Keberhasilan Tingkat Pembangunan Zona Integritas Unit kerja	99,954,000	87,438,862	87.48%
	Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPOM	25,660,000	-	-
	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	-	-	-
	Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM	-	-	-
	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	174,674,000	154,593,291	88.50%
	Nilai Pembangunan ZI Inspektorat I	129,643,000	102,570,569	79.12%
	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Inspektorat I sesuai standar	216,000	216,000	100.00%
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat I	8,892,782,000	7,194,944,344	80.91%
	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat I	-	-	-
Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat I	330,417,000	252,411,686	76.39%
	Persentase rekomendasi pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat I yang ditindaklanjuti	324,719,000	258,723,965	79.68%
	Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja inspektorat I yang ditindaklanjuti tepat waktu	16,155,000	1,520,000	9.41%
	Persentase pengaduan wilayah pengawasan Inspektorat I yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	31,840,000	-	-
Terwujudnya Inspektorat I yang profesional	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	15,505,000	13,967,215	90.08%
	Nilai telaah sejawat intern Inspektorat I	26,700,000	18,400,000	68.91%
Total		10,068,265,000	8,084,785,932	80.30%
Blokir Anggaran Inspektorat I		5,537,582,000		

**Berdasarkan data SAKTI per 30 September 2025*

Tabel 55 Capaian Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan Inspektorat II Triwulan III 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat II	Persentase Keberhasilan Tingkat Pembangunan Zona Integritas Unit kerja	113,578,000	113,577,273	100.00%
	Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPOM	14,300,000	-	-
	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	-	-	-
	Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM	30,350,000	30,349,860	100.00%
	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	60,300,000	38,935,000	64.57%
	Nilai Pembangunan ZI Inspektorat II	-	-	-
	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Inspektorat II sesuai standar	-	-	-
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat II	386,571,000	320,751,327	82.97%
	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat II	-	-	-
Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat II	-	-	-
	Persentase rekomendasi pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat II yang ditindaklanjuti	302,146,000	263,015,597	87.05%
	Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja inspektorat II yang ditindaklanjuti tepat waktu	-	-	-
	Persentase pengaduan wilayah pengawasan Inspektorat II yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	-	-	-
Terwujudnya Inspektorat II yang profesional	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	153,978,000	103,574,448	67.27%
	Nilai telaah sejawat intern Inspektorat II	-	-	-
Total		1,061,223,000	870,203,505	82.00%
Blokir Anggaran Inspektorat II		4,391,926,000		

**Berdasarkan data SAKTI per 30 September 2025*

3.3.3 Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan pencapaian output dari suatu sasaran. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu sasaran untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu sasaran diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE) yang diperoleh.

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\%\ Capaian\ Output}{\%\ Capaian\ Input}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\%\ Rencana\ Capaian\ Output}{\%\ Rencana\ Capaian\ Input} = 100\% = 1$$

Efisiensi suatu sasaran/kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Jika IE ≥ SE, maka sasaran/kegiatan dianggap efisien

Jika IE < SE, maka sasaran/egiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap sasaran/kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing sasaran/kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

INSPEKTORAT UTAMA

Tingkat efisiensi pencapaian sasaran dan indikator kinerja Inspektorat Utama triwulan III tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 56 Pengukuran Efisiensi Pencapaian Sasaran Program Inspektorat Utama Triwulan III tahun 2025

Sasaran	Indikator	Realisasi Anggaran TW III per IKU	Nilai Pencapaian Indikator	Realisasi Anggaran per Sasaran	Nilai Kinerja per Sasaran	Indeks Efisiensi (IE)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	77.60%	-	76.47%	Diukur pada triwulan IV	-	1	-	Belum dapat disimpulkan
	Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama	103.82%	-						
	Nilai AKIP Inspektorat Utama	100.00%	-						
	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	100.92%	-						
	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	0.00%	-						
Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	77.47%	-	92.71%	107.66%	1.16	1	0.16	Efisien
	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	107.95%	103.76%						

INSPEKTORAT UTAMA

Sasaran	Indikator	Realisasi Anggaran TW III per IKU	Nilai Pencapaian Indikator	Realisasi Anggaran per Sasaran	Nilai Kinerja per Sasaran	Indeks Efisiensi (IE)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
	Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	0.00%	102.04%						
	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	0.00%	117.19%						
Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	77.48%	-	78.51%	Diukur pada triwulan IV 2025	-	1	-	Belum dapat disimpulkan
	Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama	79.53%	-						

Dari Tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) dari 3 (tiga) sasaran diselenggarakan dengan efisien, yang ditunjukkan dengan nilai Indeks Efisiensi (IE) yang lebih besar dari 1. Sedangkan pencapaian 2 (dua) sasaran diselenggarakan dengan hasil belum dapat disimpulkan, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran Program (1) "Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama" dengan indikator kinerja (1) Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama; (2) Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama; (3) Nilai AKIP Inspektorat Utama; (4) Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama; dan (5) Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama dinyatakan belum dapat disimpulkan hal ini dikarenakan realisasi kinerja belum dapat diukur pada triwulan III 2025, dan baru dilakukan pengukuran pada akhir tahun 2025.

2. Sasaran Program (3) "Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional" dengan indikator kinerja (1) Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP; dan (2) Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama dinyatakan belum dapat disimpulkan hal ini dikarenakan realisasi kinerja belum dapat diukur pada triwulan III 2025, dan baru dilakukan pengukuran pada akhir tahun 2025.

Sasaran program memiliki kategori belum dapat disimpulkan karena kinerja baru dapat diukur pada akhir tahun 2025. Secara lebih rinci dapat dilihat pada **bab 3.1 Capaian Kinerja Organisasi**

BRANDING PENGAWASAN



4.1 INOVASI PENGAWASAN (APLIKASI)
4.2 *SHARING KNOWLEDGE*
4.3 PENGHARGAAN
4.4 LAIN-LAIN

BAB 04

4.1 Inovasi Pengawasan (Aplikasi)

Inspektorat Utama BPOM memiliki aplikasi demi menunjang sistem pengawasan yang lebih efektif dan efisien. Aplikasi tersebut diantaranya:

1. **SAPA APIP (Sistem Aplikasi Terpadu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)**

   Peran Inspektorat Utama sebagai pengawasan intern semakin strategis dan bergerak mengikuti kebutuhan zaman. Inspektorat Utama diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang menciptakan nilai tambah pada layanan instansi pemerintah dan mewujudkan kepemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*). Pengawasan intern menghadapi tantangan berupa peningkatan pengawasan obat dan makanan dan pelayanan publik Badan POM secara daring untuk memudahkan akses dan jangkauan masyarakat.

   Perkembangan pengawasan Badan POM berbasis digital menuntut cara untuk melaksanakan pengawasan intern turut berubah. Penerapkan *e-governance* dalam pengawasan intern merupakan keniscayaan. Disisi lain, penambahan jumlah Satuan Kerja Badan POM yang menjadi mitra kerja pengawasan Inspektorat Utama tidak diimbangi dengan penambahan jumlah auditor Inspektorat Utama.

   Sebagai salah satu upaya transformasi Inspektorat Utama menjadi *Trusted Advisor* peran Inspektorat Utama dapat ditingkatkan dengan menggunakan teknologi informasi untuk melaksanakan pengawasan Intern. Pengembangan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer (TPBK) melalui pengembangan SAPA APIP (https://sapaapip.pom.go.id/admin/login) dan integrasinya dengan Badan POM *Operation Center* akan menghasilkan pengawasan intern yang lebih mudah, lebih efisien dan lebih efektif dan penyediaan data/informasi kinerja dan integritas aparatur secara cepat, tepat, akurat dan akuntabel (*real time*).

2. **SOLUSI (Saluran *Online* Layanan untuk Konsultasi)**

   SOLUSI (https://solusi.pom.go.id/) atau Saluran *Online* Layanan Untuk Konsultasi merupakan media layanan konsultasi yang dikembangkan

dalam rangka pemenuhan peran Inspektorat Utama sebagai "*Trusted Advisor*".

SOLUSI merupakan salah satu bentuk pengembangan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer (TPBK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada aspek pengawasan lainnya berupa layanan konsultasi secara *daring*.

Melalui Pengembangan SOLUSI diharapkan Inspektorat Utama menyediakan kanal informasi yang dapat digunakan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan POM.

Manfaat dari aplikasi SOLUSI yaitu:

a. Menyediakan kanal / saluran komunikasi yang kredible, komprehensif, aman, up to date dan informatif yang mudah diakses oleh Aparatur Sipil Negara Badan POM;
b. Kanal sharing knowledge di bidang tata kelola pemerintahan, manajemen risiko, pengendalian intern dan pelaksanaan anggaran belanja negara.

3. *INSPIRING AUDIT* (Inspektorat *Managing and Monitoring Audit System*)

Inspektorat Utama BPOM telah meluncurkan aplikasi *Inspiring Audit* yang merupakan resensi dari modul PKPT dan modul Diklat Pegawai Inspektorat Utama BPOM.

Pada modul PKPT terdapat menu program pengawasan tahunan dimulai dari PKPT hingga pelaporan, sedangkan pada modul Diklat Pegawai, pegawai Inspektorat Utama BPOM dapat melihat serta mendownload rekap diklat yang telah diikuti.

4. SANG INTEGRITAS

Sang Integritas atau Sistem Informasi Benturan Kepentingan, *Whistleblowing System* dan Gratifikasi (https://sangintegritas.pom.go.id/) merupakan aplikasi berbasis *web* hasil pembaharuan atas aspek kemudahan *tracking* dan pelaporan dari layanan sebelumnya (rb.pom.go.id) dan sistem layanan ini mengakomodir 3 (tiga) fitur pelaporan yaitu Pelaporan WBS, Benturan Kepentingan, dan Gratifikasi.

5. ATRAKSI BMN

Atraksi BMN merupakan salah satu inovasi dengan dasar atas isu-isu yang ada pada Inspektorat Utama BPOM yaitu: belum diketahui identitas (jenis/tipe, tahun/nilai perolehan, letak barang maupun kondisi) BMN; belum terinformasi kepada publik atau pihak manapun yang membutuhkan daftar inventaris barang yang termutakhir; risiko pencatatan BMN yang fisiknya telah rusak berat namun masih tercatat dalam kondisi baik; belum terkelolanya pengendalian dalam pengawasan BMN yang sudah diregister di satker Inspektorat Utama; belum efektifnya pergantian dokumen dalam pembaharuan data dukung hasil pemindai barang. Dari isu-isu tersebut, Inspektorat Utama BPOM membuat inovasi Digitalisasi dengan Atraksi (*Asset Tracking System* Inspektorat Utama) dengan beberapa *tools* seperti *google drive*; QR Code; dan Aplikasi QR *Code* berbasis Apps Android maupun Apps IOS di Smartphone.

4.2 SHARING KNOWLEDGE

1. *Sharing Session* Laboratorium Forensik Digital

Pada tanggal 13 Februari 2025, Inspektorat Utama berkunjung ke Laboratorium Forensik Digital di Direktorat Siber Obat dan Makanan yang dihadiri oleh Bapak Tubagus Ade Hidayat selaku Deputi Bidang Penindakan, Bapak Nur Iskandarsyah selaku Direktur Siber, beserta Tim Direktorat Siber dan Tim Inspektorat Utama.

Bapak Inspektur Utama memaparkan perkembangan digital *fraud crime*, yaitu pemanfaatan media *computer* (digital) sebagai alat untuk melakukan dan menyembunyikan *fraud*, mengharuskan adanya pengembangan metode dan langkah kerja audit, salah satunya dalam bentuk digital *forensics*. Forensik digital merupakan suatu ilmu pengetahuan dan keahlian untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisa dan menguji bukti-bukti digital. Bukti digital memiliki karakteristik yang berbeda bila dibandingkan dengan bukti dokumen konvensional, dibutuhkan tools yang tepat untuk mengolah bukti digital. Teknik forensik digital dapat menjadi *tools* bagi APIP untuk mengumpulkan dan mendapatkan bukti audit dari media digital melalui

cara-cara yang sesuai dengan regulasi dan peraturan perundang-undangan.

Diakhir, Bapak Inspektur Utama berharap *sharing session* ini akan memberikan manfaat signifikan dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas kinerja pengawasan obat dan makanan.



Gambar 8 Sharing Session Laboratorium Forensik Digital

2. Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berkunjung ke Inspektorat Utama BPOM dalam rangka studi banding terkait praktik baik program pengendalian gratifikasi. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bapak Andi Kurniawan selaku Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Bapak Muhammad Anis selaku Auditor Ahli Madya Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, dan tim Auditor dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Studi banding ini disambut langsung oleh Inspektur Utama BPOM yang merupakan suatu kehormatan bagi Inspektorat Utama BPOM dapat dikunjungin oleh tim Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Inspektur Utama BPOM juga memaparkan BPOM telah melakukan berbagai upaya pengendalian gratifikasi. Pada level kebijakan, BPOM telah menyusun Peraturan BPOM Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan BPOM yang telah mengalami beberapa kali perubahan. Peraturan tersebut digunakan sebagai

panduan seluruh personel dan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) dalam melaksanakan pengendalian gratifikasi.

Untuk mendukung transformasi digitalisasi, BPOM mengembangkan aplikasi pelaporan gratifikasi yaitu SANG INTEGRITAS. Melalui aplikasi ini, seluruh pegawai dapat segera melaporkan penerimaan/penolakan gratifikasi. Laporan tersebut selanjutnya akan diverifikasi oleh UPG Unit di Unit Kerja dan kemudian diteruskan ke Inspektorat Utama sebagai UPG Instansi.

Diakhir, Inspektur Utama BPOM berharap kegiatan hari ini dapat menjadi media bertukar informasi, saling memberikan inspirasi dan manfaat, terutama dalam meningkatkan peran sebagai salah satu agen perubahan dalam proses pembangunan budaya anti korupsi.



Gambar 9 Dokumentasi Kunjungan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

3. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Untuk memperkuat kolaborasi dalam pengawasan program strategis pemerintah khususnya di bidang pengawasan obat dan makanan, Inspektorat Utama BPOM melaksanakan kegiatan audiensi dengan Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam dan Pembangunan Manusia BPKP pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025.

Dalam kesempatan tersebut, Inspektur Utama menyampaikan berbagai capaian yang telah diraih BPOM dan proses BPOM untuk meraih predikat *WHO Listed Authority* (WLA) untuk mewujudkan sistem pengawasan obat dan makanan yang berdaya saing global. Selain itu, untuk menjawab berbagai tantangan baru yang dihadapi Inspektorat Utama BPOM dalam pengawalan program-program strategis nasional, diperlukan sinergi dan kolaborasi Inspektorat Utama BPOM dengan BPKP untuk memperkuat peran pengawasan secara lebih adaptif, responsif, dan akuntabel.

Inspektorat Utama secara terbuka untuk terus membangun sinergi yang konstruktif dengan BPKP untuk memperoleh arahan, masukan strategis, serta peluang sinergi pengawasan yang lebih efektif dan terintegrasi, guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional secara akuntabel dan berkelanjutan.







Gambar 10 Inspektorat Utama BPOM Lakukan Audiensi dengan BPKP

4. Komisi Nasional HAM

Pada hari Senin tanggal 14 Juli 2025 Inspektorat Utama BPOM menerima kunjungan kerja Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal Komnas HAM. Acara ini dihadiri oleh Inspektur I, Kepala Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama, beserta tim.

Kunjungan ini dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sharing session yang membahas terkait penguatan Kapabilitas APIP dan Praktik Audit Kinerja. Inspektur I dan para Auditor Inspektorat Utama memaparkan pengalaman dalam mencapai kapabilitas APIP dengan nilai mendekati 4, utamanya pada bagian Peran dan Layanan terdiri dari Audit Ketaatan; Audit Kinerja; Asurans atas Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Organisasi; dan Jasa Konsultasi dengan secara khusus pendalaman pada Audit Kinerja.

Pertemuan ini diwarnai oleh diskusi produktif yang memperkaya kedua belah pihak untuk peningkatan kapabilitas APIP di Komnas HAM maupun di BPOM yang bermuara pada peningkatan kapasitas pengawasan intern di Indonesia.



Gambar 11 Komisi Nasional HAM

4.3 PENGHARGAAN

1. **Pegawai Teladan Inspektorat Utama Tahun 2024**

   Pada tanggal 28 Februari 2025 Inspektorat Utama BPOM memberikan penghargaan terhadap 15 pegawai teladan tahun 2024. Hal ini merupakan bentuk apresiasi terhadap pegawai atas kerja keras, ketulusan, dan integritas.

   Inspektorat Utama ucapkan Selamat kepada pegawai! Dedikasi, kerja keras, dan komitmen tentu saja menjadi inspirasi bagi rekan-rekan lainnya. Terus berprestasi dan memberikan kontribusi yang terbaik!



Gambar 12 Pegawai Teladan Inspektorat Utama Tahun 2024

2. Pegawai Teladan Inspektorat Utama Triwulan I Tahun 2025

Dalam rangka mendorong semangat profesionalisme, integritas, dan kinerja yang unggul di lingkungan Inspektorat Utama, penghargaan Pegawai Teladan Triwulan I Tahun 2025 diberikan kepada pegawai yang telah menunjukkan dedikasi luar biasa, etos kerja tinggi, serta kontribusi nyata dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Melalui penilaian yang objektif dan transparan oleh tim penilai internal, sebanyak 23 pegawai dari Inspektorat I, Inspektorat II, maupun Bagian Tata Usaha ditetapkan sebagai Pegawai Teladan Inspektorat Utama Triwulan I Tahun 2025.

Diharapkan penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh pegawai untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat integritas, dan berkontribusi aktif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.



Gambar 13 Pegawai Teladan Inspektorat Utama Triwulan I Tahun 2025

3. **Peringkat III Kategori Satuan Kerja Pusat atas Kinerja Anggaran Tahun Anggaran 2024**

Pada hari Jumat tanggal 01 Agustus 2025 Inspektorat Utama BPOM menerima piagam penghargaan dalam acara Monitoring Evaluasi Kinerja dan Anggaran BPOM Semester I 2025. Piagam Penghargaan diberikan oleh bapak Kepala BPOM kepada bapak Inspektur Utama.

Inspektorat Utama memperoleh Peringkat III dalam kategori Satuan Kerja Pusat atas Kinerja Anggaran Tahun Anggaran 2024 dengan Nilai Kinerja Anggaran sebesar 101,34. Capaian ini tidak hanya mencerminkan pengelolaan keuangan yang baik, namun juga komitmen Inspektorat Utama dalam menjaga integritas dan tata kelola yang transparan di lingkungan BPOM.

Inspektorat Utama terus menjadikan kinerja sebagai orientasi utama, tidak hanya untuk organisasi, tetapi juga untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.



Gambar 14 Peringkat III Kategori Satuan Kerja Pusat atas Kinerja Anggaran Tahun Anggaran 2024

4.4 LAIN-LAIN

1. Sosialisasi RB, ZI WBK/WBBM, Pengawasan Intern, Evaluasi 2024, Perencanaan 2025, dan ISO di Lingkungan Inspektorat Utama

Pada tanggal 14 Januari 2025, Inspektorat Utama melaksanakan acara Sosialisasi RB, ZI WBK/WBBM, Pengawasan Intern, Evaluasi 2024, Perencanaan 2025, dan ISO di Lingkungan Inspektorat Utama dengan tema "Membangun Komitmen dan Sinergi Menuju Kinerja Unggul 2025" yang dilaksanakan di Aula Bhinneka Tunggal Ika.

Agenda ini menjadi momentum penting dalam merefleksikan pelaksanaan kinerja 2024, menyusun perencanaan kinerja 2025, dan memperkuat pelaksanaan ISO di lingkungan Inspektorat Utama.

Melalui dialog kinerja, diskusi tim kerja, dan analisis isu strategis, Inspektorat Utama berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan intern, memperkuat zona integritas, dan mencapai kinerja yang lebih baik di tahun mendatang.



Gambar 15 Sosialisasi RB, ZI WBK/WBBM, Pengawasan Intern, Evaluasi 2024, Perencanaan 2025, dan ISO di Lingkungan Inspektorat Utama

2. ***Entry Meeting* Evaluasi atas Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025**

Pada hari Senin, 17 Februari 2025 telah dilaksanakan *Entry Meeting* Evaluasi atas Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Evaluasi ini bertujuan untuk:

a. Menilai efektivitas pemotongan anggaran Tahun 2025
b. Memberikan rekomendasi program, kegiatan, serta jenis dan item belanja yang dapat diefisienkan

Melalui evaluasi ini, diharapkan pengelolaan keuangan negara semakin optimal, transparan, dan tepat sasaran.



Gambar 16 Entry Meeting Evaluasi atas Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025

3. **Rapat Kerja Perencanaan Inspektorat Utama Tahun 2025**

Pada tanggal 18 Februari 2025 Inspektorat Utama menyelenggarakan Rapat Kerja Perencanaan Inspektorat Utama Tahun 2025 dengan mengusung tema Mengawal BPOM Berkelas Dunia yang Menjulang, Membumi, dan Mengakar. Kegiatan yang dilaksanakan di BPOM Pusat, Jakarta secara *luring* dan *daring* (*hybrid*), dihadiri oleh Kepala BPOM, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama BPOM, dan seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BPOM.

Pada kesempatan ini Inspektur Utama menyampaikan Transformasi Pengawasan Intern, Alur Perencanaan Pengawasan Intern, Hasil Pengawasan Intern Tahun 2024, Kebijakan Pengawasan Intern Inspektorat Utama Tahun 2025 2029, dan Program Pengawasan Utama Tahun 2025 yang dibagi menjadi 3 klasterisasi yaitu *Change* (pengawalan pada program prioritas), Mandatory (pengawasan yang rutin dan wajib dilakukan) dan *Incidental* (tindak lanjut pengaduan dan arahan pimpinan). Inspektur Utama juga melakukan penyerahan dokumen Laporan Hasil Pengawasan Intern Inspektorat Utama Tahun 2024 dan Kebijakan Pengawasan Intern Inspektorat Utama Tahun 2025-2029 kepada Kepala BPOM.

Dalam sambutannya Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menegaskan pentingnya fungsi pengawasan intern yang kuat, kokoh dan mampu menghadapi berbagai tantangan untuk menjadikan BPOM lembaga berkelas dunia yang bersih sehingga mampu mengayomi dan melindungi masyarakat Indonesia serta untuk mencapai *good governance and clean government*. Kepala BPOM mengajak Unit Kerja agar menjadikan Inspektorat Utama sebagai *strategic partner and trusted advisor* dan mendukung pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Utama.

Dengan terlaksananya Rapat Kerja Perencanaan Pengawasan Intern ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan intern yang terencana, terukur, efektif, dan efisien sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang dapat mengevaluasi dan memberikan rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan kerja organisasi di BPOM.



Gambar 17 Rapat Kerja Perencanaan Inspektorat Utama Tahun 2025

4. Rapat Evaluasi Internal Triwulan I TA 2025

Pada tanggal 14 April 2025 Inspektorat Utama mengadakan Rapat Evaluasi Internal Triwulan I TA 2025. Acara ini dihadiri oleh seluruh jajaran pimpinan dan pegawai Inspektorat Utama.

Bapak Yan Setiadi selaku Inspektur Utama menekankan jangan sampai terdapat pelanggaran integritas sekecil apapun dan berharap seluruh pegawai Inspektorat Utama dapat memberikan kinerja yang terbaik. Selain itu, Inspektur Utama juga memberikan arahan untuk melakukan akselerasi kinerja dan anggaran dengan tetap terukur dengan mitigasi risiko dalam koridor anggaran cukup, serta dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi dan stakeholder.

Kegiatan ini juga diikut oleh tamu undangan dari Biro Umum dan Biro Perencanaan dan Keuangan untuk dapat menyampaikan isu, kebijakan dan harapan kepada Inspektorat Utama ke depannya.

Kegiatan rutin ini diharapkan memperkuat Inspektorat Utama, menjadikannya lebih adaptif dan memberikan kontribusi optimal bagi BPOM.



Gambar 18 Rapat Evaluasi Internal Triwulan I TA 2025

3. **Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)**

Pada Kamis, 22 Mei 2025 Badan POM telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pemeriksaan kinerja pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik untuk periode tahun 2023 hingga semester 1 tahun 2024.

LHP ini mencakup ruang lingkup kebijakan, pedoman, peraturan, serta pelaksanaan pengawasan termasuk penggunaan sistem informasi serta fungsi monitoring dan evaluasi khususnya dalam pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik.

Di samping itu, persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK atas kinerja BPOM selama periode 2006 s.d 2023 berhasil mencapai 98,89% (268 dari 271). Sinergi dan kolaborasi pengawasan eksternal dan internal ini menjadi kunci untuk transparansi, inovasi, dan tata kelola yang lebih baik demi kepentingan masyarakat.
Inspektorat Utama siap mengawal tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.



Gambar 19 Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

4. **Penyerahan Laporan Hasil Pengawasan Triwulan I 2025 Kepada Kepala BPOM**

Sebagai bentuk komitmen penguatan budaya integritas dan akuntabilitas memastikan tata kelola, manajemen risiko, dan sistem pengendalian intern berjalan efektif, Inspektorat Utama telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Triwulan I Tahun 2025 kepada Kepala Badan POM pada Jum'at, 2 Mei 2025.

Dalam pertemuan tersebut, Inspektur Utama menyampaikan rekomendasi strategis yang diharapkan dapat segera ditindaklanjuti oleh Unit Kerja. Kepala Badan POM mengapresiasi dan menyambut baik

laporan ini dan menekankan pentingnya menindaklanjuti laporan hasil pengawasan secara cepat, tepat, dan berkelanjutan.

Penyampaian laporan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Inspektorat Utama menguatkan budaya integritas dan akuntabilitas yang transparan dan berorientasi hasil pada perbaikan secara terus-menerus.



Gambar 20 Penyerahan Laporan Hasil Pengawasan Triwulan I 2025 Kepada Kepala BPOM

5. Tahap Awal Rencana Pembangunan Laboratorium Integritas

Pada tanggal 11 Juni 2025, Inspektur Utama menghadiri acara Rencana Pembangunan Laboratorium Integritas pada BBPOM di Bandung. Pada paparannya, bapak Inspektur Utama menyampaikan bahwa hasil dari pembangunan laboratorium ini adalah tercapainya WBK/WBBM,

SPIPT/MR, akuntabilitas kinerja dan Pelayanan publik berkualitas dalam jangka pendek, dan jangka panjang. Hasil tersebut dicapai dengan Penguatan pada aspek kebijakan, kelembagaan, konsep dan kerangka kerja, tata kelola dan manajemen risiko, Pendampingan dan Kolaborasi Pusat-UPT, mencermati area-area yang perlu perbaikan dan dapat ditingkatkan, serta kolaborasi dengan stakeholder strategis baik instansi pemerintah pusat maupun daerah. Beliau mengajak dalam mendukung pengawasan internal yang efektif melalui pembangunan laboratorium integritas, untuk mendukung kiprah kinerja Badan POM yang semakin menjulang.



Gambar 21 Tahap Awal Rencana Pembangunan Laboratorium Integritas

6. Evaluasi Kinerja dan Anggaran Inspektorat Utama Triwulan II 2025

Pada hari Senin tanggal 7 Juli 2025 Inspektorat Utama BPOM menyelenggarakan acara Laporan Evaluasi Kinerja dan Anggaran Inspektorat Utama Triwulan II 2025 di Aula Bhinneka Tunggal Ika. Acara ini dihadiri oleh Inspektur Utama, Inspektur I, Inspektur II, Kepala Bagian TU, dan seluruh pegawai Inspektorat Utama.

Acara ini dibuka dengan pemaparan realisasi kinerja dan anggaran. Inspektorat Utama memiliki 11 Indikator Kinerja Utama (IKU), terdapat 7 IKU yang masih belum terdapat realisasi karena dilakukan pengukuran pada akhir tahun. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) TW II Inspektorat Utama sebesar 100,84 (ISTIMEWA).

Inspektur Utama memberikan himbauan untuk memantau IKU yang belum tercapai di target Triwulan II dan IKU lainnya yang baru akan diukur pada akhir Triwulan IV. Selain itu, dengan anggaran yang tersedia untuk segera direalisasikan kegiatan pengawasan intern pada triwulan III sd IV.

Selain kinerja dan anggaran, terdapat *sharing session* dari pegawai yang hadir pada kegiatan konferensi auditor internal dengan tema *Shifting Horizon for Internal Auditors: Navigating Emerging Risks, Governance and Opportunities* in 2025 yang diadakan tanggal 1 s.d 4 Juli 2025 di Yogyakarta. Dari *sharing session* tersebut, Inspektorat utama lebih aware terhadap Kebutuhan yang harus dimiliki Inspektorat Utama agar menjadi APIP Modern: *Digital Safety* yang tinggi; Kemampuan Komunikasi; Pemahaman akan bahaya laten.

Selain itu, informasi yang relevan dapat menjadi pengayaan materi pada Rencana strategis Inspektorat Utama tahun 2025-2029.







Gambar 22 Evaluasi Kinerja dan Anggaran Inspektorat Utama Triwulan II 2025

7. *Focus Group Discussion* Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025–2029

Pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2025 Inspektorat Utama BPOM menyelenggarakan acara *Focus Group Discussion* untuk merumuskan Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025–2029 sebagai wujud komitmen dalam memperkuat tata kelola pengawasan yang akuntabel, responsif, dan berorientasi pada nilai tambah.

Dalam sambutannya, Inspektur Utama BPOM, Yan Setiadi, AK., M.B.A, menegaskan pentingnya posisi strategis BPOM dalam menjaga kualitas dan keamanan obat serta makanan sebagai bagian dari upaya perlindungan masyarakat dan penguatan daya saing nasional. Inspektorat Utama sebagai aparat pengawasan intern berperan bukan hanya sebagai watchdog, tetapi juga sebagai trusted advisor dan value driver bagi organisasi.

Pada FGD ini telah dihimpun berbagai masukan konstruktif dari pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal BPOM, antara lain Bappenas dan BPKP, yang menjadi nilai tambah dalam memperkuat substansi perencanaan dan memastikan keselarasan dengan arah kebijakan. Diharapkan dengan kegiatan ini dapat menghasilkan dokumen Renstra yang mampu menjawab tantangan pengawasan ke depan dan mendukung tata kelola yang bersih dan efektif di lingkungan BPOM.







Gambar 23 Focus Group Discussion Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025–2029

8. **Cafe Integritas Seri 6 dengan tema Penguatan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan BPOM.**

   Pada tanggal 22 Juli 2025 Inspektorat Utama menyelenggarakan Cafe Integritas Seri 6 dengan tema Penguatan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan BPOM. Dalam cafe

integritas seri kali, selain membahas terkait tata kelola, manajemen risiko dan sistem pengendalian intern, kami juga membahas mengenai peran dan program BPOM dalam pengawasan program strategis nasional dan pemenuhan indikator untuk mencapai predikat *WHO Listed Authorities* (WLA) serta peran Inspektorat Utama di dalamnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh influencer berkompeten, yaitu Dra. Mayagustina Andarini, Apt, M.Sc dan Drs. Tepy Usia, Apt, M.Phil, Ph.D selaku Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Utama Badam POM. Diskusi ini menjadi wadah berbagi perspektif dan penguatan komitmen bersama dalam membangun Badan POM yang semakin transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Dalam sambutannya, Inspektur Utama menyampaikan agar pimpinan unit kerja dan seluruh pegawai BPOM dapat mendorong dan menggerakkan perubahan menuju ke arah yang lebih baik yakni dengan mensinergikan tata kelola, manajemen risiko, dan sistem pengendalian intern untuk memperkuat pondasi BPOM. Kualitas pelayanan publik ditentukan oleh kekuatan sistem pengendalian internal kita dan tata kelola yang baik dimulai dari diri sendiri.







Gambar 24 Cafe Integritas Seri 6

9. Sosialisasi Persiapan SPI BPOM Tahun 2025: Kolaborasi untuk Integritas

Pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2025 Inspektorat Utama mengadakan Sosialisasi Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 dengan mengundang narasumber dari KPK dan Unit Pengampu kegiatan di Pusat. Acara ini dilaksanakan secara online dan dihadiri seluruh pegawai BPOM.

Acara dibuka langsung oleh Bapak Inspektur Utama, beliau memaparkan bahwa berdasarkan hasil perhitungan SPI BPOM Tahun 2024, dalam komponen responden internal, masih terdapat dimensi penilaian dengan kategori RENTAN dan kategori WASPADA. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kurangnya pemahaman dan persepsi responden internal, sehingga perlu dilaksanakan upaya penyamaan persepsi berupa sosialisasi untuk meningkatkan awareness pegawai BPOM dalam menegakkan integritas secara internal.

Dengan mengundang narasumber dari KPK, diharapkan dapat menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan survei SPI Tahun 2025 sehingga BPOM dapat mendapatkan hasil SPI secara optimal dan seluruh pegawai BPOM mengetahui informasi terkini terkait hal-hal yang dirasa belum optimal dan menghindari adanya mispersepsi di internal BPOM.







Gambar 25 Sosialisasi Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025

10. **Penyerahan Laporan Hasil Pengawasan Triwulan II 2025 kepada Kepala BPOM**

    Pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2025 Inspektorat Utama menyerahkan Laporan Hasil Pengawasan Triwulan II 2025 kepada Kepala BPOM. Laporan ini merupakan penyajian informasi atas hasil pengawasan dan pembinaan sekaligus sebagai media pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pengawasan intern terhadap Lingkungan Kerja BPOM.

Penyampaian laporan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Inspektorat Utama menguatkan budaya integritas dan akuntabilitas yang transparan dan berorientasi hasil pada perbaikan secara terus-menerus.



Gambar 26 Penyerahan Laporan Hasil Pengawasan Triwulan II 2025 kepada Kepala BPOM

11. Pencanangan Laboratorium Integritas dan Akuntabilitas pada Balai Besar POM di Bandung

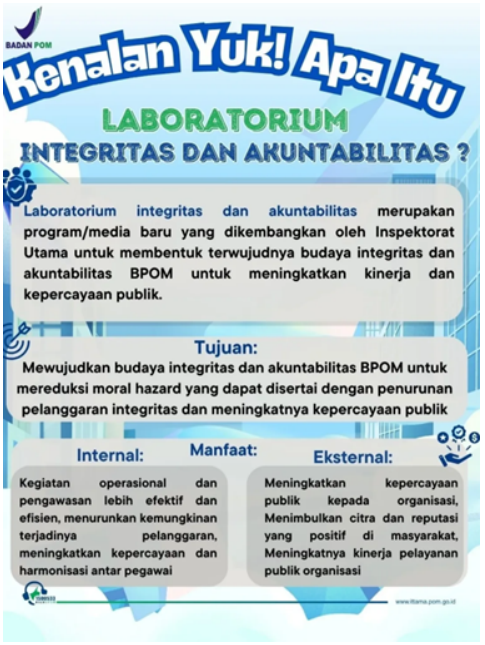
Pada tanggal 29 Agustus 2025, Inspektorat Utama melakukan Pencanangan Laboratorium Integritas dan Akuntabilitas pada Balai Besar POM di Bandung sebagai salah satu terobosan dalam mewujudkan budaya integritas dan akuntabilitas.

Laboratorium Integritas dan Akuntabilitas merupakan program/media baru yang dikembangkan oleh Inspektorat Utama untuk menurunkan pelanggaran integritas dan meningkatkan kinerja dan kepercayaan publik.

Dalam kesempatan tersebut, Inspektur Utama turut hadir dan memaparkan mengenai latar belakang, tujuan, serta manfaat dari Laboratorium Integritas dan Akuntabilitas.

Dengan tagline "KSATRIA" yaitu: KolaboraSi Adaptif perkuat TRansparansi, Integritas, dan Akuntabilitas, Pencanangan Laboratorium Integritas ini diharapkan mampu mereduksi moral hazard yang dapat disertai dengan penurunan pelanggaran integritas dan meningkatkan kepercayaan publik.







Gambar 27 Pencanangan Laboratorium Integritas dan Akuntabilitas pada Balai Besar POM di Bandung

12. *Entry Meeting* Pemeriksaan Kinerja Atas Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2024 & 2025

Pada tanggal 12 September 2025, Badan Pengawas Obat dan Makanan bersama Badan Pemeriksa Keuangan RI melaksanakan *Entry Meeting* Pemeriksaan Kinerja Atas Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2024 & 2025. Melalui pemeriksaan kinerja ini, diharapkan lahir rekomendasi konstruktif untuk meningkatkan

akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas pengawasan. Badan Pengawas Obat dan Makanan berkomitmen mendukung penuh proses ini dengan transparansi data, kolaborasi lintas unit, dan komunikasi terbuka.

Dengan semangat perbaikan berkelanjutan, pemeriksaan ini menjadi langkah nyata menuju pengawasan obat dan makanan yang aman, bermutu, dan bermanfaat, demi masyarakat sehat dan sejahtera.



Gambar 28 Entry Meeting Pemeriksaan Kinerja Atas Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2024 & 2025

13. Rapat Evaluasi Internal Inspektorat Utama Triwulan III TA 2025

Pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025 Inspektorat Utama BPOM menyelenggarakan Rapat Evaluasi Internal Inspektorat Utama Triwulan III TA 2025 di Aula Bhinneka Tunggal Ika. Acara ini dihadiri oleh Inspektur Utama, Inspektur I, Inspektur II, Kepala Bagian TU, dan seluruh pegawai Inspektorat Utama.

Acara dibuka dengan pemaparan realisasi kinerja dan anggaran TW III dengan hasil Nilai Kinerja Organisasi berpredikat istimewa. Apresiasi diberikan untuk kerja keras dan kerja cerdas seluruh jajaran sehingga capaian kinerja mampu melampaui target pada triwulan III 2025. Terhadap capaian ini, pemantauan secara berkala terutama IKU yang terkait dengan stakeholder tetap harus dilaksanakan sebagai bentuk kewaspadaan. Selanjutnya, Inspektur Utama memberikan arahan terkait pentingnya menjaga manajemen risiko pada organisasi dengan pelaksanaan audit internal berbasis manajemen risiko.

Dengan dilaksanakannya Rapat Evaluasi Internal Inspektorat Utama Triwulan III TA 2025 diharapkan dapat menjadi landasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di masa mendatang.






Gambar 29 Evaluasi Kinerja dan Anggaran Inspektorat Utama Triwulan III Tahun Anggaran 2025

PENUTUP



5.1 KESIMPULAN
5.2 PERMASALAHAN
5.3 SARAN

BAB 05

5.1 Kesimpulan

Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM) ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab kepada Presiden berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2005 serta perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang kemudian diturunkan dalam Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta mengalami perubahan dengan struktur organisasi baru yang dituangkan dalam Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Utama BPOM triwulan III tahun 2025 merujuk kepada Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama tahun 2025 dan Keputusan Inspektur Utama BPOM No HK.02.02.7.02.25.08 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Utama Tahun 2025-2029 serta draft pembaharuan manual IKU pada indikator "Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu".

Berdasarkan capaian indikator-indikatornya, pencapaian 3 (tiga) Sasaran Program dengan 11 (sebelas) indikator kinerja Inspektorat Utama Triwulan III tahun 2025 adalah sebagai berikut: 1 (satu) IKSP memperoleh kategori "Tidak dapat disimpulkan", 2 (dua) IKSP memperoleh Kategori "Sangat Baik", Serta 8 (delapan) IKSP yang masih belum dapat diukur pada TW III 2025. Pengukuran capaian kinerja Inspektorat Utama tahun TW III 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target IKSP. Dari hasil pengukuran tersebut, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi Inspektorat Utama adalah sebesar **105,27** dengan Kategori **"Istimewa"**.

Penyerapan anggaran Inspektorat Utama sampai dengan triwulan III tahun 2025 untuk pelaksanaan program Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah sebesar **Rp 8.954.990.257 atau 42,52%** (Realisasi berdasarkan SPM yang

telah diterbitkan dari aplikasi SAKTI) dan **Rp 8.315.424.796 atau 39,49%** (Realisasi berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan) dari jumlah keseluruhan pagu **21.058.996.000** dengan Blokir Anggaran sebesar **Rp9.929.508.000**. Sedangkan penyerapan anggaran Inspektorat Utama sampai dengan triwulan III tahun 2025 untuk pelaksanaan program Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan jika dibandingkan dengan pagu non blokir adalah sebesar **Rp 8.954.990.257 atau 80,46%** (Realisasi berdasarkan SPM yang telah diterbitkan dari aplikasi SAKTI) dan **Rp 8.315.424.796 atau 74,71%** (Realisasi berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan) dari jumlah keseluruhan pagu non blokir **Rp 11.129.488.000.**

5.2 Permasalahan

Beberapa permasalahan/kendala dalam pencapaian kinerja Inspektorat Utama Badan POM triwulan III tahun 2025, antara lain:

1. Dengan adanya Kebijakan Pengawasan Intern Inspektorat Utama BPOM Tahun 2025-2029 yang baru, masih terdapat perbedaan perspektif antara auditor dan auditan serta pemangku kebijakan;
2. Kompetensi auditor belum sepenuhnya merata pada level yang sama sehingga belum seluruh auditor dapat diberikan penugasan dengan kualitas yang prima pada bagian-bagian tertentu;
3. Perubahan kebijakan yang cepat dan dinamis sehingga membutuhkan penyesuain pelaksanaan kegiatan pengawasan intern;
4. Adanya kebijakan efisiensi anggaran yang menghambat terlaksananya beberapa kegiatan pengawasan.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja pada triwulan III tahun 2025, perlu dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi yang akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk perumusan rencana kinerja tahun berikutnya. Langkah yang perlu diambil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Utama, sekaligus untuk peningkatan kinerja pengawasan internal, antara lain adalah:

1. Memaksimalkan dan meningkatkan pelaksanaan pengumpulan data kinerja, evaluasi internal dengan cara melaksanakan monitoring atas capaian kinerja secara berkala untuk dapat mengantisipasi kendala

serta hambatan yang terjadi untuk dapat menentukan langkah-langkah perbaikan atas kendala serta hambatan atas pencapaian kinerja;

2. Melakukan penyesuaian terhadap rencana pelaksanaan kegiatan dan target kinerja sebagai tindak lanjut penyesuaian anggaran APBN-P di TA 2025;
3. Mengoptimalkan peran Inspektorat Utama sebagai mitra strategis dan *trusted advisor* yang memberikan manfaat dan nilai tambah bagi Badan POM di bidang tata kelola pemerintahan, manajemen risiko dan pengendalian intern;
4. Mengembangkan digitalisasi pengawasan intern dan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer (TPBK) secara berkelanjutan;
5. Menjalin kerjasama Lintas sektor yang lebih erat antara Inspektorat Utama Badan POM dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Keuangan dan *stakeholder* terkait lainnya dalam berbagai aspek yang relevan untuk pembinaan dan peningkatan pelaksanaan pengawasan internal.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2025

BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YAN SETIADI

Jabatan : Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 28 August 2025

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan RI	Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
YAN SETIADI	TARUNA IKRAR

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT UTAMA

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1.	05 - Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	01 - Indeks RB BPOM di lingkup Inspektorat Utama	18.37 Indeks
		02 - Nilai Pembangunan ZI Inspektorat Utama	87.6 Nilai
		03 - Nilai AKIP Inspektorat Utama	82.58 Nilai
		04 - Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	5 Nilai
		05 - Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	3.39 Indeks
2.	06 - Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	01 - Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	88.28 Indeks
		02 - Persentase rekomendasi pengawasan assurance yang ditindaklanjuti	92.69 Persen
		03 - Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	100 Persen
		04 - Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100 Persen
3.	07 - Terwujudnya Inspektorat Utama yang Profesional	01 - Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	3.9 Nilai
		02 - Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama	82.8 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 21,058,996,000 (Dua Puluh Satu Miliar Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	WA.4115 - Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	15,605,847,000
2.	WA.4116 - Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	5,453,149,000

Jakarta, 28 August 2025

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan RI	Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
YAN SETIADI	TARUNA IKRAR

BADAN POM

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN
1.	01 - Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	01 - Indeks RB BPOM di lingkup Inspektorat Utama												18.37	2,178,441,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	B - Public Campaign Pengawasan Intern/Anti Korupsi	51,280,000	51,280,000
2.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	A - Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pelaporan LHKPN	1,575,000	1,575,000
3.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	C - Evaluasi SAKIP	1,200,000	1,200,000
4.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	D - Penilaian Risiko dan Pemantauan SPIP	2,880,000	2,880,000
5.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	E - Sosialisasi Kebijakan Pembangunan ZI	66,090,000	66,090,000
6.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	F - Desk Evaluasi PMPZI Menuju Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel, Dan Pelayanan Publik Yang Prima	144,115,000	144,115,000
7.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	H - Bimbingan Teknis Implementasi ZI pada BPOM/BBPOM	84,600,000	84,600,000
8.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	I - Sinergitas dan pelaksana implementasi Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Badan POM	7,275,000	7,275,000
9.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan	J - Bimtek dan Fasilitasi Pengisian LHKPN	58,450,000	58,450,000

INSPEKTORAT UTAMA

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN
NO	RD		KOMPONEN						SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI
		dan Tata Kelola Internal	organisasi BPOM yang efektif												
10.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	G - Evaluasi WBK/WBBM Mandiri										186,706,000		186,706,000
11.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	K - Bimbingan Teknis Manajemen Risiko										126,900,000		126,900,000
12.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	L - Sosialisasi PerMenpanRB No 9 Tahun 2023										41,875,000		41,875,000
13.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	M - Sosialisasi Penerapan Manajemen Risiko										67,755,000		67,755,000
14.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	N - Desk Pendidikan Antikorupsi Manajemen Risiko di Lingkungan Badan POM										85,380,000		85,380,000
15.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	O - Penyusunan Laporan SPK Pelayanan dan SPMK di Lingkungan BPOM										1,440,000		1,440,000
16.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	P - Penjaminan Kualitas/Pendampingan Evaluasi SPIPT Satuan Kerja										63,450,000		63,450,000
17.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	R - Bimbingan Teknis Pelaksanaan SPI										63,450,000		63,450,000
18.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	S - Rapat Koordinasi/Sosialisasi Pelaksanaan/Penyusunan RATL SPI										9,450,000		9,450,000
19.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	U - Pendampingan Pemeriksaan BPK										92,463,000		92,463,000
20.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	T - Asistensi Dalam Rangka Persiapan Pemeriksaan BPK										248,500,000		248,500,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN
		NO	RO		KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI
		21.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit				F - Sosialisasi PermenPANRB No 90 dan Pedoman ZI Badan POM bagi seluruh Unit Kerja						21,600,000	21,600,000
		23.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit				A - Bimbingan Teknis Manajemen Risiko						31,523,000	31,523,000
		24.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif				Q - Bimbingan Teknis Pengawasan Intern						84,600,000	84,600,000
		25.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit				B - Sosialisasi Program Anti Korupsi BPOM						31,118,000	31,118,000
		26.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit				C - Penilaian Risiko, Pemantauan SPIP dan Pelaksanaan Fungsi Koordinator Auditor Internal						25,660,000	25,660,000
		27.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit				E - Desk Evaluasi PMPd Menuju Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel, Dan Pelayanan Publik Yang Prima						64,575,000	64,575,000
		28.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit				D - Intervensi Peningkatan Indikator WBK dan atau WBBM						130,847,000	130,847,000
		29.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit				G - Desk Mitigasi Manajemen Risiko						21,600,000	21,600,000
		30.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit				H - Sosialisasi SK LHKAN dan Bimtek Fasilitasi LHKAN						41,490,000	41,490,000
		31.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit				J - Pendampingan Pemeriksaan BPK						278,549,000	278,549,000
		32.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit				K - Pertemuan Konsultasi dan Progres Penyelesaian TL temuan BPK						21,600,000	21,600,000
		33.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit				L - Evaluasi SAKIP						20,445,000	20,445,000
		02 - Nilai Pembangunan ZI Inspektorat Utama												87.6	233,457,000	

INSPEKTORAT UTAMA

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	Z - Implementasi IACM - Maturitas SPIPXX	1,940,000	970,000
2.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	U - Surveilan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001 : 2016	13,665,000	13,665,000
3.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	V - Kajian/Pedoman/Peraturan Pengawasan Intern	1,620,000	1,620,000
4.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	O - Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan	217,202,000	217,202,000
03 - Nilai AKIP Inspektorat Utama				82.58	5,996,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Q - Pengelolaan Akuntabilitas Inspektorat Utama	4,680,000	4,680,000
3.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	N - Penyusunan Laporan Akuntabilitas, Laporan Tahunan, Laporan Pengawasan, dan Laporan Lainnya (Inspektorat I)	216,000	216,000
4.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	W - Penyusunan Laporan Evaluasi Internal, Laporan Pengawasan dan Laporan TahunanXXX	1,100,000	1,100,000
04 - Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama				5	10,913,008,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4115.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	B - Pengadaan alat pengolah data	373,055,000	373,055,000
2.	WA.4115.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan	A - Pembayaran Gaji dan Tunjangan	7,071,503,000	7,071,503,000
4.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	X - Administrasi Keuangan	5,100,000	5,100,000
5.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	S - Pengelolaan Kinerja dan Anggaran Utama	8,640,000	8,640,000

INSPEKTORAT UTAMA

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
6.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	T - Pengelolaan Penggunaan Anggaran dan BMN	3,207,000	3,207,000
7.	WA.4115.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	B - Administrasi Kegiatan	1,369,434,000	1,369,434,000
8.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Z - Blokir Inpres 1 2025	582,061,000	582,061,000
9.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	Y - Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan	765,019,000	765,019,000
10.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	R - Koordinasi Pengelolaan Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	5,250,000	5,250,000
11.	WA.4115.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	A - Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	696,739,000	696,739,000
12.	WA.4115.EBB.951 - Layanan Sarana Internal	053 - Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	A - Pengadaan Fasilitas Perkantoran	25,000,000	25,000,000
13.	WA.4115.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan, Monitoring, dan Penyusunan Laporan BMN	A - Penatausahaan Barang Milik Negara Inspektorat Utama	8,000,000	8,000,000
	05 - Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama			3.39	4,810,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	P - Penilaian Risiko dan Pelaksanaan SPIPT Inspektorat Utama	3,840,000	3,840,000
2.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	Z - Implementasi IACM-Maturitas SPIPXX	1,940,000	970,000
2.	06 - Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	01 - Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama		88.28	2,437,282,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4116.EBD.965 - Layanan Audit Internal	062 - Pelaksanaan pengawasan intern	C - Refreshment ISO 9001:2015 Bagi Auditor Internal di Lingkungan Badan POM	43,825,000	43,825,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN
		NO	RO		KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI
					pada mitra Inspektorat II										
2.		WA.4115.EBD.965 - Layanan Audit Internal			052 - Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat I				Z - Blokir Inpres 1 2025				242,355,000		242,355,000
3.		WA.4116.EBD.965 - Layanan Audit Internal			061 - Pengawalan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BPOM				A - Reviu				40,388,000		40,388,000
4.		WA.4116.EBD.965 - Layanan Audit Internal			061 - Pengawalan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BPOM				B - Asistensi Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan/Laporan keuangan(PAPBJ				66,150,000		66,150,000
5.		WA.4116.EBD.965 - Layanan Audit Internal			062 - Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat II				B - Bimbingan Teknis				45,000,000		45,000,000
6.		WA.4115.EBD.965 - Layanan Audit Internal			051 - Pengawalan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BPOM				F - Blokir Inpres 1 2025				392,759,000		392,759,000
7.		WA.4116.EBD.965 - Layanan Audit Internal			062 - Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat II				D - Asistensi Pengawasan Keuangan dan Kepegawaian				54,000,000		54,000,000
8.		WA.4115.EBD.965 - Layanan Audit Internal			051 - Pengawalan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BPOM				D - Lokakarya Penguatan Reviu Perencanaan dan Penganggaran Dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan BPOM				257,635,000		257,635,000
10.		WA.4115.EBD.965 - Layanan Audit Internal			051 - Pengawalan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BPOM				A - Reviu (LK, BMN, dan PIPK)				28,040,000		28,040,000
11.		WA.4115.EBD.965 - Layanan Audit Internal			053 - Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat I				Z - Blokir Inpres 1 2025				1,440,000		1,440,000
12.		WA.4115.EBD.965 - Layanan Audit Internal			051 - Pengawalan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BPOM				B - Asistensi Dalam Rangka Persiapan Pemeriksaan BPK				121,186,000		121,186,000
13.		WA.4115.EBD.965 - Layanan Audit Internal			051 - Pengawalan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BPOM				C - Asistensi Dalam Rangka Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan				30,600,000		30,600,000

INSPEKTORAT UTAMA

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN					ANGGARAN		KONTRIBUSI
		14.	WA.4115.EBD.965 - Layanan Audit Internal		051 - Pengawalan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BPOM			E - Reviu RKAKL					39,256,000		39,256,000
		15.	WA.4115.EBD.965 - Layanan Audit Internal		052 - Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat I			B - Bimbingan Teknis Pimpinan Inspektorat I					101,960,000		101,960,000
		16.	WA.4115.EBD.965 - Layanan Audit Internal		052 - Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat I			C - Bag TU - Bimbingan Teknis Pimpinan Inspektur Utama					668,541,000		668,541,000
		17.	WA.4115.EBD.965 - Layanan Audit Internal		052 - Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat I			D - Bag TU - Bimbingan Teknis Manajemen Pengawasan Intern					303,562,000		303,562,000
		18.	WA.4115.EBD.965 - Layanan Audit Internal		053 - Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat I			G - Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Utama BPOM					585,000		585,000
		02 - Persentase rekomendasi pengawasan assurance yang ditindaklanjuti	90	90	90	91	91	91	92	92	92	92.69	92.69	92.69	1,357,219,500
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN					ANGGARAN		KONTRIBUSI
		1.	WA.4116.EBD.965 - Layanan Audit Internal		063 - Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat II			B - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan					55,600,000		27,800,000
		2.	WA.4116.EBD.965 - Layanan Audit Internal		062 - Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat II			A - Audit Kinerja/ Operasional/ Reviu/ Pemantauan/ Evaluasi Atas Program / Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan					481,796,000		481,796,000
		4.	WA.4115.EBD.965 - Layanan Audit Internal		053 - Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat I			A - Pemantauan dan Evaluasi TL Hasil Pengawasan					7,015,000		3,507,500
		5.	WA.4115.EBD.965 - Layanan Audit Internal		052 - Pelaksanaan pengawasan			A - Audit Kinerja/Operasional/Reviu/Pemantauan/Evaluasi					844,116,000		844,116,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO RO			KOMPONEN		SUB KOMPONEN							ANGGARAN	KONTRIBUSI
					intern pada mitra Inspektorat I		atas Program/Kegiatan Pengawasan ObatdanMakanan								
		03 - Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	94	94	94	96	96	96	98	98	98	100	100	100	31,307,500
		NO RO			KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI	
		2. WA.4115.EBD.965 - Layanan Audit Internal			053 - Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat I				A - Pemantauan dan Evaluasi TL Hasil Pengawasan				7,015,000	3,507,500	
		3. WA.4116.EBD.965 - Layanan Audit Internal			063 - Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat II				B - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan				55,600,000	27,800,000	
		04 - Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu			50	55	60	65	70	75	80	85	90	100	293,736,000
		NO RO			KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI	
		1. WA.4115.EBD.965 - Layanan Audit Internal			053 - Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat I				B - Audit Tujuan Tertentu				135,000,000	135,000,000	
		2. WA.4116.EBD.965 - Layanan Audit Internal			063 - Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat II				A - Audit Tujuan Tertentu				156,816,000	156,816,000	
		4. WA.4115.EBD.965 - Layanan Audit Internal			053 - Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat I				D - Konsolidasi data tindak lanjut dan pengaduan masyarakat				1,920,000	1,920,000	
3.	07 - Terwujudnya Inspektorat Utama yang Profesional	01 - Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP												3.9	3,360,219,000
		NO RO			KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI	
		1. WA.4115.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja			051 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern				E - Pelaksanaan Survei kepuasan mitra pengawasan intern				1,920,000	1,920,000	

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN
		NO	RO		KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI
2.		WA.4115.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja			051 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern				F - Evaluasi pemenuhan elemen kapabilitas Inspektorat Utama				84,380,000		84,380,000
3.		WA.4115.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja			051 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern				H - Cafe Integritas				48,030,000		48,030,000
4.		WA.4115.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja			051 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern				J - Rapat Kerja Perencanaan Inspektorat Utama Tahun 2025				746,319,000		746,319,000
5.		WA.4115.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja			051 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern				I - Pengelolaan TIK Inspektorat Utama				4,860,000		4,860,000
6.		WA.4116.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja			005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit				A - Rapat Kerja dan Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Berbasis Risiko di Lingkungan BPOM				643,263,000		643,263,000
7.		WA.4116.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja			005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit				C - Pengawasan CASN				90,425,000		90,425,000
8.		WA.4116.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja			005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit				D - Rapat Evaluasi Tingkat Itama				325,886,000		325,886,000
9.		WA.4116.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja			005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit				E - Pelatihan/ Workshop/ Meeting Auditor				1,037,996,000		1,037,996,000
10.		WA.4116.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja			005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit				F - Seminar Internal Auditor (SNIA) / Konferensi IIA				136,296,000		136,296,000
11.		WA.4115.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja			051 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern				B - Koordinasi Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat I				29,127,000		29,127,000
12.		WA.4115.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja			051 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern				G - Pengelolaan Jabatan Fungsional				197,762,000		197,762,000
13.		WA.4115.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja			051 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern				K - Penyusunan Analisis pengawasan intern / Tren Analisis Pemeriksaan				4,415,000		4,415,000
15.		WA.4115.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja			051 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern				C - Koordinasi Penguatan Sistem Pengawasan				3,240,000		3,240,000
16.		WA.4115.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja			051 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern				D - Penyusunan SK PKPT Tahun 2025				6,300,000		6,300,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		O2 - Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama												82.8	243,520,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4115.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja	051 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern	A - Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor Bidang Pengawasan dan Antar K/L	26,700,000	26,700,000
2.	WA.4116.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	B - Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor Bidang Pengawasan dan Antar K/L	11,495,000	11,495,000
3.	WA.4115.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja	051 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern	Z - Blokir Inpres 1 2025	205,325,000	205,325,000
				Total	21,058,996,000

Perencanaan target B1 hingga B7 mengacu pada Manual IKU Rancangan Awal Renstra 2025-2029. Perhitungan terhadap realisasi berdasarkan Manual IKU Rancangan Renstra 2025-2029 dituangkan pada Dokumen Laporan Kinerja (Interim dan Tahunan).

Jakarta, 28 August 2025

Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

YAN SETIADI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT I
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: ADAM P.W.A WIBOWO
Jabatan	: Inspektur I Badan Pengawas Obat dan Makanan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: YAN SETIADI
Jabatan	: Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 August 2025

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Inspektur I Badan Pengawas Obat dan Makanan	Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan
ADAM P.W.A WIBOWO	**YAN SETIADI**

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT I

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat I	01 - Persentase Keberhasilan Tingkat Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja BPOM	62.86 persentase
		02 - Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPOM	4.2 nilai
		03 - Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	20.75 nilai
		04 - Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM	84.48 nilai
		05 - Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	96.18 persentase
		06 - Nilai Pembangunan ZI Inspektorat I	89.12 nilai
		07 - Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Inspektorat I sesuai standar	100 Persentase
		08 - Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat I	100 persentase
		09 - Indeks Manajemen Risiko Inspektorat I	3.64 nilai
2.	02 - Meningkatnya kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	01 - Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat I	88.48 Indeks
		02 - Persentase rekomendasi pengawasan assurance pada mitra kerja Inspektorat I yang ditindaklanjuti	92.13 persentase
		03 - Persentase layanan jasa Konsultansi pada mitra kerja inspektorat I yang ditindaklanjuti tepat waktu	100 persentase
		04 - Persentase pengaduan wilayah pengawasan Inspektorat I yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100 persentase
3.	03 - Terwujudnya Inspektorat I yang profesional	01 - Persentase pemenuhan dokumen Kapabilitas APIP pada wilayah	100 Persentase

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		pengawasan Inspektorat I yang sesuai standar	
		02 - Nilai telaah sejawat intern Inspektorat I	82.8 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 15,605,847,000 (Lima Belas Miliar Enam Ratus Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	WA.4115 - Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	15,605,847,000

Jakarta, 29 August 2025

Pihak Pertama
Inspektur I Badan Pengawas Obat dan Makanan



ADAM P.W.A WIBOWO

Pihak Kedua
Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan



YAN SETIADI

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT I
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat I	01 - Persentase Keberhasilan Tingkat Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja BPOM												62.86	217,022,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	F - Sosialisasi PermenPANRB No 90 dan Pedoman ZI Badan POM bagi seluruh Unit Kerja	21,600,000	21,600,000
2.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	E - Desk Evaluasi PMPZI Menuju Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel, Dan Pelayanan Publik Yang Prima	64,575,000	64,575,000
3.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	D - Intervensi Pemenuhan Indikator WBK dan atau WBBM	130,847,000	130,847,000

	02 - Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPOM													4.2	78,783,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	A - Bimbingan Teknis Manajemen Risiko	31,523,000	31,523,000
2.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	C - Penilaian Risiko, Pemantauan SPIP dan Pelaksanaan Fungsi Koordinator Auditor Internal	25,660,000	25,660,000
3.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	G - Desk Maturitas Manajemen Risiko	21,600,000	21,600,000

	03 - Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM													20.75	20,445,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	L - Evaluasi SAKIP	20,445,000	20,445,000

04 - Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM														84.48	72,608,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	H - Sosialisasi SK LHKAN dan Bimtek Fasilitasi LHKAN	41,490,000	41,490,000
2.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	B - Sosialisasi Program Anti Korupsi BPOM	31,118,000	31,118,000

05 - Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM														96.18	300,149,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	K - Pertemuan Pemantauan Progres Penyelesaian TL temuan BPK	21,600,000	21,600,000
2.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	J - Pendampingan Pemeriksaan BPK	278,549,000	278,549,000

06 - Nilai Pembangunan ZI Inspektorat I														89.12	230,867,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	O - Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan	217,202,000	217,202,000
2.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	U - Surveillan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001 : 2016	13,665,000	13,665,000

07 - Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Inspektorat I sesuai standar	18	36	36	55	55	55	73	73	82	100	100	100			4,896,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Q - Pengelolaan Akuntabilitas Inspektorat Utama	4,680,000	4,680,000
2.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	N - Penyusunan Laporan Akuntabilitas, Laporan Tahunan, Laporan Pengawasan, dan Laporan Lainnya (Inspektorat I)	216,000	216,000

08 - Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat I	88	88	90	90	92	92	95	95	95	100	100	100	10,142,889,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	T - Pengelolaan Penggunaan Anggaran dan BMN	3,207,000	3,207,000
2.	WA.4115.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	B - Pengadaan alat pengolah data	373,055,000	373,055,000
3.	WA.4115.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	B - Administrasi Kegiatan	1,369,434,000	1,369,434,000
4.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Z - Blokir Inpres 1 2025	582,061,000	582,061,000
5.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	R - Koordinasi Pengelolaan Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	5,250,000	5,250,000
6.	WA.4115.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	A - Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	696,739,000	696,739,000
7.	WA.4115.EBB.951 - Layanan Sarana Internal	053 - Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	A - Pengadaan Fasilitas Perkantoran	25,000,000	25,000,000
8.	WA.4115.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan	A - Pembayaran Gaji dan Tunjangan	7,071,503,000	7,071,503,000
9.	WA.4115.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan, Monitoring, dan Penyusunan Laporan BMN	A - Penatasusahaan Barang Millik Negara Inspektorat Utama	8,000,000	8,000,000
10.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	S - Pengelolaan Kinerja dan Anggaran Ittama	8,640,000	8,640,000

09 - Indeks Manajemen Risiko Inspektorat I												3.64	3,840,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	P - Penilaian Risiko dan Pelaksanaan SPIPT Inspektorat Utama	3,840,000	3,840,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	B12	ANGGARAN
2.	02 - Meningkatnya kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	01 - Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat I	88.48	2,187,919,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4115.EBD.965 - Layanan Audit Internal	052 - Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat I	D - Bag TU - Bimbingan Teknis Manajemen Pengawasan Intern	303,562,000	303,562,000
2.	WA.4115.EBD.965 - Layanan Audit Internal	052 - Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat I	C - Bag TU - Bimbingan Teknis Pimpinan Inspektur Utama	668,541,000	668,541,000
3.	WA.4115.EBD.965 - Layanan Audit Internal	052 - Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat I	B - Bimbingan Teknis Pimpinan Inspektorat I	101,960,000	101,960,000
4.	WA.4115.EBD.965 - Layanan Audit Internal	051 - Pengawalan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BPOM	E - Reviu RKAKL	39,256,000	39,256,000
5.	WA.4115.EBD.965 - Layanan Audit Internal	051 - Pengawalan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BPOM	B - Asistensi Dalam Rangka Persiapan Pemeriksaan BPK	121,186,000	121,186,000
6.	WA.4115.EBD.965 - Layanan Audit Internal	051 - Pengawalan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BPOM	C - Asistensi Dalam Rangka Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan	30,600,000	30,600,000
7.	WA.4115.EBD.965 - Layanan Audit Internal	051 - Pengawalan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BPOM	A - Reviu (LK, BMN, dan PIPK)	28,040,000	28,040,000
8.	WA.4115.EBD.965 - Layanan Audit Internal	051 - Pengawalan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BPOM	F - Blokir Inpres 1 2025	392,759,000	392,759,000
9.	WA.4115.EBD.965 - Layanan Audit Internal	051 - Pengawalan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BPOM	D - Lokakarya Penguatan Reviu Perencanaan dan Penganggaran Dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan BPOM	257,635,000	257,635,000
10.	WA.4115.EBD.965 - Layanan Audit Internal	053 - Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat I	Z - Blokir Inpres 1 2025	1,440,000	1,440,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
11.	WA.4115.EBD.965 - Layanan Audit Internal	052 - Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat I	Z - Blokir Inpres 1 2025	242,355,000	242,355,000
12.	WA.4115.EBD.965 - Layanan Audit Internal	053 - Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat I	G - Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Ittama BPOM	585,000	585,000

02 - Persentase rekomendasi pengawasan assurance pada mitra kerja Inspektorat I yang ditindaklanjuti	90	90	90	91	91	91	92	92	92	92.13	92.13	92.13	847,623,500

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4115.EBD.965 - Layanan Audit Internal	053 - Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat I	A - Pemantauan dan Evaluasi TL Hasil Pengawasan	7,015,000	3,507,500
2.	WA.4115.EBD.965 - Layanan Audit Internal	052 - Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat I	A - Audit Kinerja/Operasional/Reviu/Pemantauan/Evaluasi atas Program/Kegiatan Pengawasan ObatdanMakanan	844,116,000	844,116,000

03 - Persentase layanan jasa Konsultansi pada mitra kerja inspektorat I yang ditindaklanjuti tepat waktu	94	94	94	96	96	96	98	98	98	100	100	100	3,507,500

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	WA.4115.EBD.965 - Layanan Audit Internal	053 - Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat I	A - Pemantauan dan Evaluasi TL Hasil Pengawasan	7,015,000	3,507,500

04 - Persentase pengaduan wilayah pengawasan Inspektorat I yang ditindaklanjuti sesuai kriteria			50	55	60	65	70	75	80	85	90	100	136,920,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		dan tepat waktu													

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	WA.4115.EBD.965 - Layanan Audit Internal	053 - Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat I	B - Audit Tujuan Tertentu	135,000,000	135,000,000
3.	WA.4115.EBD.965 - Layanan Audit Internal	053 - Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat I	D - Konsolidasi data tindak lanjut dan pengaduan masyarakat	1,920,000	1,920,000

3.	03 - Terwujudnya Inspektorat I yang profesional	01 - Persentase pemenuhan dokumen Kapabilitas APIP pada wilayah pengawasan Inspektorat I yang sesuai standar												100	1,126,353,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4115.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja	051 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern	B - Koordinasi Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat I	29,127,000	29,127,000
2.	WA.4115.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja	051 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern	I - Pengelolaan TIK Inspektorat Utama	4,860,000	4,860,000
3.	WA.4115.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja	051 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern	J - Rapat Kerja Perencanaan Inspektorat Utama Tahun 2025	746,319,000	746,319,000
4.	WA.4115.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja	051 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern	H - Cafe Integritas	48,030,000	48,030,000
5.	WA.4115.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja	051 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern	K - Penyusunan Analisis pengawasan intern / Tren Analisis Pemeriksaan	4,415,000	4,415,000
6.	WA.4115.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja	051 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern	G - Pengelolaan Jabatan Fungsional	197,762,000	197,762,000
7.	WA.4115.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja	051 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern	F - Evaluasi pemenuhan elemen kapabilitas Inspektorat Utama	84,380,000	84,380,000
8.	WA.4115.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja	051 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern	E - Pelaksanaan Survei kepuasan mitra pengawasan intern	1,920,000	1,920,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
9.	WA.4115.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja	051 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern	D - Penyusunan SK PKPT Tahun 2025	6,300,000	6,300,000
10.	WA.4115.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja	051 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern	C - Koordinasi Penguatan Sistem Pengawasan	3,240,000	3,240,000

		02 - Nilai telaah sejawat intern Inspektorat I												82.8	232,025,000

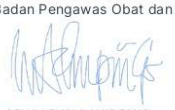
NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4115.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja	051 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern	A - Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor Bidang Pengawasan dan Antar K/L	26,700,000	26,700,000
2.	WA.4115.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja	051 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern	Z - Blokir Inpres 1 2025	205,325,000	205,325,000

	Total	15,605,847,000

Perencanaan target B1 hingga B7 mengacu pada Manual IKU Rancangan Awal Renstra 2025-2029. Perhitungan terhadap realisasi berdasarkan Manual IKU Rancangan Renstra 2025-2029 dituangkan pada Dokumen Laporan Kinerja (Interm dan Tahunan).

Jakarta, 29 August 2025

Inspektur I Badan Pengawas Obat dan Makanan



ADAM P.W.A WIBOWO

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Inspektorat II Tahun 2025

BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT II
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: YUDIANTO
Jabatan	: Inspektur II Badan Pengawas Obat dan Makanan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: YAN SETIADI
Jabatan	: Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 August 2025

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Inspektur II Badan Pengawas Obat dan Makanan	Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan
YUDIANTO	YAN SETIADI

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT II

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat II	01 - Persentase Keberhasilan Tingkat Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja BPOM	62.86 Persen
		02 - Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPOM	4.2 Nilai
		03 - Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	20.75 Nilai
		04 - Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM	84.48 Nilai
		05 - Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	96.18 Persen
		06 - Nilai Pembangunan ZI Inspektorat II	86.08 Nilai
		07 - Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Inspektorat II sesuai standar	100 Persen
		08 - Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat II	100 Persen
		09 - Indeks Manajemen Risiko Inspektorat II	3.24 Indeks
2.	02 - Meningkatnya kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	01 - Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat II	88.33 Indeks
		02 - Persentase rekomendasi pengawasan Assurance pada mitra kerja Inspektorat II yang ditindaklanjuti	93.26 Persen
		03 - Persentase layanan jasa Konsultansi pada mitra kerja inspektorat II yang ditindaklanjuti tepat waktu	100 Persen
		04 - Persentase pengaduan wilayah pengawasan Inspektorat II yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100 Persen

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
3.	03 - Terwujudnya Inspektorat II yang profesional	01 - Persentase pemenuhan dokumen Kapabilitas APIP pada wilayah pengawasan Inspektorat II yang sesuai standar	100 Persen
		02 - Nilai telaah sejawat intern Inspektorat II	82.8 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 5,453,149,000 (Lima Miliar Empat Ratus Lima Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	WA.4116 - Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	5,453,149,000

Jakarta, 29 August 2025

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Inspektur II Badan Pengawas Obat dan Makanan	Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan
YUDIANTO	YAN SETIADI

BADAN POM

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT II
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat II	01 - Persentase Keberhasilan Tingkat Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja BPOM												62.86	530,661,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	G - Evaluasi WBK/WBBM Mandiri	186,706,000	186,706,000
2.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	E - Sosialisasi Kebijakan Pembangunan ZI	66,090,000	66,090,000
3.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	F - Desk Evaluasi PMPZI Menuju Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel, Dan Pelayanan Publik Yang Prima	144,115,000	144,115,000
4.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	H - Bimbingan Teknis Implementasi ZI pada BPOM/BBPOM	84,600,000	84,600,000
5.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	I - Sinergitas dan perkuatan implementasi Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Badan POM	7,275,000	7,275,000
6.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	L - Sosialisasi PerMenpanRB No 9 Tahun 2023	41,875,000	41,875,000

		02 - Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPOM												4.2	347,805,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	P - Penjaminan Kualitas/Pendampingan Evaluasi SPIPT Satuan Kerja	63,450,000	63,450,000
2.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	D - Penilaian Risiko dan Pemantauan SPIP	2,880,000	2,880,000
3.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	K - Bimbingan Teknis Manajemen Risiko	126,900,000	126,900,000
4.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	M - Sosialisasi Penerapan Manajemen Risiko	67,755,000	67,755,000
5.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	N - Desk Penilaian Maturitas Manajemen Risiko di Lingkungan Badan POM	85,380,000	85,380,000
6.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	O - Penyusunan Laporan SPK Pelayanan dan SPAK di Lingkungan BPOM	1,440,000	1,440,000

03 - Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM														20.75	1,200,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	C - Evaluasi SAKIP	1,200,000	1,200,000

04 - Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM														84.48	268,805,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	A - Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pelaporan LHKPN	1,575,000	1,575,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	S - Rapat Koordinasi/Sosialisasi Pelaksanaan/Penyusunan RATL SPI	9,450,000	9,450,000
3.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	B - Public Campaign Pengawasan Intern/Anti Korupsi	51,280,000	51,280,000
4.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	Q - Bimbingan Teknis Pengawasan Intern	84,600,000	84,600,000
5.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	R - Bimbingan Teknis Pelaksanaan SPI	63,450,000	63,450,000
6.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	J - Bimtek dan Fasilitasi Pengisian LHKPN	58,450,000	58,450,000

05 - Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM														96.18	340,963,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	T - Asistensi Dalam Rangka Persiapan Pemeriksaan BPK	248,500,000	248,500,000
2.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	U - Pendampingan Pemeriksaan BPK	92,463,000	92,463,000

06 - Nilai Pembangunan ZI Inspektorat II														86.08	2,590,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	Z - Implementasi IACM-Maturitas SPIPXX	1,940,000	970,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
			NO	RO		KOMPONEN		SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI	
			2.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif		V - Kajian/Pedoman/Peraturan Pengawasan Intern				1,620,000		1,620,000	
		07 - Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Inspektorat II sesuai standar	18	36	36	55	55	55	73	73	82	100	100	100	1,100,000
			NO	RO		KOMPONEN		SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI	
			1.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif		W - Penyusunan Laporan Evaluasi Internal, Laporan Pengawasan dan Laporan TahunanXXX				1,100,000		1,100,000	
		08 - Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat II	88	88	90	90	92	92	95	95	95	100	100	100	770,119,000
			NO	RO		KOMPONEN		SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI	
			1.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif		Y - Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan				765,019,000		765,019,000	
			2.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif		X - Administrasi Keuangan				5,100,000		5,100,000	
		09 - Indeks Manajemen Risiko Inspektorat II												3.24	970,000
			NO	RO		KOMPONEN		SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI	
			1.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif		Z - Implementasi IACM-Maturitas SPIPXX				1,940,000		970,000	
2.	02 - Meningkatnya kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	01 - Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat II												88.33	249,363,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4116.EBD.965 - Layanan Audit Internal	061 - Pengawalan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BPOM	A - Reviu	40,388,000	40,388,000
2.	WA.4116.EBD.965 - Layanan Audit Internal	061 - Pengawalan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BPOM	B - Asistensi Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan/Laporan keuangan/PAPBJ	66,150,000	66,150,000
3.	WA.4116.EBD.965 - Layanan Audit Internal	062 - Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat II	B - Bimbingan Teknis	45,000,000	45,000,000
4.	WA.4116.EBD.965 - Layanan Audit Internal	062 - Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat II	C - Refreshment ISO 9001:2015 Bagi Auditor Internal di Lingkungan Badan POM	43,825,000	43,825,000
5.	WA.4116.EBD.965 - Layanan Audit Internal	062 - Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat II	D - Asistensi Pengawasan Keuangan dan Kepegawaian	54,000,000	54,000,000

02 - Persentase rekomendasi pengawasan Assurance pada mitra kerja Inspektorat II yang ditindaklanjuti	91	91	91	92	92	92	93	93	93	93.26	93.26	93.26	509,596,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4116.EBD.965 - Layanan Audit Internal	063 - Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat II	B - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	55,600,000	27,800,000
2.	WA.4116.EBD.965 - Layanan Audit Internal	062 - Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat II	A - Audit Kinerja/ Operasional/ Reviu/ Pemantauan/ Evaluasi Atas Program / Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan	481,796,000	481,796,000

03 - Persentase layanan jasa Konsultansi pada mitra kerja Inspektorat II yang ditindaklanjuti tepat waktu	94	94	94	96	96	96	98	98	98	100	100	100	27,800,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4116.EBD.965 - Layanan Audit Internal	063 - Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat II	B - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	55,600,000	27,800,000

04 - Persentase pengaduan wilayah pengawasan Inspektorat II yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu			50	55	60	65	70	75	80	85	90	100	156,816,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4116.EBD.965 - Layanan Audit Internal	063 - Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat II	A - Audit Tujuan Tertentu	156,816,000	156,816,000

3.	03 - Terwujudnya Inspektorat II yang profesional	01 - Persentase pemenuhan dokumen Kapabilitas APIP pada wilayah pengawasan Inspektorat II yang sesuai standar												100	2,233,866,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4116.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	A - Rapat Kerja dan Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Berbasis Risiko di Lingkungan BPOM	643,263,000	643,263,000
2.	WA.4116.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	C - Pengawasan CASN	90,425,000	90,425,000
3.	WA.4116.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	D - Rapat Evaluasi Tingkat Ittama	325,886,000	325,886,000
4.	WA.4116.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	E - Pelatihan/ Workshop/ Meeting Auditor	1,037,996,000	1,037,996,000
5.	WA.4116.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	F - Seminar Internal Auditor (SNIA) / Konferensi IIA	136,296,000	136,296,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET											ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		02 - Nilai telaah sejawat Intern Inspektorat II												82.8	11,495,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4116.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	B - Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor Bidang Pengawasan dan Antar K/L	11,495,000	11,495,000

Total	5,453,149,000

Perencanaan target B1 hingga B7 mengacu pada Manual IKU Rancangan Awal Renstra 2025-2029. Perhitungan terhadap realisasi berdasarkan Manual IKU Rancangan Renstra 2025-2029 dituangkan pada Dokumen Laporan Kinerja (Interm dan Tahunan).

Jakarta, 29 August 2025

Inspektur II Badan Pengawas Obat dan Makanan

YUDIANTO

Lampiran 4. Pengukuran Kinerja Inspektorat Utama Triwulan III Tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target TW III 2025	Target 2025	Realisasi TW III 2025	Capaian TW III 2025 (%)	Capaian Target 2025 (%)	Kategori TW III 2025	Normalisasi Capaian PK	Ket
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	1.1	Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	-	18.37	-	-	-	-	-	Diukur pada akhir TW IV 2025
		1.2	Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama	-	87.6	-	-	-	-	-	Diukur pada akhir TW IV 2025
		1.3	Nilai AKIP Inspektorat Utama	-	82.58	-	-	-	-	-	Diukur pada akhir TW IV 2025
		1.4	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	-	5	-	-	-	-	-	Diukur pada akhir TW IV 2025
		1.5	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	-	3.39	-	-	-	-	-	Diukur pada akhir TW IV 2025
2	Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	2.1	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	-	88.28	-	-	-	-	-	Diukur pada akhir TW IV 2025
		2.2	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	92.00%	92.69%	95.46%	103.76	102.99	Sangat Baik	103.76	Berdasarkan data SAPA APIP per tanggal 6 Oktober 2025: Inspektorat I: 2554/2667= 95,76% Inspektorat II: 2341/2461= 95,12%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target TW III 2025	Target 2025	Realisasi TW III 2025	Capaian TW III 2025 (%)	Capaian Target 2025 (%)	Kategori TW III 2025	Normalisasi Capaian PK	Ket
											Inspektorat Utama: 4895/5128= 95,46%
		2.3	Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	98%	100%	100%	102.04	100.00	Sangat Baik	102.04	Berdasarkan olah data aplikasi SOLUSI September 2025: Inspektorat I: 20/20=100% Inspektorat II: 21/21=100% Inspektorat Utama: 41/41=100%
		2.4	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	80%	100%	93.75%	117.19	93.75	Tidak dapat disimpulkan	110.00	Berdasarkan data pengaduan triwulan III 2025
3	Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional	3.1	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	-	3.9	-	-	-	-	-	Diukur pada akhir TW IV 2025
		3.2	Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama	-	82.8	-	-	-	-	-	Diukur pada akhir TW IV 2025
Nilai Kinerja Organisasi TW II 2025									**Istimewa**	**105.27**	

Lampiran 5. Matriks Evaluasi Kinerja Inspektorat I Triwulan III Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target TW III 2025	Realisasi TW III 2025	Capaian TW III 2025	Proyeksi ketercapaian target akhir tahun 2025	Permasalahan	Rekomendasi
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat I	Persentase Keberhasilan Tingkat Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja BPOM	-	-	-	62,86%	-	-
		Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPOM	-	-	-	4,2	-	-
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	-	-	-	20,75	-	-
		Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM	-	-	-	84,48	-	-
		Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	-	-	-	96,18%	-	-
		Nilai Pembangunan ZI Inspektorat I	-	-	-	89,12	-	-
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Inspektorat I yang sesuai standar	82%	72,73%	88,69%	90,90%	Target tidak tercapai sejak dokumen pertama	Pemastian bahwa target tercapai maksimal di 10/11 dokumen
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat I	95	100	105,26%	100%	Adanya serapan lebih tinggi dari RPD	Pembahasan perhitungan tingkat efisiensi

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target TW III 2025	Realisasi TW III 2025	Capaian TW III 2025	Proyeksi ketercapaian target akhir tahun 2025	Permasalahan	Rekomendasi
		Indeks Manajemen Risiko Inspektorat I	-	-	-	3,64	-	-
2	Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat I	-	-	-	88,48	-	-
		Persentase rekomendasi pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat I yang ditindaklanjuti	92%	95,76%	104,09%	95,76%	Masih terdapat Satker yang belum TL	Pembuatan surat monev terutama ke Satker yang pimpinannya berubah
		Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja inspektorat I yang ditindaklanjuti tepat waktu	98%	100%	102,04%	100%	Tidak ada kendala berarti	Pemantauan berkelanjutan
		Persentase pengaduan wilayah pengawasan Inspektorat I yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	80%	91,67%	114,59%	100%	Pengaduan baru masuk di bulan September yang mempengaruhi perhitungan	Penyelesaian pengaduan yang sudah menjadi bagian dari perhitungan
3	Terwujudnya Inspektorat I yang profesional	Persentase pemenuhan dokumen Kapabilitas APIP pada wilayah pengawasan Inspektorat I yang sesuai standar	-	-	-	100%	-	-
		Nilai telaah sejawat intern Inspektorat I	-	-	-	82,8	-	-

Lampiran 6. Matriks Evaluasi Kinerja Inspektorat II Triwulan III Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian TW III	Proyeksi ketercapaian target akhir tahun	Permasalahan	Rekomendasi
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat II	Persentase Keberhasilan Tingkat Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja BPOM	-	-	-	62,86%	-	-
		Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPOM	-	-	-	4,2	-	-
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	-	-	-	20,75	-	-
		Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM	-	-	-	84,48	-	-
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	-	-	-	96,18%	-	-
		Nilai Pembangunan ZI Inspektorat II	-	-	-	86,08	-	-

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian TW III	Proyeksi ketercapaian target akhir tahun	Permasalahan	Rekomendasi
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Inspektorat II sesuai standar	82%	72,73%	88,70%	90,90%	Terdapat 1 dokumen (Laporan Evaluasi Internal TW IV 2024) yang tidak sesuai standar karena keterlambatan pada pelaporan. Sehingga tidak tercapainya target.	1. Pelaporan data kinerja selanjutnya sesuai dengan tenggat waktu 2. Melakukan pembahasan data kinerja dan realisasi kinerja dengan pimpinan secara berkala dan lebih awal untuk mengantisipasi dinamika kegiatan pimpinan
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat II	95%	100%	105,26%	100%	Terdapat kendala pada pelaksanaan Rencana Penarikan Dana (RPD) meliputi: 1. Perencanaan yang tidak akurat, kurangnya analisis kebutuhan dana yang komprehensif 2. Tidak konsistennya kegiatan dan pembayaran sesuai jadwal	Mempertahankan capaian yang sudah baik

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian TW III	Proyeksi ketercapaian target akhir tahun	Permasalahan	Rekomendasi
							3. Perubahan kebijakan anggaran.	
		Indeks Manajemen Risiko Inspektorat II	-	-	-	3,24	-	-
2	Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat II	100%	100%	100	88,33	-	Monitoring secara berkala
		Persentase rekomendasi pengawasan Assurance pada mitra kerja Inspektorat II yang ditindaklanjuti	93%	95,12%	102,28%	95,12%	1. Petugas monev bukan pegawai yang melakukan audit, sehingga petugas monev membutuhkan waktu untuk memahami temuan dan rekomendasi pada LHA agar tindak lanjut dapat memberikan perbaikan atau menyelesaikan rekomendasi yang diberikan oleh auditor; 2. Satuan/Unit Kerja terkait kurang memahami secara teknis atau detil rekomendasi temuan, sehingga tindak lanjut yang disampaikan	1. Melakukan diskusi dengan tim audit terkait untuk membahas temuan dan rekomendasi yang tepat untuk menyepakati tindak lanjut yang sesuai; 2. Menjadwalkan evaluasi berkala terhadap tindak lanjut temuan untuk meninjau progres dan mengatasi hambatan yang dialami Satuan/Unit Kerja dalam menindaklanjuti

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian TW III	Proyeksi ketercapaian target akhir tahun	Permasalahan	Rekomendasi
							kurang memberikan perbaikan yang berarti dan petugas monev membutuhkan koordinasi berulang kali; 3. Satuan/Unit Kerja tidak aware terhadap temuan hasil audit yang belum sesuai saran, sehingga petugas monev harus mengingatkan Satuan/Unit Kerja.	rekomendasi temuan; 3. Bersurat secara berkala kepada Satuan/Unit Kerja terkait, untuk memberikan informasi status temuan yang Belum Sesuai Saran ataupun yang Belum ditindaklanjuti.
		Persentase layanan jasa Konsultansi pada mitra kerja inspektorat II yang ditindaklanjuti tepat waktu	98%	100%	102,04%	100%	Tidak ada Kendala	Mekanisme pencatatan, pemantauan dan tindak lanjut koordinasi selalu dilakukan secara disiplin dan sesuai dengan prosedur, serta melakukan evaluasi rutin agar solusi yang diberikan efektif dan kualitas layanan tetap optimal

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian TW III	Proyeksi ketercapaian target akhir tahun	Permasalahan	Rekomendasi
		Persentase pengaduan wilayah pengawasan Inspektorat II yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	80%	100%	125%	100%	Tidak Ada Kendala	Memperkuat analisa 5W 1H untuk setiap pengaduan atau arahan pimpinan yang diterima
3	Terwujudnya Inspektorat II yang profesional	Persentase pemenuhan dokumen Kapabilitas APIP pada wilayah pengawasan Inspektorat II yang sesuai standar	-	-	-	100%	-	-
		Nilai telaah sejawat intern Inspektorat II	-	-	-	82,8	-	-

Lampiran 7. Pengukuran Efisiensi Pencapaian Sasaran Program Inspektorat Utama Triwulan III Tahun 2025

Sasaran	Indikator	Realisasi Anggaran per IKU	Nilai Pencapaian Indikator	Realisasi Anggaran per Sasaran	Nilai Kinerja per Sasaran	Indeks Efisiensi (IE)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	77.60%	-	76.47%	diukur pada TW IV 2025	-	1	-	Belum dapat disimpulkan
	Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama	103.82%	-						
	Nilai AKIP Inspektorat Utama	100.00%	-						
	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	100.92%	-						
	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	0.00%	-						
Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	77.47%	-	92.71%	107.66%	1.16	1	0.16	Efisien
	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	107.95%	103.76%						
	Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	0.00%	102.04%						

INSPEKTORAT UTAMA

Sasaran	Indikator	Realisasi Anggaran per IKU	Nilai Pencapaian Indikator	Realisasi Anggaran per Sasaran	Nilai Kinerja per Sasaran	Indeks Efisiensi (IE)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	0.00%	117.19%						
Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	77.48%	-	78.51%	diukur pada TW IV 2025	-	1	-	Belum dapat disimpulkan
	Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama	79.53%	-						

Lampiran 8. Pengukuran Efisiensi Pencapaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Utama Triwulan III Tahun 2025

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	518,816,000	424,894,286	81.90%	Diukur pada TW IV 2025	-	1	-	Belum dapat disimpulkan
Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama	129,643,000	102,570,569	79.12%	Diukur pada TW IV 2025	-	1	-	Belum dapat disimpulkan
Nilai AKIP Inspektorat Utama	216,000	216,000	100.00%	Diukur pada TW IV 2025	-	1	-	Belum dapat disimpulkan
Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	9,279,353,000	7,515,695,671	80.99%	Diukur pada TW IV 2025	-	1	-	Belum dapat disimpulkan
Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	-	-	-	Diukur pada TW IV 2025	-	1	-	Tidak dapat disimpulkan karena tidak ada anggaran
Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	330,417,000	252,411,686	76.39%	Diukur pada TW IV 2025	-	1	-	Belum dapat disimpulkan
Persentase rekomendasi pengawasan assurance yang ditindaklanjuti	626,865,000	521,739,562	83.23%	103.76%	1.25	1	0.25	Efisien

INSPEKTORAT UTAMA

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	16,155,000	1,520,000	9.41%	102.04%	10.85	1	9.85	Efisien
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	31,840,000	0	0.00%	117.19%	-	1	-	Belum dapat disimpulkan
Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	169,483,000	117,541,663	69.35%	Diukur pada TW IV 2025	-	1	-	Belum dapat disimpulkan
Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama	26,700,000	18,400,000	68.91%	Diukur pada TW IV 2025	-	1	-	Belum dapat disimpulkan

Lampiran 9. Pengukuran Kinerja Program/Kegiatan Inspektorat Utama TW III Tahun 2025

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	KINERJA (KUMULATIF)							ANGGARAN (KUMULATIF)						
		TARGET	REALISASI			CAPAIAN (%)			PAGU	REALISASI			CAPAIAN (%)		
			B07	B08	B09	B07	B08	B09		B07	B08	B09	B07	B08	B09
Program Dukungan Manajemen		**247**	**179**	**195**	**206**	**72,47%**	**78,95%**	**83,40%**	**11.129.488.000**	**6.986.246.019**	**8.086.528.978**	**8.954.990.257**	**62,77%**	**72,66%**	**80,46%**
A	**4115.CAN.001 Perangkat pengolah data dan komunikasi**	**18**	**17**	**23**	**23**	**94,44%**	**127,78%**	**127,78%**	**365.000.000**	**364.998.997**	**364.998.997**	**364.998.997**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
051	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	18	17	23	23	94,44%	127,78%	127,78%	365.000.000	364.998.997	364.998.997	364.998.997	100,00%	100,00%	100,00%
A	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
B	Pengadaan alat pengolah data	18	17	23	23	94,44%	127,78%	127,78%	365.000.000	364.998.997	364.998.997	364.998.997	100,00%	100,00%	100,00%
B	**4115.EBA.956 Layanan BMN**	**1**	**1**	**1**	**1**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**8.000.000**	**7.999.072**	**7.999.072**	**7.999.072**	**99,99%**	**99,99%**	**99,99%**
054	Penatausahaan, Monitoring, dan Penyusunan Laporan BMN	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%	8.000.000	7.999.072	7.999.072	7.999.072	99,99%	99,99%	99,99%
A	Penatausahaan Barang Milik Negara Inspektorat Utama	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%	8.000.000	7.999.072	7.999.072	7.999.072	99,99%	99,99%	99,99%
C	**4115.EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal**	**14**	**10**	**11**	**11**	**71,43%**	**78,57%**	**78,57%**	**430.147.000**	**276.988.397**	**295.429.410**	**344.818.722**	**64,39%**	**68,68%**	**80,16%**
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	14	10	11	11	71,43%	78,57%	78,57%	430.147.000	276.988.397	295.429.410	344.818.722	64,39%	68,68%	80,16%
A	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
B	SUB KOMPONEN DIHAPUS														

INSPEKTORAT UTAMA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	KINERJA (KUMULATIF)							ANGGARAN (KUMULATIF)						
		TARGET	REALISASI			CAPAIAN (%)			PAGU	REALISASI			CAPAIAN (%)		
			B07	B08	B09	B07	B08	B09		B07	B08	B09	B07	B08	B09
C	Penilaian Risiko, Pemantauan SPIP dan Pelaksanaan Fungsi Koordinator Auditor Internal	1	0	0	1	0,00%	0,00%	100,00%	25.660.000	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
D	Intervensi Pemenuhan Indikator WBK dan atau WBBM	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%	99.954.000	48.456.520	59.762.400	87.438.862	48,48%	59,79%	87,48%
E	Desk Evaluasi PMPZI Menuju Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel, Dan Pelayanan Publik Yang Prima (Self Blocking)	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
F	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
G	Desk Maturitas Manajemen Risiko (Self Blocking)	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
H	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
I	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
J	Pendampingan Pemeriksaan BPK	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%	174.674.000	142.995.651	142.995.651	154.593.291	81,86%	81,86%	88,50%
K	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
L	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
M	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
N	Penyusunan Laporan Akuntabilitas, Laporan Tahunan, Laporan Pengawasan, dan Laporan Lainnya (Inspektorat I)	2	1	1	1	50,00%	50,00%	50,00%	216.000	216.000	216.000	216.000	100,00%	100,00%	100,00%

INSPEKTORAT UTAMA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	KINERJA (KUMULATIF)							ANGGARAN (KUMULATIF)						
		TARGET	REALISASI			CAPAIAN (%)			PAGU	REALISASI			CAPAIAN (%)		
			B07	B08	B09	B07	B08	B09		B07	B08	B09	B07	B08	B09
O	Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%	129.643.000	85.320.226	92.455.359	102.570.569	65,81%	71,32%	79,12%
P	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
Q	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
R	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
S	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
T	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
U	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
D	**4115.EBA.994 Layanan Perkantoran**	**36**	**21**	**24**	**27**	**58,33%**	**66,67%**	**75,00%**	**8.494.782.000**	**5.217.947.679**	**6.100.091.603**	**6.796.948.267**	**61,43%**	**71,81%**	**80,01%**
001	Gaji dan tunjangan	12	7	8	9	58,33%	66,67%	75,00%	7.071.503.000	4.371.698.288	5.009.611.781	5.626.633.537	61,82%	70,84%	79,57%
001.A	Pembayaran gaji dan tunjangan	12	7	8	9	58,33%	66,67%	75,00%	7.071.503.000	4.371.698.288	5.009.611.781	5.626.633.537	61,82%	70,84%	79,57%
002	Operasional dan pemeliharaan kantor	24	14	16	18	58,33%	66,67%	75,00%	1.423.279.000	846.249.391	1.090.479.822	1.170.314.730	59,46%	76,62%	82,23%
002.A	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	12	7	8	9	58,33%	66,67%	75,00%	795.792.000	410.994.035	637.772.625	680.440.870	51,65%	80,14%	85,50%
002.B	Administrasi kegiatan	12	7	8	9	58,33%	66,67%	75,00%	627.487.000	435.255.356	452.707.197	489.873.860	69,36%	72,15%	78,07%
E	**4115.EBB.951 Layanan Sarana Internal**	**9**	**10**	**10**	**10**	**111,11%**	**111,11%**	**111,11%**	**25.000.000**	**24.998.008**	**24.998.008**	**24.998.008**	**99,99%**	**99,99%**	**99,99%**
053	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	9	10	10	10	111,11%	111,11%	111,11%	25.000.000	24.998.008	24.998.008	24998008	99,99%	99,99%	99,99%

INSPEKTORAT UTAMA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	KINERJA (KUMULATIF)							ANGGARAN (KUMULATIF)						
		TARGET	REALISASI			CAPAIAN (%)			PAGU	REALISASI			CAPAIAN (%)		
			B07	B08	B09	B07	B08	B09		B07	B08	B09	B07	B08	B09
A	Pengadaan Fasilitas Perkantoran	9	10	10	10	111,11%	111,11%	111,11%	25.000.000	24.998.008	24.998.008	24.998.008	99,99%	99,99%	99,99%
F	**4115.EBD.961 Layanan Reformasi Kinerja**	**6**	**1**	**1**	**3**	**16,67%**	**16,67%**	**50,00%**	**42.205.000**	**28.402.715**	**31.769.715**	**32.367.215**	**67,30%**	**75,27%**	**76,69%**
051	Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern	6	1	1	3	16,67%	16,67%	50,00%	42.205.000	28.402.715	31.769.715	32.367.215	67,30%	75,27%	76,69%
A	Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor Bidang Pengawasan dan Antar K/L	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%	26.700.000	18.400.000	18.400.000	18.400.000	68,91%	68,91%	68,91%
B	Koordinasi Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat I	1	0	0	1	0,00%	0,00%	100,00%	12.200.000	7.801.175	11.168.175	11.168.175	63,94%	91,54%	91,54%
C	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
D	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
E	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
F	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
G	Pengelolaan Jabatan Fungsional	2	0	0	1	0,00%	0,00%	50,00%	1.357.000	253.840	253.840	851.340	18,71%	18,71%	62,74%
H	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
I	SUB KOMPONEN DIHAPUS														

INSPEKTORAT UTAMA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	KINERJA (KUMULATIF)							ANGGARAN (KUMULATIF)						
		TARGET	REALISASI			CAPAIAN (%)			PAGU	REALISASI			CAPAIAN (%)		
			B07	B08	B09	B07	B08	B09		B07	B08	B09	B07	B08	B09
J	Rapat Kerja Rencana Pengawasan Internal Inspektorat Utama TA 2025	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	1.373.000	1.372.700	1.372.700	1.372.700	99,98%	99,98%	99,98%
K	Penyusunan Analisis pengawasan intern / Tren Analisis Pemeriksaan	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	575.000	575.000	575.000	575.000	100,00%	100,00%	100,00%
G	**4115.EBD.965 Layanan Audit Internal**	**34**	**22**	**24**	**26**	**64,71%**	**70,59%**	**76,47%**	**703.131.000**	**429.655.696**	**486.835.591**	**512.656.471**	**61,11%**	**69,24%**	**72,91%**
051	Pengawalan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BPOM	8	4	4	4	50,00%	50,00%	50,00%	66.453.000	50.178.395	50.178.395	58.327.395	75,51%	75,51%	87,77%
A	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
B	Asistensi Dalam Rangka Persiapan Pemeriksaan BPK	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%	49.606.000	49.605.395	49.605.395	49.605.395	100,00%	100,00%	100,00%
C	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
D	Lokakarya Penguatan Reviu Perencanaan dan Penganggaran Dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan BPOM	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	16.847.000	573.000	573.000	8.722.000	3,40%	3,40%	51,77%
E	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
052	Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat I	18	13	15	16	72,22%	83,33%	88,89%	588.098.000	378.892.301	436.072.196	452.223.256	64,43%	74,15%	76,90%

INSPEKTORAT UTAMA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	KINERJA (KUMULATIF)							ANGGARAN (KUMULATIF)						
		TARGET	REALISASI			CAPAIAN (%)			PAGU	REALISASI			CAPAIAN (%)		
			B07	B08	B09	B07	B08	B09		B07	B08	B09	B07	B08	B09
A	Audit Kinerja/Operasional/Reviu /Pemantauan/Evaluasi atas Program/Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan	4	2	3	3	50,00%	75,00%	75,00%	324.719.000	211.027.070	258.723.965	258.723.965	64,99%	79,68%	79,68%
B	Bimbingan Teknis Pimpinan Inspektorat I	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%	59.967.000	27.387.040	32.981.040	44.924.280	45,67%	55,00%	74,92%
C	Bag TU - Bimbingan Teknis Pimpinan Inspektur Utama	12	9	10	11	75,00%	83,33%	91,67%	198.667.000	138.818.191	142.517.191	146.290.011	69,87%	71,74%	73,64%
D	Bag TU - Bimbingan Teknis Manajemen Pengawasan Intern	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%	4.745.000	1.660.000	1.850.000	2.285.000	34,98%	38,99%	48,16%
053	Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat I	8	5	5	6	62,50%	62,50%	75,00%	48.580.000	585.000	585.000	2.105.820	1,20%	1,20%	4,33%
A	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
B	Audit Tujuan Tertentu	1	0	0	1	0,00%	0,00%	100,00%	31.840.000	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
C	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
D	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
E	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
F	Pembahasan Layanan Konsultansi Pengawasan Intern	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%	16.155.000	0	0	1.520.820	0,00%	0,00%	9,41%

INSPEKTORAT UTAMA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	KINERJA (KUMULATIF)							ANGGARAN (KUMULATIF)						
		TARGET	REALISASI			CAPAIAN (%)			PAGU	REALISASI			CAPAIAN (%)		
			B07	B08	B09	B07	B08	B09		B07	B08	B09	B07	B08	B09
G	Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Ittama BPOM	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%	585.000	585.000	585.000	585.000	100,00%	100,00%	100,00%
H	**4116.EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal**	**17**	**9**	**11**	**13**	**52,94%**	**64,71%**	**76,47%**	**605.099.000**	**324.402.608**	**462.353.735**	**503.613.460**	**53,61%**	**76,41%**	**83,23%**
061	Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	17	9	11	13	52,94%	64,71%	76,47%	605.099.000	324.402.608	462.353.735	503.613.460	53,61%	76,41%	83,23%
A	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
B	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
C	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
D	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
E	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
F	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
G	Evaluasi WBK/WBBM Mandiri	1	0	1	1	0,00%	100,00%	100,00%	113.578.000	31.187.697	87.212.725	113.577.273	27,46%	76,79%	100,00%
H	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
I	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
J	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
K	SUB KOMPONEN DIHAPUS														

INSPEKTORAT UTAMA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	KINERJA (KUMULATIF)							ANGGARAN (KUMULATIF)						
		TARGET	REALISASI			CAPAIAN (%)			PAGU	REALISASI			CAPAIAN (%)		
			B07	B08	B09	B07	B08	B09		B07	B08	B09	B07	B08	B09
L	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
M	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
N	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
O	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
P	Penjaminan Kualitas/Pendampingan Evaluasi SPIPT Satuan Kerja	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	14.300.000	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Q	Bimbingan Teknis Sang Integritas	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%	30.350.000	30.349.860	30.349.860	30.349.860	100,00%	100,00%	100,00%
R	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
S	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
T	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
U	Pendampingan Pemeriksaan BPK	1	0	0	1	0,00%	0,00%	100,00%	60.300.000	36.359.000	36.359.000	38.935.000	60,30%	60,30%	64,57%
V	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
W	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
X	Administrasi Keuangan	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%	2.460.000	1.440.000	1.780.000	2.460.000	58,54%	72,36%	100,00%
Y	Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan	12	7	8	9	58,33%	66,67%	75,00%	384.111.000	225.066.051	306.652.150	318.291.327	58,59%	79,83%	82,86%
Z	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
I	**4116.EBD.961 Layanan Reformasi Kinerja**	**106**	**82**	**84**	**86**	**77,36%**	**79,25%**	**81,13%**	**153.978.000**	**98.774.448**	**99.974.448**	**103.574.448**	**64,15%**	**64,93%**	**67,27%**

INSPEKTORAT UTAMA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	KINERJA (KUMULATIF)							ANGGARAN (KUMULATIF)						
		TARGET	REALISASI			CAPAIAN (%)			PAGU	REALISASI			CAPAIAN (%)		
			B07	B08	B09	B07	B08	B09		B07	B08	B09	B07	B08	B09
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	106	82	84	86	77,36%	79,25%	81,13%	153.978.000	98.774.448	99.974.448	103.574.448	64,15%	64,93%	67,27%
A	Rapat Kerja dan Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Berbasis Risiko di Lingkungan BPOM	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	36.867.000	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
B	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
C	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
D	Rapat Evaluasi Tingkat Ittama	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%	10.798.000	10.797.400	10.797.400	10.797.400	99,99%	99,99%	99,99%
E	Pelatihan/ Workshop/ Meeting Auditor	104	81	83	85	77,88%	79,81%	81,73%	106.313.000	87.977.048	89.177.048	92.777.048	82,75%	83,88%	87,27%
F	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
J	**4116.EBD.965 Layanan Audit Internal**	**6**	**6**	**6**	**6**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**302.146.000**	**212.078.399**	**212.078.399**	**263.015.597**	**70,19%**	**70,19%**	**87,05%**
061	Pengawalan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BPOM	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
B	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
062	Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat II	6	6	6	6	100,00%	100,00%	100,00%	302.146.000	212.078.399	212.078.399	263.015.597	70,19%	70,19%	87,05%
A	Audit Berbasis Risiko	6	6	6	6	100,00%	100,00%	100,00%	302.146.000	212.078.399	212.078.399	263.015.597	70,19%	70,19%	87,05%

INSPEKTORAT UTAMA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	KINERJA (KUMULATIF)							ANGGARAN (KUMULATIF)						
		TARGET	REALISASI			CAPAIAN (%)			PAGU	REALISASI			CAPAIAN (%)		
			B07	B08	B09	B07	B08	B09		B07	B08	B09	B07	B08	B09
B	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
C	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
D	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
063	Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat II	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
B	SUB KOMPONEN DIHAPUS														

BADAN POM

BerAKHLAK #bangga melayani bangsa

BIASAKAN yang Benar BUKAN BENARKAN yang Biasa

Pengarah
Inspektur Utama

Penanggung Jawab
Inspektur I dan inspektur II

Ketua
Kepala Bagian Tata Usaha Inpektorat Utama

Tim Penyusun
Alexander Arie S.D, Ardianto Nugroho, Brigitta Melati I.O, Tri Dahus Susanto, Nabila Emy Mayasari, Sarah Ayu Mutiah, Dara Putri Agnes R, Ardian Praba Agung Laksana, Nani Wardani, Sarah Olivia, Hans Samuel Joy, Aghnia Chairani, Alfira Prameswari Utami, Firdaus Ratna Kumala, Dini Nur Astria, Adhikananda Aswinta Pradhana, Dhika Yoga Saputra, Ramanda Eka Yudistira.